



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan. A. Yani No. 2 Telp. (0511) 4721504, Fax. (0511) 4721453 Martapura  
Website : [www.bappedalitbang.banjarkab.go.id](http://www.bappedalitbang.banjarkab.go.id), Email : [bappedalitbang@banjarkab.go.id](mailto:bappedalitbang@banjarkab.go.id)

Martapura, 29 Mei 2023

Nomor : 000.9/452/PPI/Bappedalitbang/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penawaran Kerjasama Swakelola

Kepada Yth.  
Kepala Lembaga Penelitian  
dan Pengabdian Kepada  
Masyarakat Universitas Islam  
Kalimantan Muhammad  
Arsyad Al Banjari

di -

Banjarmasin

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar pada Sub Kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi, yang dilaksanakan menggunakan Metode Swakelola Tipe III, dengan ini kami menawarkan kepada Bapak/Ibu untuk melaksanakan pekerjaan berupa Kajian/Penelitian terkait **Evaluasi Kelembagaan**.

Bersama surat ini, kami sampaikan juga Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai bahan kajian awal. Untuk tindak lanjut pelaksanaan kegiatan ini, diminta segera memasukkan Usulan Proposal, Teknis dan Biaya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Bappedalitbang  
Kabupaten Banjar

Dra. Hj. SITI HAMIDAH, M. Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631224 198503 2 006



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.







**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

PERINGKAT AKREDITASI B (BAIK) SK BAN-PT NO. 203/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2020

Kampus Utama: Jl. Adhyaksa No. 2 Kayu Tangi Banjarmasin-70123, Telp/Facs (0511) 3304352, www.uniska-bjm.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: 355/UNISKA-LP2M/VI/2023

**TENTANG  
TIM KAJIAN  
EVALUASI TERHADAP EFEKTIFITAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANJAR**

Bismillahirrahmanirrahim,

**KETUA LPPM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI BANJARMASIN**

- Menimbang : a. Bahwa dosen wajib meningkatkan Kinerja Penelitian Di Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)  
b. Guna Meningkatkan mutu dan keunggulan Perguruan tinggi dimasa yang akan datang  
c. Sehubungan dengan butir a dan butir b di atas dipandang perlu menerbitkan surat keputusan
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 mewajibkan perguruan tinggi untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  
b. PP No 4 Tahun 2014 tentang peyelengara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
c. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
d. Surat Dirjen Dikti Nomor 2050/E/T/2011 tentang kebijakan unggah karya ilmiah dan jurnal;  
e. Keputusan Badan Pembina Yayasan Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari (UNISKA) Banjarmasin No : 01/SK-Pembina/VIII/2017 Tentang Pengesahan Statuta UNISKA MAB Tahun 2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Kajian Evaluasi terhadap Efektifitas Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banjar  
Kedua : Tim bertugas mengkaji evaluasi terhadap efektifitas organisasi perangkat daerah Kabupaten Banjar. Sejak dikelurakannya Surat Keputusan ini.  
Ketiga : Segala biaya yang timbul dari surat keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banjar



**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

PERINGKAT AKREDITASI B (BAIK) SK BAN-PT NO. 203/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2020

Kampus Utama: Jl. Adhyaksa No. 2 Kayu Tangi Banjarmasin-70123, Telp/Facs (0511) 3304352, www.uniska-bjm.ac.id

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak diterbitkan surat keputusan ini, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Banjarmasin

Pada tanggal : 26 Juni 2023

**Dr. Muhammad Jaelani, S.Pt., M.Si.**  
NIP. 19670107 199403 1 002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pengurus Yayasan UNISKA
2. Yth. Rektor UNISKA
3. Yth. Wakil Rektor I UNISKA
4. Arsip.





**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

PERINGKAT AKREDITASI B (BAIK) SK BAN-PT NO. 203/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2020

Kampus Utama: Jl. Adhyaksa No. 2 Kayu Tangi Banjarmasin-70123, Telp/Facs (0511) 3304352, www.uniska-bjm.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Ketua LPPM Universitas Islam Kalimantan  
Nomor : 355/UNISKA-LP2M/VI/2023  
Tanggal : 26 Juni 2023

**PERSONALIA TIM KAJIAN  
EVALUASI TERHADAP EFEKTIFITAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANJAR**

Ketua Pelaksana : Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. Achmad Jaelani, S.Pt., M.Si.  
Rizka Zulfikar, S.TP., M.M.  
Irfan, S.T., M.T.

  
**Dr. Achmad Jaelani, S.Pt., M.Si.**  
NIP. 19670107 199403 1 002



## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan Pemerintahan	: 5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan	: 5.05	Penelitian dan Pengembangan
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Program	: 5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kegiatan	: 5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Waktu Pelaksanaan	: Juni s.d November	
Jumlah Anggaran	: Rp. 100.000.000,- ( <i>Seratus Juta Juta Rupiah</i> )	
Kode Rekening	: 5.1.02.02.09 / Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	
Tahun	: 2023	
Pelaksana	: Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

## **EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**

### **DI KABUPATEN BANJAR**

#### **A. LATAR BELAKANG**

##### **- GAMBARAN UMUM**

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan harapan semua pihak. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Merujuk peraturan tersebut, bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan mengevaluasi struktur, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja.

Kehadiran organisasi perangkat daerah secara umum dipandang belum mampu memberikan dukungan maksimal terkait dengan pelaksanaan program otonomi daerah. Secara normatif pembentukan organisasi perangkat daerah telah mengakomodasi ketentuan yang berlaku, namun dalam kenyataannya, organisasi yang ada justru memberikan beban keuangan bagi daerah. Anggaran lebih banyak dipakai untuk biaya operasional pegawai daripada pelaksanaan pembiayaan urusan itu sendiri atau biaya pembangunan. Pada bagian lain, kehadiran regulasi teknis yang mengharuskan dibentuknya organisasi perangkat daerah sebagai wadah pelaksanaan urusan tertentu menambah beban daerah. Akibatnya organisasi yang dibentuk meskipun tidak banyak memberi kontribusi bagi kepentingan masyarakat tetap dipertahankan dan menghabiskan dana publik.

Semangat penataan organisasi perangkat daerah selama ini lebih sering berimplikasi, secara langsung maupun tidak langsung, terhadap penambahan jabatan struktural. Semakin besar organisasi maka semakin besar struktur yang ada sehingga semakin besar peluang seorang pegawai menduduki jabatan. Kehadiran organisasi yang dibentuk seolah hanya ingin mengakomodasi kepentingan pegawai negeri atau birokrat di daerah.

Kabupaten Banjar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Ibukota Kabupaten Banjar terletak di Martapura. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah ±4.668,50 Km<sup>2</sup>, merupakan wilayah terluas ke-3 di Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu. Kabupaten Banjar memiliki jumlah penduduk sebanyak 506.839 jiwa. Kabupaten Banjar termasuk dalam calon Wilayah Metropolitan Banjar Bakula.

Pada Tahun 2021, Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar resmi dirampingkan dari yang awalnya 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi 27 OPD. Penataan Kelembagaan ini dimulai dengan adanya *Good Governance* melalui penyelenggaraan pemerintahan dengan mengartikulasikan akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan kredibilitas. Melalui penataan kelembagaan OPD ini, diharapkan agar dapat tercipta suatu tatanan kerja yang lebih teratur, serta memperjelas pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah. Penataan kelembagaan ini sebagai tindak lanjut peraturan perundangan-undangan, serta sebagai upaya untuk mewujudkan kelembagaan perangkat daerah yang lebih efektif dan efisien.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan kajian/penelitian ini dimaksudkan untuk dapat dijadikan sebuah dasar dalam penentuan kebijakan pemerintah daerah lebih lanjut terkait dengan struktur organisasi yang sudah ada serta untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai kondisi Kelembagaan Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Banjar.

Kegiatan Penelitian dan Pengkajian yang dilaksanakan hasilnya akan digunakan sebagai pemberi alternatif dari sisi efektif dan efisien terhadap kinerja OPD yang banyak mengampu berbagai urusan.

## **C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **- METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan yang digunakan yaitu dengan Swakelola yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Banjar dengan melibatkan Tim Peneliti dari Akademisi/Universitas sesuai substansi penelitian dan pengembangan yang diteliti.

### **- TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Tempat pelaksanaan kegiatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar

## **D. JADWAL KEGIATAN**

### **- WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu pelaksanaan kegiatan dijadwalkan dibulan Juni s/d November 2023 (150 Hari Kalender)

### **- BESARNYA BIAYA**

Pelaksanaan kegiatan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2023, melalui DPA Badan Perencanaan



Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023 dengan Pagu Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

#### **E. KELUARAN**

Keluaran kegiatan tersebut adalah Dokumen kajian/penelitian terkait Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Banjar.

#### **F. PENUTUP**

1. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijaksanaan pemerintah yang berlaku, maka segala sesuatu yang termaktub di dalam KAK ini akan diteliti dan diperbaiki sesuai ketentuan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam KAK ini akan ditetapkan lebih lanjut.
3. Demikian KAK ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen,



**H. YANUARSA, ST, MT**

NIP. 19720101 200003 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan. A. Yani No. 2 Telp. (0511) 4721504, Fax. (0511) 4721453 Martapura  
Website : [www.bappedalitbang.banjarkab.go.id](http://www.bappedalitbang.banjarkab.go.id), Email : [bappedalitbang@banjarkab.go.id](mailto:bappedalitbang@banjarkab.go.id)

Martapura, 10 November 2023

Nomor : 000.9/1036/PPI/Bappedalitbang/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Hal : Undangan Ekspose Akhir Penelitian  
Evaluasi Kelembagaan

Kepada Yth.  
**(Daftar Undangan Terlampir)**  
di -  
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar Tahun 2023 yang berjudul **“Analisis Efektifitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banjar”**, dengan ini kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu untuk dapat berhadir dalam kegiatan Ekspose Akhir yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 14 November 2023  
Waktu Pelaksanaan : Pkl. 09.30 WITA s/d Selesai  
Tempat : Aula Bauntung Lantai III Bappedalitbang Kab. Banjar  
Acara : Ekspose Akhir Penelitian Evaluasi Kelembagaan

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Bappedalitbang  
Kabupaten Banjar

Dra. Hj. SITI HAMIDAH, M. Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631224 198503 2 006



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Catatan : - Agar berhadir tepat waktu dikarenakan jadwal kegiatan selanjutnya yang padat.  
- Diharapkan yang berhadir adalah yang telah mengikuti rapat (FGD) Evaluasi Kelembagaan sebelumnya.

Lampiran :

Nomor : 000.9/1036/PPI/Bappedalitbang/2023

Tanggal : 10 November 2023

Daftar Undangan Ekspose Antara Penelitian Evaluasi Kelembagaan :

1. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Banjar
2. Inspektorat Kabupaten Banjar
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar
5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar
6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
7. Dinas Pertanian Kabupaten Banjar
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar
9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Banjar
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar
11. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar
12. Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar
13. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banjar
14. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjar
15. Sekretaris dan Kasubbag pada Sekretariat Bappedalitbang Kabupaten Banjar
16. Kepala Bidang dan Kasubbid Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappedalitbang Kabupaten Banjar
17. Kepala Bidang dan Kasubbid Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappedalitbang Kabupaten Banjar
18. Kepala Bidang dan Kasubbid Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Kabupaten Banjar
19. Kepala Bidang dan Kasubbid Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Kabupaten Banjar
20. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Bappedalitbang Kabupaten Banjar





Laporan Hasil

# ANALISIS EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KAB. BANJAR

Kerjasama :  
BAPPEDA – LITBANG KAB. BANJAR &  
LP2M–UNISKA MAB BANJARMASIN



1


## Pendahuluan (1/2)

- Tantangan Kabupaten Banjar untuk menjalankan fungsi pemerintahannya secara optimal (good local governance) sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah atau dikenal dengan urusan pemerintahan konkuren.
- UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sertaturunannya PP No. 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah telah membawaperubahan yang cukup signifikan dalam pembentukan perangkat daerah yang diarahkan pada organisasi yang tepat fungsi dan ukuran berdasarkan beban kerja.
- PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, maupun PermenPAN&RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, langkah untuk mewujudkan struktur kelembagaan yang ideal



2





## Pendahuluan (2/2)

- Penyederhaan birokrasi dengan melakukan perampingan beberapa perangkat daerah yang ada sesuai Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar resmi dirampingkan yang awalnya 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi 27 OPD.
- Permen PAN & RB Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 3 ayat (3) mengamanatkan bahwa evaluasi kelembagaan instansi pemerintah yang dilaksanakan secara periodik, paling tidak 3 (tiga) tahun sekali.
- Dengan adanya evaluasi kelembagaan, diharapkan Kabupaten Banjar dapat meningkatkan kinerjanya secara berkala yang merupakan salah satu bagian dari semangat reformasi manajemen pemerintahan dan percepatan pembangunan.

3



## DASAR PEMBENTUKAN OPD

Penataan Urusan Pemerintahan

- Pembagian urusan pemerintahan diatur dalam lampiran UU sehingga memberikan status otonomi yang lebih kuat kepada daerah otonom.
- Ditentukan suatu pola pembagian urusan pemerintahan antar tingkatan/susunan pemerintahan sehingga terhindar dari tumpang-tindih dan ketidakjelasan kewenangan;
- Terdapat keseimbangan beban urusan berdasarkan kriteria dan prinsip pembagian urusan pemerintahan yang sudah ditentukan;
- Urusan yang mempunyai dampak ekologis yang serius hanya diotoromikan sampai ke daerah provinsi sehingga relatif mudah dikendalikan.

4

## Tinjauan Pustaka



5

## Metode



### Waktu & Tempat

Kajian ini dilakukan di Kabupaten Banjar mulai bulan Juni hingga Oktober 2023.



### Populasi & Sampel

Populasi dari evaluasi kelembagaan ini adalah 27 OPD di kabupaten Banjar. Sampel untuk OPD berupa kuesioner pada tiga tingkatan organisasi, yakni tingkatan tertinggi organisasi atau organization wide level dan dua tingkatan di bawah tingkatan tertinggi organisasi atau suborganization wide level.

6

## Daftar Sampel

- 1) Sekretariat Daerah
- 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 3) Inspektorat Daerah
- 4) Dinas Pendidikan
- 5) Dinas Kesehatan
- 6) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
- 7) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
- 8) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
- 9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 10) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 11) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 13) Dinas Perhubungan
- 14) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
15. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19. Dinas Pertanian
20. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
21. Satuan Polisi Pamong Praja
22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
24. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27. RSUD Ratu Zaleha

7

## Tahapan Pelaksanaan

### 1. METODE Kuantitatif

- **Persiapan**
- **Pengumpulan Data**
  - Sesuai ketentuan Permenpan No. 20 Tahun 2018
- **Pengolahan dan Analisis Data**

### 2. METODE Kualitatif

- **Focus Group Discussion 1 & 2**

8

## Rekapitulasi Dimensi dan Sub Dimensi

No	Dimensi	Sub-Dimensi	Jumlah Pertanyaan	Bobot	Hasil Kali
1	Struktur Organisasi	Kompleksitas	18	1.39	25.0
2		Formalisasi Struktur	7	1.79	12.5
3		Sentralisasi Struktur	11	1.14	12.5
4	Proses	Keselarsan	8	1.25	10.0
5		Tata Kelola dan Kepatuhan	7	1.43	10.0
6		Perbaikan dan Peningkatan Proses	4	2.50	10.0
7		Teknologi Informasi	5	2.00	10.0
8		Manajemen Resiko	6	1.67	10.0
			66		100.0

9

## Pengkategorian & Penyajian Hasil Evaluasi

### Perhitungan Nilai Akhir (Total), Peringkat Organisasi, dan Interpretasi

PERINGKAT	INTERPRETASI
Peringkat Komposit 5 (P-5) Skor 81-100	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif.
Peringkat Komposit 4 (P-4) Skor 61-80	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif.
Peringkat Komposit 3 (P-3) Skor 41-60	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif
Peringkat Komposit 2 (P-2) Skor 21-40	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong kurang baik
Peringkat Komposit 1 (P-1) Skor 0-20	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong tidak baik.

10



11

**HASIL ANALISA DATA  
KUANTITATIF (1/3)  
Dimensi Struktur**

No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
	<b>Bobot</b>	<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
1	Sekretariat Daerah	127.78	68.29	8.48
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	102.07	57.58	57.37
3	Inspektorat Daerah	103.60	61.72	61.13
4	Dinas Pendidikan	120.21	62.49	59.84
5	Dinas Kesehatan	110.92	59.37	61.63
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	106.81	60.24	62.62
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	108.70	57.81	58.65
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	105.37	60.10	62.10
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	105.37	55.80	61.63
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	106.13	61.98	59.64
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	103.18	59.37	62.80
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99.04	66.93	65.94
13	Dinas Perhubungan	118.92	63.83	58.08
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	98.60	59.37	61.77
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	79.91	54.96	61.04
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	102.68	62.24	59.97
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	108.08	57.53	59.17
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	104.73	59.37	61.81
19	Dinas Pertanian	95.72	54.20	59.49
20	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	101.26	57.98	58.76
21	Satuan Polisi Pamong Praja	105.31	60.15	60.63
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	104.10	56.50	57.32
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	99.64	54.68	60.30
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	99.14	59.76	59.56
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90.30	56.49	58.57
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	92.84	55.62	53.48
27	RSUD Ratu Zaleha	96.67	59.37	60.08

12



**HASIL ANALISA DATA  
Kuantitatif (2/3)  
Dimensi Proses**

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
	<b>Bobot</b>	10%	10%	10%	10%	10%
1	Sekretariat Daerah	59.41	59.98	48.75	55.41	54.00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	52.21	49.98	43.13	36.25	46.50
3	Inspektorat Daerah	55.80	55.61	47.58	49.58	46.81
4	Dinas Pendidikan	52.64	49.86	39.38	43.74	42.00
5	Dinas Kesehatan	58.44	58.42	47.27	54.84	51.64
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	189.54	52.07	44.72	49.10	48.22
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	187.48	53.59	46.18	48.28	43.75
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	54.97	54.39	47.10	53.53	49.62
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	52.22	52.12	44.38	49.37	40.56
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	53.07	52.48	40.83	50.80	50.17
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	53.81	54.08	47.53	49.85	47.09
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	62.17	58.54	48.13	43.51	56.88
13	Dinas Perhubungan	57.05	53.74	47.81	50.00	44.75
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	53.30	53.20	41.56	46.04	48.25
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	53.03	49.40	42.98	47.69	44.06
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	57.08	54.15	45.57	48.37	50.75
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	53.17	52.19	45.29	47.18	46.74
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	55.51	53.85	46.14	50.64	51.23
19	Dinas Pertanian	49.24	46.71	44.76	49.36	48.17
20	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	56.41	52.20	47.64	52.18	52.50
21	Satuan Polisi Pamong Praja	55.08	52.07	42.29	51.28	46.38
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53.98	52.48	41.56	47.15	46.08
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	51.24	48.73	40.83	47.64	43.46
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	53.25	53.63	45.03	49.34	48.42
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50.33	49.22	40.05	47.56	42.00
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.46	50.74	37.19	39.08	41.30
27	RSUD Ratu Zaleha	52.03	50.81	41.81	50.55	49.78

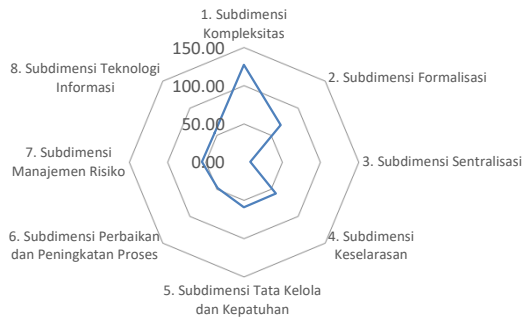
13

**HASIL ANALISA DATA  
Kuantitatif (3/3)  
Nilai Komposit &  
Kriteria**

No	Nama OPD	Total	Nilai Komposit	Kategori
		100%		
	<b>Bobot</b>	<b>100%</b>	<b>69.30</b>	
1	Sekretariat Daerah	482.10	69.30	Efektif
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	445.09	62.69	Efektif
3	Inspektorat Daerah	481.84	66.79	Efektif
4	Dinas Pendidikan	470.15	68.11	Efektif
5	Dinas Kesehatan	502.52	69.91	Efektif
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	613.32	80.42	Sangat Efektif
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	604.43	79.66	Efektif
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	487.17	67.58	Efektif
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	420.88	60.83	Efektif
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	475.09	66.47	Efektif
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	477.71	66.30	Efektif
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	501.12	68.29	Efektif
13	Dinas Perhubungan	494.18	70.30	Efektif
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	462.10	64.03	Efektif
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	433.07	58.19	Cukup Efektif
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	480.81	66.54	Efektif
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	469.35	66.06	Efektif
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	483.26	67.06	Efektif
19	Dinas Pertanian	447.67	61.97	Efektif
20	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	478.92	66.00	Efektif
21	Satuan Polisi Pamong Praja	473.19	66.14	Efektif
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	473.19	64.38	Efektif
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	446.53	62.47	Efektif
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	468.13	64.67	Efektif
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	434.51	59.87	Cukup Efektif
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	419.71	58.62	Cukup Efektif
27	RSUD Ratu Zaleha	461.11	63.60	Efektif

14

## 1. Evaluasi Lembaga Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar



No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
	<b>Bobot</b>	<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
1	Sekretariat Daerah	127.78	68.29	8.48

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
	<b>Bobot</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
1	Sekretariat Daerah	59.41	59.98	48.75	55.41	54.00

No	Nama OPD	Total	Nilai	Kategori
	<b>Bobot</b>	<b>100%</b>	<b>Komposit</b>	
1	Sekretariat Daerah	482.10	69.30	Efektif

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub dimensi kompleksitas yang terkait dengan desain, tingkatan dan nomenklatur organisasi
  - Sub dimensi sentralisasi yang terkait dengan wewenang pengambilan keputusan dan penanganan permasalahan lintas bidang.
  - Sub dimensi Manajemen Risiko mengindikasikan bahwa organisasi belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan manajemen risiko.
  - Sub dimensi Teknologi Informasi mengindikasikan bahwa seluruh informasi publik belum dipublikasikan secara periodik di dalam website organisasi.

\* \* \* \* \*

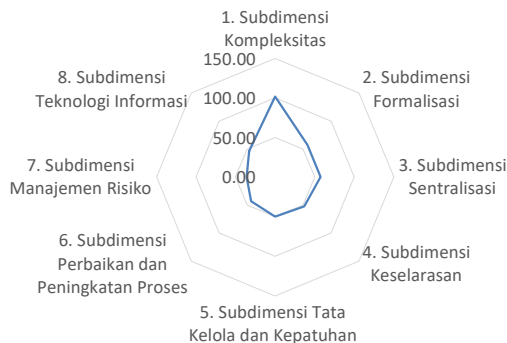
15

## 1. Rekomendasi OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar

- Desain organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tingkatan unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan tugas dan fungsinya dari tingkatan unit organisasi paling atas sampai tingkatan unit organisasi paling bawah
- Nomenklatur unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsinya.
- Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi..
- Organisasi agar sepenuhnya melaksanakan kebijakan manajemen risiko.
- Seluruh informasi publik terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi agar dipublikasikan secara periodik di dalam website organisasi.

16

## 2. Evaluasi Lembaga Sekretariat Daerah DPRD Kabupaten Banjar



No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
	<b>Bobot</b>	<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
2	Sekretariat Daerah DPRD	102.07	57.58	57.37

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
	<b>Bobot</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
2	Sekretariat Daerah DPRD	52.21	49.98	43.13	36.25	46.50

No	Nama OPD	Total	Nilai	Kategori
	<b>Bobot</b>	<b>100%</b>	<b>Komposit</b>	
2	Sekretariat Daerah DPRD	445.09	62.69	Efektif

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub dimensi kompleksitas mengindikasikan bahwa desain organisasi yang ada bersifat kompleks, adanya masalah di tingkatan unit organisasi, nomenklatur dan jenjang jabatan
  - Sub dimensi formalisasi yang terkait dengan tugas, fungsi unit organisasi dan mekanisme hubungan antar unit organisasi
  - Sub dimensi sentralisasi yang terkait dengan wewenang pengambilan keputusan
  - Sub dimensi Manajemen Resiko mengindikasikan bahwa organisasi belum memiliki sistem monitoring risiko yang memadai.
  - Sub dimensi Teknologi Informasi mengindikasikan bahwa Organisasi belum memiliki kebijakan IT (e-government) yang memadai.

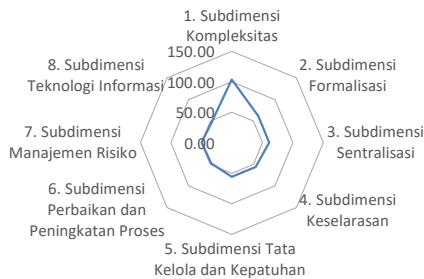
17

## 2. Rekomendasi OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar

- Desain organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tingkatan unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan tugas dan fungsinya dari tingkatan unit organisasi paling atas sampai tingkatan unit organisasi paling bawah
- Instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- Nomenklatur unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsinya.
- Menyesuaikan jenjang jabatan dengan kebutuhan
- Mekanisme hubungan antar unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.
- Organisasi agar mendisain sistem manajemen resiko yang memadai untuk kepentingan organisasi.
- Organisasi harus segera memiliki kebijakan IT (e-government) yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

18

### 3. Evaluasi Lembaga Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar



No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
	<b>Bobot</b>	<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
3	Inspektorat Daerah	103.60	61.72	61.13

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
	<b>Bobot</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
3	Inspektorat Daerah	55.80	55.61	47.58	49.58	46.81

No	Nama OPD	Total	Nilai	Kategori
	<b>Bobot</b>	<b>100%</b>	<b>Komposit</b>	
3	Inspektorat Daerah	481.84	66.79	Efektif

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub dimensi kompleksitas mengindikasikan bahwa desain organisasi dan tingkatan organisasi perlu ada penyesuaian, Penataan perangkat daerah belum ditetapkan sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan jabatan fungsional yang ada belum memenuhi kebutuhan
  - Sub dimensi sentralisasi yang terkait dengan wewenang pengambilan keputusan dan permasalahan lintas bidang
  - Sub dimensi Teknologi Informasi mengindikasikan bahwa Organisasi belum memiliki rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi dan kebijakan IT (e-government) yang memadai.

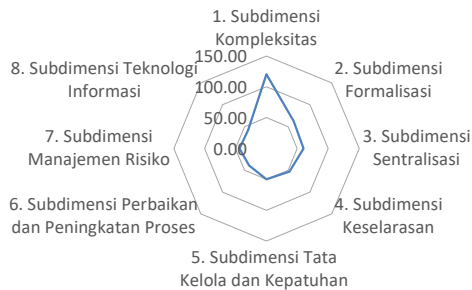
19

### 3. Rekomendasi OPD Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar

- Desain organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tingkatan unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan tugas dan fungsinya dari tingkatan unit organisasi paling atas sampai tingkatan unit organisasi paling bawah
- Penataan perangkat daerah perlu disesuaikan dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
- Menyesuaikan jabatan fungsional dengan kebutuhan
- Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
- Penyelesaian Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral agar dituangkan dalam suatu Keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.
- Organisasi harus segera memiliki kebijakan IT (e-government) yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

20

#### 4. Evaluasi Lembaga Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar



No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
	<b>Bobot</b>	<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
4	Dinas Pendidikan	120.21	62.49	59.84

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Ketaatan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
	<b>Bobot</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
4	Dinas Pendidikan	52.64	49.86	39.38	43.74	42.00

No	Nama OPD	Total	Nilai	Kategori
	<b>Bobot</b>	<b>100%</b>	<b>Komposit</b>	
4	Dinas Pendidikan	470.15	68.11	Efektif

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub dimensi kompleksitas mengindikasikan bahwa Penataan perangkat daerah belum ditetapkan sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan jenjang jabatan fungsional yang ada belum memenuhi kebutuhan
  - Sub dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses terkait dengan Perbaikan Standar operasional prosedur
  - Sub dimensi Teknologi Informasi terkait kebijakan IT (e-government) yang memadai.

21

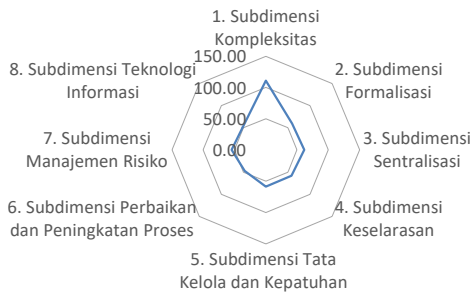
#### 4. Rekomendasi OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar

- Penataan perangkat daerah harus ditetapkan sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
- Jenjang jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan
- Perbaikan Standar operasional prosedur harus dilakukan secara periodic
- Organisasi harus memiliki kebijakan IT (e-government) yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

22



### 5. Evaluasi Lembaga Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar



No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
	<b>Bobot</b>	<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
5	Dinas Kesehatan	110.92	59.37	61.63

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
	<b>Bobot</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
5	Dinas Kesehatan	58.44	58.42	47.27	54.84	51.64

No	Nama OPD	Total	Nilai	Kategori
	<b>Bobot</b>	<b>100%</b>	<b>Komposit</b>	
5	Dinas Kesehatan	502.52	69.91	Efektif

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub dimensi kompleksitas terkait dengan penyederhanaan desain organisasi dan tingkat unit organisasi, dan kesesuaian Jenjang jabatan dan jabatan fungsional yang ada dengan kebutuhan.
  - Sub dimensi Formalisasi terkait Tugas dan fungsi unit organisasi dan Mekanisme hubungan antar unit organisasi.
  - Sub dimensi Keselarasan terkait dengan Keterkaitan proses kerja antar unit kerja di dalam organisasi
  - Sub dimensi tata kelola dan Kepatuhan, terkait dengan penyesuaian SOTK dan adanya indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi, baik pada tingkatan manajemen tertinggi sampai dengan manajemen menengah ke bawah.
  - Sub Dimensi Teknologi Informasi terkait dengan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi, kebijakan IT (e-government) yang memadai dan publikasi seluruh informasi publik terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi

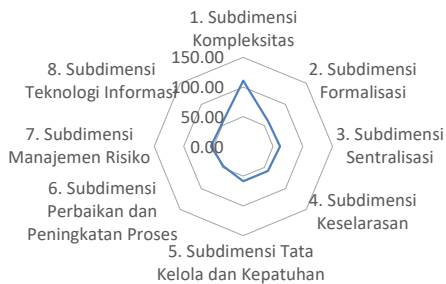
23

### 5. Rekomendasi OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar

- Desain organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan
- Tugas dan fungsi unit organisasi serta mekanisme hubungan antar unit organisasi perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.
- Penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi, proses dan tahapan kerja dari tingkatan manajemen tertinggi sampai tingkatan menengah ke bawah dengan peraturan perundangan.
- Meniadakan intervensi yang ada di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi, baik pada tingkatan manajemen tertinggi sampai dengan manajemen menengah ke bawah.
- Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi dan kebijakan IT (e-government) yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
- Seluruh informasi publik terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi agar dipublikasikan secara periodik di dalam website organisasi.

24

6. Evaluasi Lembaga Dinas Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang dan Pertanahan  
Kabupaten Banjar



No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
	<b>Bobot</b>	<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	106.81	60.24	62.62

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
	<b>Bobot</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	189.54	52.07	44.72	49.10	48.22

No	Nama OPD	Total	Nilai	Kategori
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	613.32	80.42	Sangat Efektif

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P5 (Sangat Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

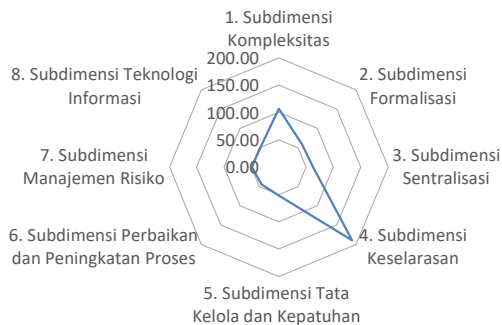
25

## 6. Rekomendasi OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Banjar

- Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi dan kebijakan IT (e-government) yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
- Seluruh informasi publik terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi agar dipublikasikan secara periodik di dalam website organisasi.

26

## 7. Evaluasi Lembaga Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar



- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub dimensi kompleksitas terkait dengan penyesuaian Desain organisasi dan tingkatan unit organisasi, Penataan perangkat daerah yang sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan, penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
  - Sub dimensi formalisasi terkait dengan Mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan setiap unit kerja, Proses kerja yang dituangkan dalam SOP dan formalisasi Standarisasi pelayanan publik.
  - Sub dimensi perbaikan dan peningkatan proses yang terkait dengan pengembangan terhadap sistem proses kerja, dan orientasi organisasi yang lebih berorientasi pada hal-hal yang bersifat rutinitas dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat strategis.
  - Sub Dimensi Manajemen risiko yang terkait dengan kebijakan manajemen risiko di dalam organisasi,
  - Sub Dimensi Teknologi Informasi yang terkait dengan kebijakan IT dan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi.

No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
	<b>Bobot</b>	<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	108.70	57.81	58.65

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
	<b>Bobot</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	54.97	54.39	47.10	53.53	49.62

No	Nama OPD	Total	Nilai	Kategori
	<b>Bobot</b>	<b>100%</b>	<b>Komposit</b>	
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	604.43	79.66	Efektif

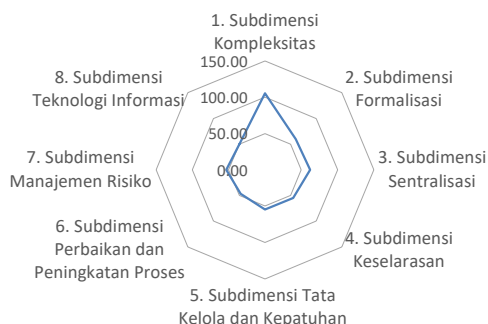
27

## 7. Rekomendasi OPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Banjar

- Desain organisasi dan tingkatan unit organisasi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perlu adanya penetapan tentang Penataan perangkat daerah yang sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan
- Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
- Mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan setiap unit kerja, dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah perlu dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
- Seluruh proses kerja agar dituangkan secara sistematis di dalam peraturan tentang standar operasional prosedur.
- Perlu adanya formalisasi Standarisasi pelayanan publik.
- Perlu adanya pengembangan terhadap sistem proses kerja,
- Organisasi agar lebih berorientasi pada hal-hal yang bersifat strategis dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat rutinitas
- Perlu adanya kebijakan tentang manajemen risiko dan sistem monitoringnya risiko yang memadai di dalam organisasi
- Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi dan kebijakan IT (e-government) yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

28

## 8. Evaluasi Lembaga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Banjar



- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub dimensi kompleksitas terkait dengan penyediaan Desain organisasi dan tingkatan unit organisasi, adanya indikasi bahwa desain organisasi yang ada saat ini kompleks Penataan perangkat daerah yang sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan, penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan dan permasalahan lintas bidang.
  - Sub Dimensi Keselarasan yang terkait dengan Koordinasi antar unit kerja, Keterkaitan proses kerja lintas bidang dan Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang.
  - Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait dengan adanya indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi.
  - Sub dimensi Manajemen Risiko terkait dengan kebijakan manajemen risiko
  - Sub Dimensi Teknologi Informasi terkait dengan kebijakan IT dan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi

No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
	<b>Bobot</b>	<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	105.37	60.10	62.10

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
	<b>Bobot</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54.97	54.39	47.10	53.53	49.62

No	Nama OPD	Total	Nilai	Kategori
	<b>Bobot</b>	<b>100%</b>	<b>Komposit</b>	
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	487.17	67.58	Efektif

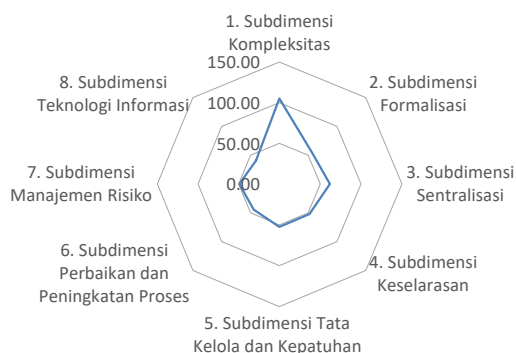
29

## 8. Rekomendasi OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Banjar

- Penyesuaian Desain organisasi dan tingkatan unit organisasi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perlu adanya penetapan tentang Penataan perangkat daerah yang sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan
- Perlu dilakukan penyederhanaan desain organisasi
- Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
- Mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan setiap unit kerja, dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah perlu dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
- Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
- Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral agar dituangkan dalam suatu Keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.
- Menghilangkan intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
- Perlu adanya kebijakan tentang manajemen risiko dan sistem monitoringnya risiko yang memadai di dalam organisasi
- Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi dan kebijakan IT (e-government) yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

30

## 9. Evaluasi Lembaga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar



No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
	<b>Bobot</b>	<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	105.37	55.80	61.63

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
	<b>Bobot</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	52.22	52.12	44.38	49.37	40.56

No	Nama OPD	Total	Nilai Komposit	Kategori
	<b>Bobot</b>	<b>100%</b>		
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	420.88	60.83	Efektif

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub dimensi kompleksitas terkait dengan penyesuaian Desain organisasi dan tingkatan unit organisasi, nomenklatur unit organisasi dan Penataan perangkat daerah yang sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan, penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan perumusan tugas & fungsi organisasi, mekanisme pelaksanaan tugas & fungsi, mekanisme hubungan antar unit organisasi, SOP dan formalisasi standar pelayanan publik
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan
  - Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait dengan penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi .
  - Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses, yang terkait dengan pembaharuan Standar operasional prosedur
  - Sub dimensi Manajemen Risiko terkait dengan kebijakan manajemen risiko dan sistem monitoring risiko
  - Sub Dimensi Teknologi Informasi terkait dengan kebijakan IT dan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi

31

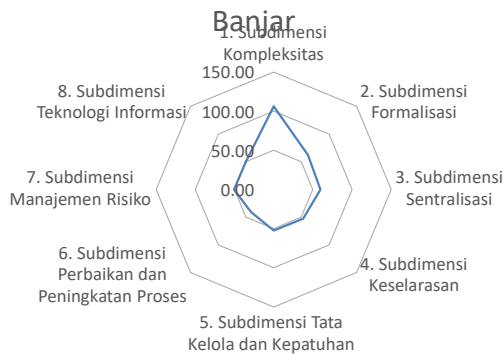
## 9. Rekomendasi OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar

- Desain organisasi, tingkatan unit organisasi dan nomenklatur unit organisasi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perlu adanya penetapan tentang Penataan perangkat daerah yang sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan
- Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
- Perlu ada penetapan tugas & fungsi organisasi, mekanisme pelaksanaan tugas & fungsi, mekanisme hubungan antar unit organisasi, SOP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan public agar diformalkan
- Mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan setiap unit kerja, dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah perlu dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
- Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
- Penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi, proses dan tahapan kerja dari tingkatan manajemen tertinggi sampai tingkatan menengah ke bawah dengan peraturan perundangan.
- Perlu adanya pembaharuan Standar operasional prosedur yang dilakukan secara periodik
- Perlu adanya kebijakan tentang manajemen risiko dan sistem monitoring risiko yang memadai di dalam organisasi
- Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

32



## 10. Evaluasi Lembaga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar



No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
	<b>Bobot</b>	<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	106.13	61.98	59.64

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
	<b>Bobot</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	53.07	52.48	40.83	50.80	50.17

No	Nama OPD	Total	Nilai Komposit	Kategori
	<b>Bobot</b>	<b>100%</b>		
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	475.09	66.47	Efektif

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub dimensi kompleksitas terkait dengan tingkatan unit organisasi dan penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan perumusan tugas & fungsi organisasi dan mekanisme hubungan antar unit organisasi
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan antar lintas bidang
  - Sub Dimensi keselarasan yang terkait dengan keterkaitan proses kerja dengan jabatan-jabatan di dalam organisasi dan Koordinasi kerja antar unit, lintas bidang atau sektoral
  - Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait dengan pertanggung jawaban setiap proses kerja dan adanya indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi.
  - Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses, yang terkait dengan pengembangan terhadap sistem proses kerja
  - Sub dimensi Manajemen Risiko terkait dengan kebijakan manajemen risiko.
  - Sub Dimensi Teknologi Informasi terkait dengan kebijakan IT

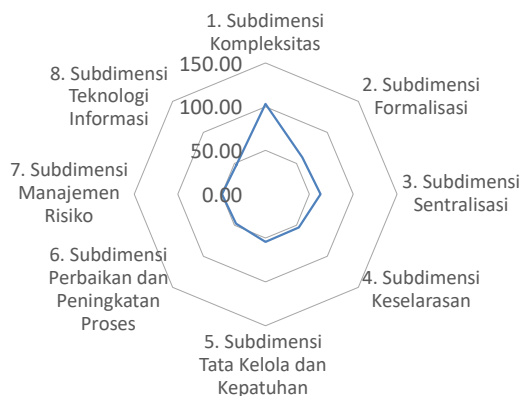
33

## 10. Rekomendasi OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Desa Kabupaten Banjar

- Tingkatan unit organisasi dan jenjang jabatan perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
- Perlu ada penetapan tugas & fungsi organisasi, mekanisme pelaksanaan tugas & fungsi, mekanisme hubungan antar unit organisasi, SOP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan public agar diformalkan
- Mekanisme kewenangan setiap unit kerja, dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah perlu dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
- Penyelesaian permasalahan antar lintas bidang yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
- Perlu adanya sistem dan mekanisme pertanggungjawaban setiap proses kerja (termasuk pelaporan) yang jelas.
- Menghilangkan intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
- Organisasi perlu melakukan pengembangan terhadap sistem proses kerja secara periodik
- Perlu adanya kebijakan tentang manajemen risiko dan sistem monitoring risiko yang memadai di dalam organisasi
- Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

34

### 11. Evaluasi Lembaga Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Banjar



No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
	<b>Bobot</b>	<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	103.18	59.37	62.80

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
	<b>Bobot</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	53.81	54.08	47.53	49.85	47.09

No	Nama OPD	Total	Nilai Komposit	Kategori
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	477.71	66.30	Efektif

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub dimensi kompleksitas terkait dengan penyesuaian disain organisasi, tingkatan unit organisasi, jenjang jabatan dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan perumusan tugas & fungsi organisasi dan mekanisme hubungan antar unit organisasi
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan
  - Sub Dimensi keselarasan yang terkait dengan Koordinasi kerja antar unit kerja organisasi
  - Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait dengan adanya indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi.
  - Sub dimensi Manajemen Risiko terkait dengan proses identifikasi risiko-risiko utama organisasi dan sistem monitoring pelaksanaan manajemen risiko.
  - Sub Dimensi Teknologi Informasi terkait dengan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi dan kebijakan IT

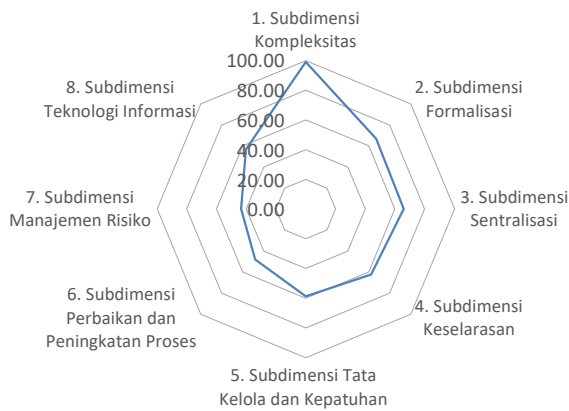
35

### 11. Rekomendasi OPD Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Banjar

- Disain organisasi dan Tingkatan unit organisasi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
- Perlu ada penetapan tugas & fungsi organisasi, dan mekanisme hubungan antar unit organisasi
- Mekanisme kewenangan setiap unit kerja, dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah perlu dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
- Koordinasi antar unit kerja agar dilakukan dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi
- Menghilangkan intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
- Organisasi perlu melakukan pengembangan terhadap sistem proses kerja secara periodik
- Perlu Tindakan dalam mengidentifikasi risiko-risiko utama organisasi
- Perlu adanya kebijakan tentang manajemen risiko dan sistem monitoring risiko yang memadai di dalam organisasi
- Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

36

## 12. Evaluasi Lembaga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar



No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
	<b>Bobot</b>	<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99.04	66.93	65.94

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
	<b>Bobot</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	62.17	58.54	48.13	43.51	56.88

No	Nama OPD	Total	Nilai Komposit	Kategori
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	501.12	68.29	Efektif

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub dimensi kompleksitas terkait dengan penyesuaian desain organisasi, tingkatan unit organisasi, dan penataan perangkat daerah yang sesuai dengan substansi pewadahan.
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan perumusan tugas & fungsi organisasi dan mekanisme hubungan antar unit organisasi
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan dan mekanisme penyelesaian permasalahan bersifat lintas bidang atau sektoral
  - Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait dengan adanya indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi.

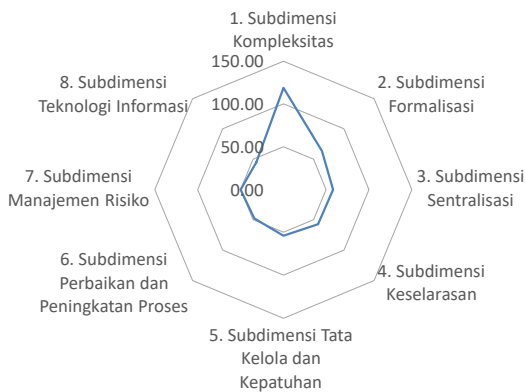
37

## 12. Rekomendasi OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar

- Desain organisasi dan Tingkatan unit organisasi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perlu adanya penetapan tentang Penataan perangkat daerah yang sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan
- Perlu ada penetapan tugas & fungsi organisasi, dan mekanisme hubungan antar unit organisasi
- Mekanisme kewenangan setiap unit kerja, dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah perlu dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
- Penyelesaian Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral agar dituangkan dalam suatu Keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.
- Menghilangkan intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi

38

### 13. Evaluasi Lembaga Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar



No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
	<b>Bobot</b>	<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
13	Dinas Perhubungan	118.92	63.83	58.08

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
	<b>Bobot</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
13	Dinas Perhubungan	57.05	53.74	47.81	50.00	44.75

No	Nama OPD	Total Bobot	Nilai Komposit	Kategori
13	Dinas Perhubungan	494.18	70.30	Efektif

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub dimensi kompleksitas terkait dengan penyesuaian desain organisasi, tingkatan unit organisasi, jenjang jabatan dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan, serta Penataan perangkat daerah yang sesuai dengan substansi pewadahan.
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan perumusan tugas & fungsi organisasi dan mekanisme hubungan antar unit organisasi
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan
  - Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses, yang terkait dengan pembaharuan Standar operasional prosedur
  - Sub Dimensi Teknologi Informasi terkait dengan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi dan kebijakan IT

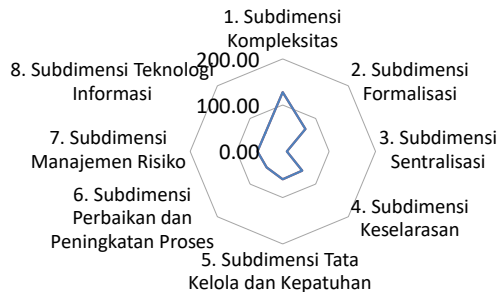
39

### 13. Rekomendasi OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar

- Desain organisasi dan Tingkatan unit organisasi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perlu adanya penetapan tentang Penataan perangkat daerah yang sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan
- Perlu ada penetapan tugas & fungsi organisasi, dan mekanisme hubungan antar unit organisasi
- Mekanisme kewenangan setiap unit kerja, dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah perlu dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
- Perlu adanya pembaharuan Standar operasional prosedur yang dilakukan secara periodik
- Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

40

## 14. Evaluasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar



No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
	<b>Bobot</b>	<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	98.60	59.37	61.77

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
	<b>Bobot</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	53.30	53.20	41.56	46.04	48.25

No	Nama OPD	Total	Nilai Komposit	Kategori
	<b>Bobot</b>	<b>100%</b>		
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	462.10	64.03	Efektif

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian desain organisasi, tingkatan unit organisasi, jenjang jabatan dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan perumusan tugas & fungsi organisasi dan mekanisme hubungan antar unit organisasi
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan
  - Sub Dimensi Keselarasan yang terkait dengan dokumentasi keterkaitan proses kerja antar unit kerja yang terkait di dalam organisasi
  - Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait dengan adanya indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi.
  - Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses, yang terkait dengan pembaharuan Standar operasional prosedur
  - Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait dengan kebijakan manajemen risiko yang memadai, pengukuran risiko-risiko utama organisasi dan sistem monitoring manajemen risiko

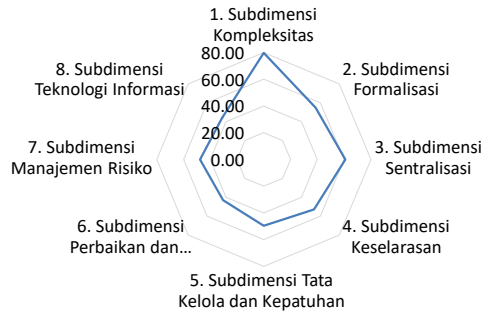
41

## 14. Rekomendasi OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar

- Disain organisasi dan Tingkatan unit organisasi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
- Perlu ada penetapan tugas & fungsi organisasi, dan mekanisme hubungan antar unit organisasi
- Mekanisme kewenangan setiap unit kerja, dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah perlu dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
- Mekanisme hubungan antar unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.
- Menghilangkan intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
- Organisasi perlu melakukan pembaharuan terhadap SOP secara periodik
- Perlu tindakan dalam mengidentifikasi risiko-risiko utama organisasi
- Perlu adanya kebijakan tentang manajemen risiko dan sistem monitoring risiko yang memadai di dalam organisasi

42

### 15. Evaluasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar



No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
<b>Bobot</b>		<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	79.91	54.96	61.04

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
<b>Bobot</b>		<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	53.03	49.40	42.98	47.69	44.06

No	Nama OPD	Total	Nilai	Kategori
			Komposit	
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	433.07	58.19	Cukup Efektif

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P3 (Cukup Efektif). Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai cukup mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan cukup mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi memiliki berbagai kelemahan yang dapat menyebabkan peringkatnya menurun apabila organisasi tidak segera melakukan tindakan korektif secara sistematis. Perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan adalah dalam hal :
  - Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian desain organisasi, tingkatan unit organisasi, nomenklatur unit organisasi, jenjang jabatan, dan jumlah jabatan
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja, Mekanisme hubungan antar unit organisasi dan kebijakan-kebijakan organisasi
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan, Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral
  - Sub Dimensi Keselarasan yang terkait dengan Koordinasi antar unit kerja, Keterkaitan proses kerja antar unit kerja yang terkait di dalam organisasi dan Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang atau sektoral
  - Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait dengan SOTK, proses dan tahapan kerja, dan adanya indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
  - Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait dengan kebijakan manajemen risiko yang memadai, identifikasi dan pengukuran risiko-risiko utama organisasi serta sistem monitoring manajemen risiko di dalam organisasi
  - Sub Dimensi Teknologi Informasi terkait dengan dengan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi dan kebijakan IT

43

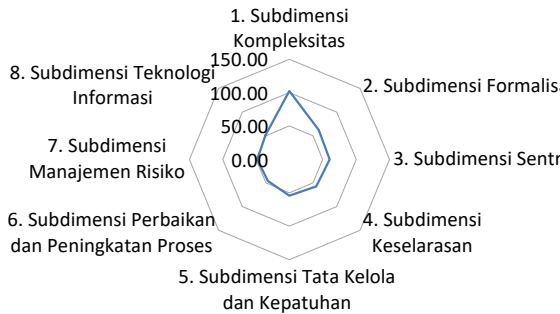
### 15. Rekomendasi OPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar

- Desain organisasi, tingkatan unit organisasi dan nomenklatur unit organisasi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
- Perlu ada penetapan tentang mekanisme pelaksanaan tugas & fungsi, mekanisme hubungan antar unit organisasi, SOP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan setiap unit kerja, dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah perlu dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
- Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
- Penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi, proses dan tahapan kerja dari tingkatan manajemen tertinggi sampai tingkatan menengah ke bawah dengan peraturan perundangan.
- Perlu adanya kebijakan tentang manajemen risiko, identifikasi dan pengukuran risiko-risiko utama organisasi serta sistem monitoring risiko yang memadai di dalam organisasi
- Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi dan kebijakan IT yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

44



## 16. Evaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar



No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
	<b>Bobot</b>	<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	102.68	62.24	59.97

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
	<b>Bobot</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	57.08	54.15	45.57	48.37	50.75

No	Nama OPD	Total	Nilai Komposit	Kategori
	<b>Bobot</b>	<b>100%</b>	<b>66.54</b>	<b>Efektif</b>
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	480.81	66.54	Efektif

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian desain organisasi, tingkatan unit organisasi, nomenklatur unit organisasi, jenjang jabatan, dan jumlah jabatan
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja, Mekanisme hubungan antar unit organisasi dan kebijakan-kebijakan organisasi
  - Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait dengan adanya indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
  - Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko di dalam organisasi
  - Sub Dimensi Teknologi Informasi terkait dengan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi

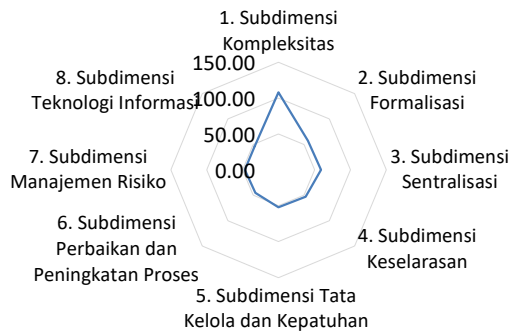
45

## 16. Rekomendasi OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar

- Desain organisasi, tingkatan unit organisasi dan nomenklatur unit organisasi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
- Perlu ada penetapan tentang mekanisme pelaksanaan tugas & fungsi, mekanisme hubungan antar unit organisasi, SOP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan setiap unit kerja, dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah perlu dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
- Menghilangkan intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
- Organisasi perlu melaksanakan kebijakan manajemen risiko
- Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi

46

### 17. Evaluasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar



No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
	<b>Bobot</b>	<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	108.08	57.53	59.17

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
	<b>Bobot</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	53.17	52.19	45.29	47.18	46.74

No	Nama OPD	Total	Nilai Komposit	Kategori
	<b>Bobot</b>	<b>100%</b>		
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	469.35	66.06	Efektif

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian desain organisasi, tingkatan unit organisasi, nomenklatur unit organisasi, jenjang jabatan, dan jumlah jabatan
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi, formalisasi standar pelayanan publik
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan, Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral
  - Sub Dimensi Keselarasan yang terkait dengan Koordinasi antar unit kerja, Keterkaitan proses kerja antar unit kerja yang terkait di dalam organisasi dan Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang atau sektoral
  - Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait dengan SOTK, proses dan tahapan kerja, dan adanya indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
  - Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses yang terkait dengan pengembangan terhadap sistem proses kerja
  - Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait dengan kebijakan manajemen risiko yang memadai, identifikasi dan pengukuran risiko-risiko utama organisasi serta sistem monitoring manajemen risiko di dalam organisasi
  - Sub Dimensi Teknologi Informasi terkait dengan dengan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi dan kebijakan IT

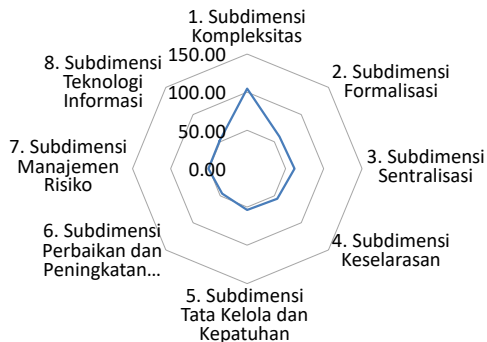
47

### 17. Rekomendasi OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar

- Desain organisasi, tingkatan unit organisasi dan nomenklatur unit organisasi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
- Perlu ada penetapan tentang mekanisme pelaksanaan tugas & fungsi
- Standar Pelayanan publik perlu diformalkan
- Mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan setiap unit kerja, dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah perlu dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
- Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
- Penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi, proses dan tahapan kerja dari tingkatan manajemen tertinggi sampai tingkatan menengah ke bawah dengan peraturan perundangan.
- Menghilangkan intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
- Organisasi perlu melaksanakan kebijakan manajemen risiko,
- Melakukan identifikasi dan mengukur risiko-risiko utama organisasi
- Menetapkan sistem monitoring manajemen risiko di dalam organisasi
- Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi dan kebijakan IT yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

48

## 18. Evaluasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar



- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian desain organisasi, tingkatan unit organisasi, nomenklatur unit organisasi, jenjang jabatan, dan jumlah jabatan
  - Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait adanya indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
  - Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses yang terkait dengan pengembangan terhadap sistem proses kerja
  - Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko di dalam organisasi dan belum adanya sistem monitoring manajemen risiko

No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
	<b>Bobot</b>	<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	104.73	59.37	61.81

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
	<b>Bobot</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	55.51	53.85	46.14	50.64	51.23

No	Nama OPD	Total	Nilai	Kategori
	<b>Bobot</b>	<b>100%</b>	<b>Komposit</b>	
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	483.26	67.06	Efektif

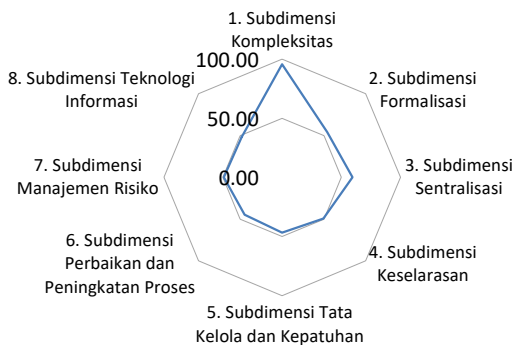
49

## 18. Rekomendasi OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar

- Desain organisasi, tingkatan unit organisasi dan nomenklatur unit organisasi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menghilangkan intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
- Organisasi agar selalu melakukan pengembangan terhadap sistem proses kerja.
- Organisasi perlu melaksanakan kebijakan manajemen risiko
- Menerapkan sistem monitoring manajemen risiko di dalam organisasi

50

## 19. Evaluasi Dinas Pertanian Kabupaten Banjar



No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
	<b>Bobot</b>	<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
19	Dinas Pertanian	95.72	54.20	59.49

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
	<b>Bobot</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
19	Dinas Pertanian	49.24	46.71	44.76	49.36	48.17

No	Nama OPD	Total	Nilai	Kategori
	<b>Bobot</b>	<b>100%</b>	<b>Komposit</b>	
19	Dinas Pertanian	447.67	61.97	Efektif

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian desain organisasi, tingkatan organisasi, Instansi vertikal/kantor regional/UPT, adanya indikasi bahwa desain organisasi yang ada saat ini kompleks, jenjang jabatan, dan jumlah jabatan
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan Tugas dan fungsi unit organisasi, Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi, Rencana strategis dan kebijakan-kebijakan organisasi
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan dan Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral
  - Sub Dimensi Keselarasan yang terkait dengan Koordinasi antar unit kerja dan koordinasi organisasi lintas bidang atau sektoral yang tidak terlaksana dengan baik
  - Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait dengan penyesuaian SOTK, dan adanya indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
  - Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses yang terkait dengan pembaharuan SOP
  - Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko di dalam organisasi dan sistem monitoring manajemen risiko
  - Sub Dimensi Teknologi Informasi terkait dengan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi dan kebijakan IT (eGovernment) yang memadai

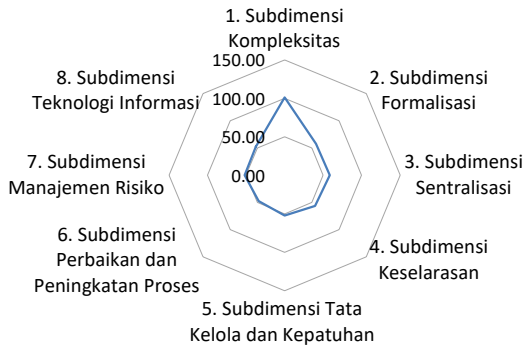
51

## 19. Rekomendasi OPD Dinas Pertanian Kabupaten Banjar

- Desain organisasi, tingkatan unit organisasi dan Instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Jumlah instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang dibentuk menunjukkan indikasi tidak mencukupi kebutuhan minimum yang diperlukan sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Perlu dilakukan penyederhanaan desain organisasi
- Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
- Tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja
- Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
- Rencana strategis dan kebijakan organisasi agar dituangkan secara jelas di dalam keputusan resmi organisasi
- Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
- Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral agar dituangkan dalam Keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.
- Penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi, proses dan tahapan kerja dari tingkatan manajemen tertinggi sampai tingkatan menengah ke bawah dengan peraturan perundang-undangan.
- Menghilangkan intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
- Organisasi perlu melaksanakan kebijakan manajemen risiko,
- Menerapkan sistem monitoring manajemen risiko di dalam organisasi
- Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi dan kebijakan IT (eGovernment) yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

52

## 20. Evaluasi Lembaga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar



No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
	<b>Bobot</b>	<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
20	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	101.26	57.98	58.76

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
	<b>Bobot</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
20	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	56.41	52.20	47.64	52.18	52.50

No	Nama OPD	Total	Nilai Komposit	Kategori
20	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	478.92	66.00	Efektif

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian disain organisasi, tingkatan organisasi, Instansi vertikal/kantor regional/UPT, adanya indikasi bahwa desain organisasi yang ada saat ini kompleks, jenjang jabatan, dan jumlah jabatan
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan Tugas dan fungsi unit organisasi, Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi, Rencana strategis dan kebijakan-kebijakan organisasi
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan dan Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral
  - Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait adanya indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
  - Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait sistim monitoring manajemen risiko

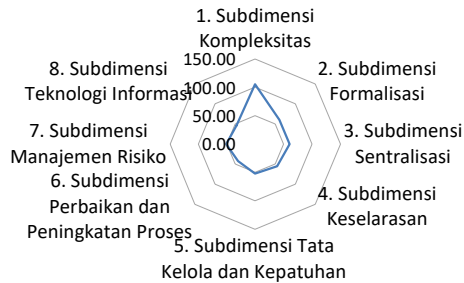
53

## 20. Rekomendasi OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar

- Desain organisasi, tingkatan unit organisasi dan Instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Jumlah instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang dibentuk menunjukkan indikasi tidak mencukupi kebutuhan minimum yang diperlukan sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Perlu dilakukan penyederhanaan disain organisasi
- Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
- Tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja
- Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
- Rencana strategis dan kebijakan organisasi agar dituangkan secara jelas di dalam keputusan resmi organisasi
- Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
- Menghilangkan intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
- Menerapkan sistim monitoring manajemen risiko di dalam organisasi

54

## 21. Evaluasi Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar



No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
	<b>Bobot</b>	<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
21	Satuan Polisi Pamong Praja	105.31	60.15	60.63

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
	<b>Bobot</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
21	Satuan Polisi Pamong Praja	55.08	52.07	42.29	51.28	46.38

No	Nama OPD	Total	Nilai Komposit	Kategori

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian desain organisasi, tingkatan organisasi, Instansi vertikal/kantor regional/UPT, adanya indikasi bahwa desain organisasi yang ada saat ini kompleks, jenjang jabatan, dan jumlah jabatan
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan Tugas dan fungsi unit organisasi, Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi, dan Proses Kerja
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan dan Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral
  - Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait adanya penyesuaian SOTK, dan adanya indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
  - Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses yang terkait dengan pembaharuan SOP
  - Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait dengan kebijakan manajemen risiko yang memadai, identifikasi dan pengukuran risiko-risiko utama organisasi serta sistem monitoring manajemen risiko di dalam organisasi
  - Sub Dimensi Teknologi Informasi terkait dengan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi dan kebijakan IT (eGovernment) yang memadai

55

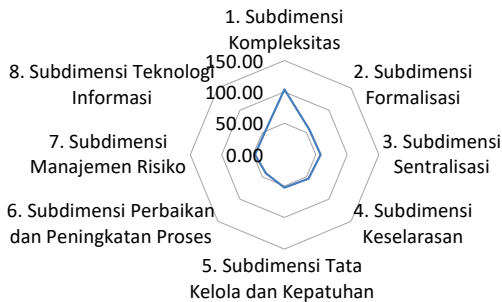
## 21. Rekomendasi OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar

- Desain organisasi, tingkatan unit organisasi dan Instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Jumlah instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang dibentuk menunjukkan indikasi tidak mencukupi kebutuhan minimum yang diperlukan sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Perlu dilakukan penyederhanaan desain organisasi
- Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
- Tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja
- Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
- Rencana strategis dan kebijakan organisasi agar dituangkan secara jelas di dalam keputusan resmi organisasi
- Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
- Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral agar dituangkan dalam Keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.
- Penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi, proses dan tahapan kerja dari tingkatan manajemen tertinggi sampai tingkatan menengah ke bawah dengan peraturan perundangan.
- Menghilangkan intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
- Organisasi perlu melaksanakan kebijakan manajemen risiko
- Melakukan identifikasi dan mengukur risiko-risiko utama organisasi
- Menerapkan sistem monitoring manajemen risiko di dalam organisasi
- Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi dan kebijakan IT (eGovernment) yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

56



## 22. Evaluasi Lembaga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar



No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
	<b>Bobot</b>	<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	104.10	56.50	57.32

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
	<b>Bobot</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53.98	52.48	41.56	47.15	46.08

No	Nama OPD	Total	Nilai Komposit	Kategori
	<b>Bobot</b>	<b>100%</b>		
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	473.19	64.38	Efektif

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian desain organisasi, tingkatan organisasi, jenjang jabatan, dan jumlah jabatan
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan Tugas dan fungsi unit organisasi, Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi, dan Proses Kerja
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan dan Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral
  - Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses yang terkait dengan pembaharuan SOP dan pengembangan proses kerja
  - Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait dengan kebijakan manajemen risiko yang memadai, identifikasi dan pengukuran risiko-risiko utama organisasi, pelaksanaan manajemen risiko serta sistem monitoring manajemen risiko di dalam organisasi

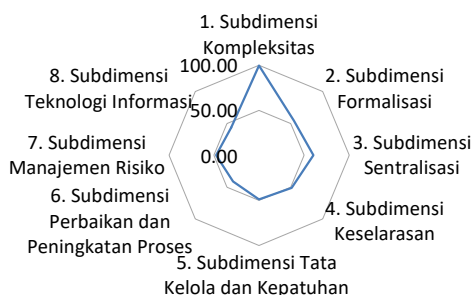
57

## 22. Rekomendasi OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar

- Desain organisasi, tingkatan unit organisasi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
- Tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja
- Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
- Seluruh proses kerja agar dituangkan secara sistematis di dalam peraturan tentang standar operasional prosedur.
- Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
- Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral agar dituangkan dalam Keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.
- Standar operasional prosedur agar selalu diperbarui secara periodik dan Organisasi selalu melakukan pengembangan terhadap sistem proses kerja
- Organisasi membuat dan melaksanakan kebijakan manajemen risiko
- Melakukan identifikasi dan mengukur risiko-risiko utama organisasi
- Menerapkan sistem monitoring manajemen risiko di dalam organisasi

58

### 23. Evaluasi Lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar



No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
	<b>Bobot</b>	<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	99.64	54.68	60.30

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
	<b>Bobot</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	51.24	48.73	40.83	47.64	43.46

No	Nama OPD	Total	Nilai Komposit	Kategori
	<b>Bobot</b>	<b>100%</b>		
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	446.53	62.47	Efektif

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian desain organisasi, tingkatan organisasi, nomenklatur organisasi, adanya indikasi desain organisasi bersifat kompleks, jenjang jabatan, dan jumlah jabatan yang belum sesuai kebutuhan
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan Tugas dan fungsi unit organisasi, Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi, Rencana Strategis dan Proses Kerja
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan dan Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral
  - Sub Dimensi Keselarasan yang terkait dengan Koordinasi antar unit kerja, Keterkaitan proses kerja lintas bidang atau sektoral dan Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang atau sektoral
  - Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan yang terkait dengan kesesuaian tahapan pekerjaan yang terdapat di dalam proses kerja padaa tingkatan manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah dan kejelasan fungsi, struktur, dan penanggung jawab pekerjaan (akuntabilitas).
  - Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses yang terkait dengan pembaharuan SOP dan pengembangan proses kerja
  - Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait dengan kebijakan manajemen risiko yang memadai, identifikasi dan pengukuran risiko-risiko utama organisasi, serta sistim monitoring manajemen risiko di dalam organisasi
  - Sub Dimensi Teknologi Informasi terkait dengan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi dan kebijakan IT (eGovernment) yang memadai

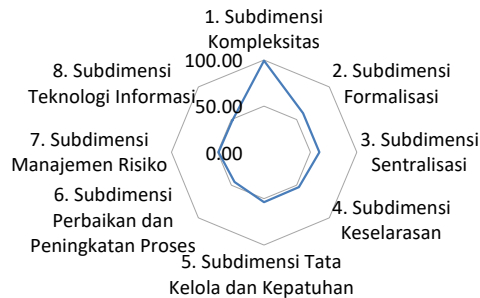
59

### 23. Rekomendasi OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar

- Desain organisasi, tingkatan unit organisasi dan Instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perlu dilakukan penyederhanaan desain organisasi
- Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
- Tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja
- Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
- Rencana strategis dan kebijakan organisasi agar dituangkan secara jelas di dalam keputusan resmi organisasi
- Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
- Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral agar dituangkan dalam Keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.
- Koordinasi antar unit kerja, Keterkaitan proses kerja lintas bidang atau sektoral dan Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang atau sektoral agar dapat diatur dan dilaksanakan dengan baik.
- Menyesuaikan dan memperjelas tahapan pekerjaan yang terdapat di dalam proses kerja padaa tingkatan manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah dan kejelasan fungsi, struktur, dan penanggung jawab pekerjaan (akuntabilitas).
- Organisasi perlu melakukan pembaharuan terhadap SOP mengembangkan proses kerja secara periodik
- Menerapkan sistim monitoring manajemen risiko di dalam organisasi, melakukan identifikasi dan pengukuran risiko-risiko utama organisasi, serta menjalankan sistim monitoring manajemen risiko di dalam organisasi
- Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi dan kebijakan IT (eGovernment) yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

60

## 24. Evaluasi Lembaga Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar



No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
	<b>Bobot</b>	<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	99.14	59.76	59.56

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
	<b>Bobot</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	53.25	53.63	45.03	49.34	48.42

No	Nama OPD	Total	Nilai Komposit	Kategori
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	468.13	64.67	Efektif

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian desain organisasi, tingkatan organisasi, nomenklatur organisasi, dan adanya indikasi desain organisasi bersifat kompleks
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan Tugas dan fungsi unit organisasi, Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi, dan Mekanisme hubungan antar unit organisasi
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan dan Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral
  - Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses yang terkait dengan pembaharuan SOP dan pengembangan proses kerja
  - Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait dengan kebijakan manajemen risiko yang memadai, identifikasi dan pengukuran risiko-risiko utama organisasi, serta sistem monitoring manajemen risiko di dalam organisasi

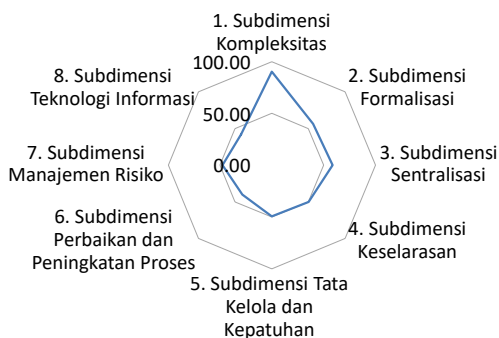
61

## 24. Rekomendasi OPD Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

- Desain organisasi, tingkatan unit organisasi dan Nomenklatur organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perlu dilakukan penyederhanaan desain organisasi
- Tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja
- Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
- Mekanisme hubungan antar unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.
- Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
- Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral agar dituangkan dalam Keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.
- Organisasi perlu melakukan pembaharuan terhadap SOP mengembangkan proses kerja secara periodik
- Menerapkan sistem monitoring manajemen risiko di dalam organisasi, melakukan identifikasi dan pengukuran risiko-risiko utama organisasi, serta menjalankan sistem monitoring manajemen risiko di dalam organisasi

62

## 25. Evaluasi Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar



- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P3 (Cukup Efektif). Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai cukup mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan cukup mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi memiliki berbagai kelemahan yang dapat menyebabkan peringkatnya menurun apabila organisasi tidak segera melakukan tindakan korektif secara sistematis. Perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan adalah dalam hal :
  - Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian disain organisasi, tingkatan unit organisasi, nomenklatur unit organisasi, jenjang jabatan, dan jumlah jabatan
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja, Mekanisme hubungan antar unit organisasi dan kebijakan-kebijakan organisasi dan proses kerja
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan, Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral
  - Sub Dimensi Keselarasan yang terkait dengan Koordinasi antar unit kerja, Keterkaitan proses kerja antar unit kerja yang terkait di dalam organisasi dan Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang atau sektoral
  - Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait dengan SOTK, proses kerja yang terkait dengan kebutuhan informasi publik dan tidak bersifat rahasia
  - Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses yang terkait dengan pengembangan proses kerja
  - Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait dengan kebijakan manajemen risiko yang memadai, identifikasi dan pengukuran risiko-risiko utama organisasi serta sistem monitoring manajemen risiko di dalam organisasi
  - Sub Dimensi Teknologi Informasi terkait dengan dengan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi dan kebijakan IT (eGovernment) Yang Memadai

No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
	<b>Bobot</b>	<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90.30	56.49	58.57

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
	<b>Bobot</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50.33	49.22	40.05	47.56	42.00

No	Nama OPD	Total	Nilai	Kategori
	<b>Bobot</b>	<b>100%</b>	<b>Komposit</b>	
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	434.51	59.87	Cukup Efektif

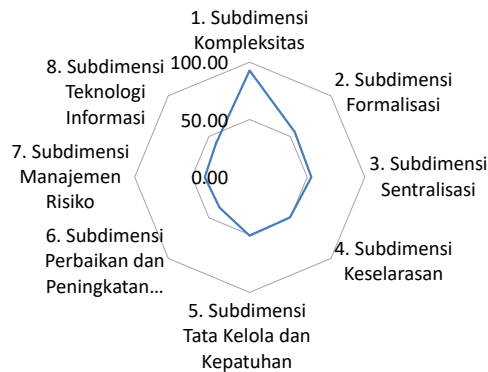
63

## 25. Rekomendasi OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar

- Desain organisasi, tingkatan unit organisasi dan Instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
- Tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja
- Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
- Mekanisme hubungan antar unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.
- Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
- Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral agar dituangkan dalam Keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.
- Koordinasi antar unit kerja, Keterkaitan proses kerja lintas bidang atau sektoral dan Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang atau sektoral agar dapat diatur dan dilaksanakan dengan baik.
- Penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi, proses dan tahapan kerja dari tingkatan manajemen tertinggi sampai tingkatan menengah ke bawah dengan peraturan perundangan.
- Organisasi perlu mengembangkan proses kerja secara periodik
- Membuat kebijakan terkait manajemen risiko, Menerapkan sistem monitoring manajemen risiko di dalam organisasi, melakukan identifikasi dan pengukuran risiko-risiko utama organisasi.
- Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi dan kebijakan IT (eGovernment) yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

64

## 26. Evaluasi Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar



- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P3 (Cukup Efektif). Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai cukup mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan cukup mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi memiliki berbagai kelemahan yang dapat menyebabkan peringkatnya menurun apabila organisasi tidak segera melakukan tindakan korektif secara sistematis. Perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan adalah dalam hal :
  - Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan Penataan perangkat daerah telah ditetapkan sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan
  - Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait dengan Pelaksanaan manajemen resiko di dalam organisasi, kebijakan manajemen risiko yang memadai, identifikasi dan pengukuran risiko-risiko utama organisasi serta sistim monitoring manajemen risiko di dalam organisasi

No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
	<b>Bobot</b>	<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	92.84	55.62	53.48

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
	<b>Bobot</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.46	50.74	37.19	39.08	41.30

No	Nama OPD	Total Bobot	Nilai Komposit	Kategori
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	419.71	58.62	Cukup Efektif

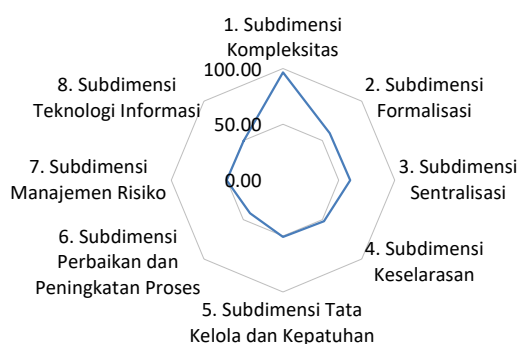
65

## 26. Rekomendasi OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar

- Perlu ada Penataan perangkat daerah telah ditetapkan sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- Tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja
- Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
- Mekanisme hubungan antar unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.
- Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
- Membuat kebijakan terkait manajemen risiko, Menerapkan sistim monitoring manajemen risiko di dalam organisasi, melakukan identifikasi dan pengukuran risiko-risiko utama organisasi.

66

## 27. Evaluasi Lembaga RSUD Ratu Zaleha Kabupaten Banjar



No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		1. Subdimensi Kompleksitas	2. Subdimensi Formalisasi	3. Subdimensi Sentralisasi
	<b>Bobot</b>	<b>25%</b>	<b>12.5%</b>	<b>12.5%</b>
27	RSUD Ratu Zaleha	96.67	59.37	60.08

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		1. Subdimensi Keselarasan	2. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan	3. Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	4. Subdimensi Manajemen Risiko	5. Subdimensi Teknologi Informasi
	<b>Bobot</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
27	RSUD Ratu Zaleha	52.03	50.81	41.81	50.55	49.78

No	Nama OPD	Total	Nilai Komposit	Kategori
	<b>Bobot</b>	<b>100%</b>		
27	RSUD Ratu Zaleha	461.11	63.60	Efektif

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian desain organisasi, tingkatan organisasi, Instansi vertikal/kantor regional/UPT, adanya indikasi bahwa desain organisasi yang ada saat ini kompleks, jenjang jabatan, dan jumlah jabatan
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan Tugas dan fungsi unit organisasi, Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi, Rencana strategis dan kebijakan-kebijakan organisasi
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan dan Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral
  - Sub Dimensi Keselarasan yang terkait dengan Koordinasi antar unit kerja dan koordinasi organisasi lintas bidang atau sektoral yang tidak terlaksana dengan baik
  - Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait adanya penyesuaian SOTK, dan adanya indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
  - Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses yang terkait dengan pembaharuan SOP
  - Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko di dalam organisasi dan sistem monitoring manajemen risiko
  - Sub Dimensi Teknologi Informasi terkait dengan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi dan kebijakan IT (eGovernment) yang memadai

67

## 27. Rekomendasi OPD RSUD Ratu Zaleha Kabupaten Banjar

- Desain organisasi, tingkatan unit organisasi dan Instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Jumlah instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang dibentuk menunjukkan indikasi tidak mencukupi kebutuhan minimum yang diperlukan sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
- Tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja
- Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
- Rencana strategis dan kebijakan organisasi agar dituangkan secara jelas di dalam keputusan resmi organisasi
- Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
- Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral agar dituangkan dalam Keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.
- Penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi, proses dan tahapan kerja dari tingkatan manajemen tertinggi sampai tingkatan menengah ke bawah dengan peraturan perundangan.
- Menghilangkan intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
- Organisasi perlu melaksanakan kebijakan manajemen risiko,
- Menerapkan sistem monitoring manajemen risiko di dalam organisasi
- Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi dan kebijakan IT (eGovernment) yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

68





69



70

## HASIL KUALITATIF (2/3)

71

## HASIL KUALITATIF (3/3)

72



73

## Tahapan Pelaksanaan (3/7)

✓ Cara Perhitungan:

### Struktur Bobot Penilaian

Dimensi	Bobot dari Nilai Dimensi	Bobot dari Nilai Total Keseluruhan
Struktur Organisasi (50%)	Kompleksitas Struktur (50%)	Kompleksitas Struktur (25%)
	Formalisasi Struktur (25%)	Formalisasi Struktur (12,5%)
	Sentralisasi Struktur (25%)	Sentralisasi Struktur (12,5%)

Proses Organisasi (50%)	Keselerasan (Alignment) (20%)	Keselerasan (Alignment) (10%)
	Tata Kelola (Governance) dan Kepatuhan (Compliance) (20%)	Tata Kelola (Governance) dan Kepatuhan (Compliance) (10%)
	Perbaikan dan Peningkatan Proses (20%)	Perbaikan dan Peningkatan Proses (10%)
	Teknologi Informasi (20%)	Teknologi Informasi (10%)
	Manajemen risiko (20%)	Manajemen risiko (10%)

74

## Tahapan Pelaksanaan (4/7)

✓ Cara Perhitungan:

### Konversi Nilai Dimensi Komplexitas

PERNYATAAN	STS	TS	S	SS	Bobot
Jawaban Nomor 1 s.d 18	1	2	3	4	25% dibagi 18 = 1,389
Nilai Masing-Masing Pernyataan	1,389	1,042	0,694	0,347	
Jumlah Nilai Setiap Pernyataan	...	...	...	...	.....

### Konversi Nilai Dimensi Formalisasi Struktur

PERNYATAAN	STS	TS	S	SS	Bobot
Jawaban Nomor 1 s.d. 7	1	2	3	4	12.5% dibagi 7 = 1,786
Nilai Masing-Masing Pernyataan	0,446	0,893	1,339	1,786	
Jumlah Nilai Setiap Pernyataan	....	....	....	....	.....

75

## Tahapan Pelaksanaan (5/7)

✓ Cara Perhitungan:

### Konversi Nilai Dimensi Sentralisasi Struktur

PERNYATAAN	STS	TS	S	SS	Bobot
Jawaban Nomor 1 s.d. 11	1	2	3	4	12,5% dibagi 11=1.136
Nilai Masing-Masing Pernyataan	0,284	0,568	0,852	1,136	
Jumlah Nilai Setiap Pernyataan					

### Konversi Nilai Dimensi Keselarasan

PERNYATAAN	STS	TS	S	SS	Bobot
Jawaban Nomor 1 s.d. 8	1	2	3	4	10% dibagi 8=1,250
Nilai Masing-Masing Pernyataan	0,313	0,625	0,938	1,250	
Jumlah Nilai Setiap Pernyataan					

76

## Tahapan Pelaksanaan (6/7)

✓ Cara Perhitungan:

### Konversi Nilai Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses

PERNYATAAN	STS	TS	S	SS	Bobot
Jawaban Nomor 1 s.d. 4	1	2	3	4	10% dibagi 4=2,500
Nilai Masing-Masing Pernyataan	0,625	1,25	1,875	2,500	
Jumlah Nilai Setiap Pernyataan					

### Konversi Nilai Dimensi Teknologi Informasi

PERNYATAAN	STS	TS	S	SS	Bobot
Jawaban Nomor 1 s.d. 5	1	2	3	4	10% dibagi 5= 2
Nilai Masing-Masing Pernyataan	0,5	1	1,5	2	
Jumlah Nilai Setiap Pernyataan					

77

## Tahapan Pelaksanaan (7/7)

✓ Cara Perhitungan:

### Konversi Nilai Dimensi Manajemen Risiko

PERNYATAAN	STS	TS	S	SS	Bobot
Jawaban Nomor 1 s.d. 6	1	2	3	4	10% dibagi 6=1,667
Nilai Masing-Masing Pernyataan	0,417	0,833	1,250	1,667	
Jumlah Nilai Setiap Pernyataan					

### Konversi Tata Kelola dan Kepatuhan

PERNYATAAN	STS	TS	S	SS	Bobot
Jawaban Nomor 1 s.d. 7	1	2	3	4	10% dibagi 6=1,428
Nilai Masing-Masing Pernyataan	0,357	0,714	1,071	1,429	
Jumlah Nilai Setiap Pernyataan					

78

## Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan



### PERSIAPAN

- Pertemuan pendahuluan dengan Bappeda Litbang Kab. Banjar pada tanggal 20 Juni 2023, membicarakan tema kajian, metode dan konsep pelaksanaan.



### FGD KE-1

- Penyampaian proposal, perumusan tujuan, responden dan metode kajian yang dilaksanakan di aula Bappeda Litbang pada tanggal 17 Juli 2023.



79

## Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan



### PENYEBARAN KUESIONER

Pelaksanaan Survey berupa penyebaran kuesioner dan pengumpulan hasil tanggapan, yang dilaksanakan ke 27 OPD di Kabupaten Banjar sebagai responden kajian mulai bulan Agustus hingga September 2023.



### FGD KE-2

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD), berupa penyampaian hasil kajian pendahuluan, yang dilaksanakan di aula Bappeda Litbang pada tanggal 26 September 2023.



80



## Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan



### LAPORAN ANTARA

Penyampaian laporan antara pada tanggal 26 September 2023, bertempat di aula Bappeda Litbang Kab. Banjar



**LAPORAN HASIL  
KAJIAN EVALUASI KELEMBAGAAN**



**ANALISIS EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BANJAR**

**TIM PELAKSANA:**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Dr. Nurul Listiyani,SH, MH (Ketua)       | NIDN : 1102127301 |
| 2. Dr. Achmad Jaelani, S.Pt, M.Si (Anggota) | NIDN : 0007016701 |
| 3. Ir. Irfan, S.T, M.T (Anggota)            | NIDN : 1127127301 |
| 4. Rizka Zulfikar, STp, MM (Anggota)        | NIDN : 1106127301 |

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI  
BANJARMASIN  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN HASIL**

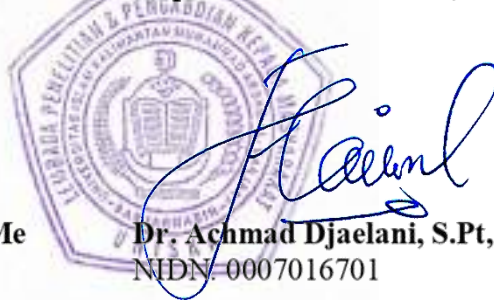
- 1. Judul Penelitian** : Analisis Efektivitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Banjar
- 2. Bidang Ilmu** : Sosial Ekonomi
- 3. Ketua TimPengusul**
- a. Nama Lengkap : Dr. Nurul Listyani, SH, MH, C. Me  
b. NIDN : 1102127301  
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
d. Program Studi : Ilmu Hukum  
e. Telpn : 082350534466  
f. Email : nurullistiyani5@gmail.com
- Anggota Peneliti (1)**
- a. Nama Lengkap : Dr. Achmad Jaelani, SPt, MSi  
b. NIDN : 0007016701  
c. Program Studi : Pertanian
- Anggota Peneliti (2)**
- a. Nama Lengkap : Irfan, S.T., M.T  
b. NIDN : 1117127301  
c. Program Studi : Teknik Elektro
- Anggota Peneliti (3)**
- a. Nama Lengkap : Rizka Zulfikar, STp, MM  
b. NIDN : 1106127301  
c. Program Studi : Manajemen
- 3. Biaya Penelitian** : Rp 89.725.000,-
- 4. Sumber Dana** : APBD Kabupaten Banjar Tahun 2023

Banjarmasin, Nopember 2023  
Ketua Tim Pengusul



**Dr. Nurul Listyani, SH, MH, C.Me**  
NIDN. 110206127301

Menyetujui,  
Kepala LP2M-UNISKA,



**Dr. Achmad Djaelani, S.Pt, MSi**  
NIDN. 0007016701

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya kami diberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian sebagai wujud kepedulian kami untuk terlibat aktif dalam upaya memberikan masukan dalam kajian efektivitas kelembagaan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Banjar dalam bentuk penelitian.

Kami selaku tim pengusul dan bagian dari civitas akademika UNISKA terus berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui tugas penelitian yang diberikan oleh Lembaga Penelitian dan Kepada Masyarakat (LP2M) UNISKA, dan salah satunya adalah melaksanakan amanah dari Pemerintah Kabupaten Banjar untuk melakukan kajian Analisis Efektivitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Banjar.

Kepada seluruh Tim Pengusul yang telah berdedikasi dan bekerja dengan sungguh-sungguh dalam pelaksanaan penelitian ini, dan pihak Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai pihak yang memfasilitasi kegiatan penelitian yang kami laksanakan serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini, kami ucapkan terima kasih dan setinggi-tingginya.

Semoga hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah Kab. Kab. Banjar dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka efektivitas kelembagaan organisasi perangkat daerah di kabupaten banjar.

Banjarmasin, Nopember 2023  
Hormat Kami,

Tim Pelaksana Kajian

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Kajian	1
1.4. Manfaat Kajian	2
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>3</b>
2.1. Organisasi/Kelembagaan	3
2.2. Struktur Organisasi	4
2.3. Dimensi Struktur Organisasi (Permenpan No. 20 Tahun 2018)	5
2.4 Dimensi Proses Organisasi (Permenpan No. 20 Tahun 2018)	7
<b>BAB 3. METODE KAJIAN</b>	<b>9</b>
3.1. Jenis Kajian	9
3.2. Waktu	9
3.3. Populasi dan Sampel	9
3.4. Pengolahan dan Analisis Data	10
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>17</b>
4.1. Hasil Analisis Kuantitatif	17
4.2. Hasil Analisis Kualitatif	71
<b>BAB 5. KESIMPULAN</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Daftar OPD dan Jumlah Responden	9
Tabel 2. Skala Pemberian Skor	11
Tabel 3. Struktur Bobot Penilaian	12
Tabel 4. Nilai Subdimensi Kompleksitas	12
Tabel 5. Nilai Subdimensi Formalisasi Struktur	13
Tabel 6. Nilai Subdimensi Sentralisasi Struktur	13
Tabel 7. Nilai Subdimensi Keselarasan	13
Tabel 8. Nilai Subdimensi Tata Kelola ( <i>Governance</i> ) dan Kepatuhan ( <i>Compliance</i> )	13
Tabel 9. Nilai Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses	14
Tabel 10. Nilai Subdimensi Teknologi Informasi	14
Tabel 11. Nilai Subdimensi Manajemen Risiko	14
Tabel 12. Perhitungan Nilai Akhir (Total), Peringkat Organisasi, dan Interpretasi	14
Tabel 13. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Skor Dimensi Struktur 27 OPD Kabupaten Banjar.	17
Tabel 14. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Skor Dimensi Proses 27 OPD Kabupaten Banjar.	18
Tabel 15. Nilai Komposit dan Kriteria Evaluasi Kelembagaan 27 OPD Kabupaten Banjar	20
Tabel 16. Hasil Rekapitulasi Kendala Berdasarkan Sub Dimensi 27 OPD Kabupaten Banjar	21



## DAFTAR GAMBAR

		<b>Halaman</b>
Gambar 1.	Ilustrasi Grafik Radar Masing-masing Subdimensi	16
Gambar 2.	Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar	23
Gambar 3.	Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banjar	24
Gambar 4.	Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar	26
Gambar 5.	Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar	27
Gambar 6.	Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar	28
Gambar 7.	Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar	30
Gambar 8.	Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar	31
Gambar 9.	Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar	33
Gambar 10.	Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar	35
Gambar 11.	Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar	37
Gambar 12.	Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar	39
Gambar 13.	Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar	41
Gambar 14.	Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar	42
Gambar 15.	Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	44
Gambar 16.	Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	46

Gambar 17.	Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar	48
Gambar 18.	Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Banjar	49
Gambar 19.	Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar	51
Gambar 20.	Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar	52
Gambar 21.	Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar	54
Gambar 22.	Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar	56
Gambar 23.	Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar	58
Gambar 24.	Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar	60
Gambar 25.	Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar	62
Gambar 26.	Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar	64
Gambar 27.	Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar	66
Gambar 28.	Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar	68

## DAFTAR LAMPIRAN

		<b>Halaman</b>
Lampiran 1.	Susunan Organisasi Tim Peneliti/Pelaksana dan Pembagian Tugas	L-1
Lampiran 2.	Identitas Tim Pelaksana Kajian	L-3
Lampiran 3.	Penawaran Kerjasama dan Kerangka Acuan Kerja	L-4
Lampiran 4.	Surat Kesediaan Kerjasama	L-9
Lampiran 5.	Surat Keputusan UNISKA UNISKA MAB Banjarmasin	L-10
Lampiran 6.	Surat Tugas Tim Kajian	L-13
Lampiran 7.	Kontrak Swakelola Penelitian Evaluasi Kelembagaan	L-14
Lampiran 8.	Permintaan Data Serta Survey terkait Penelitian Evaluasi	L-17
Lampiran 9.	Kuesioner Evaluasi Kelembagaan	L-19
Lampiran 10.	Dokumentasi Kegiatan	L-27

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Reformasi birokrasi pada tataran pemerintahan daerah umumnya dilakukan dalam bentuk restrukturisasi atau penataan kembali organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Pada Tahun 2021 sesuai PERBUP No. 56 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar resmi dirampingkan yang awalnya 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi 27 OPD. Melalui penataan kelembagaan OPD ini, diharapkan agar dapat tercipta suatu tatanan kerja yang lebih teratur, serta memperjelas pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah. Sehingga untuk mengetahui efektivitas kebijakan restrukturisasi perangkat daerah di Kabupaten Banjar, maka dilakukan sebuah kajian untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai kondisi Kelembagaan Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Banjar.

Hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah dasar dalam penentuan kebijakan pemerintah daerah lebih lanjut terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja yang sudah ada, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan penataan kembali SOTK perangkat daerah di Kabupaten Banjar yang efektif dan efisien

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dilaksanakan adalah Bagaimanakah efektivitas lembaga perangkat daerah di Kabupaten Banjar setelah adanya perampingan SOTK sesuai Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2021?

### **1.3. Tujuan Kajian**

Adapun tujuan kajian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi lembaga perangkat daerah di Kabupaten Banjar setelah adanya perampingan SOTK sesuai Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2021.

#### **1.4. Manfaat Kajian**

Hasil kajian yang akan dilakukan ini nantinya diharapkan dapat:

- a) Menjadi bahan masukan bagi para pejabat pengambil keputusan dalam rangka menata kelembagaan perangkat daerah, yang dapat menciptakan suatu tatanan kerja yang lebih teratur, serta memperjelas pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah di Kabupaten Banjar.
- b) Menjadi informasi dan referensi daerah lain dalam mengkaji tingkat efektivitas dan efisiensi OPD.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Organisasi / Kelembagaan

Organisasi dapat dipahami sebagai suatu sistem interaksi dinamis dari beberapa aspek pokok yang terdapat didalamnya. Beberapa aspek pokok organisasi antara lain subjek atau pelaku, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai. Secara umum, terminologi organisasi dapat diidentikkan dengan terminologi lembaga.

Kelembagaan diartikan dalam literatur bahasa Inggris sebagai bureaucracy atau diserap dalam bahasa Indonesia sebagai birokrasi. Max Weber mendefinisikan kelembagaan sebagai suatu bentuk organisasi yang ditandai oleh hierarki, spesialisasi peranan, dan tingkat kompetensi yang tinggi yang ditunjukkan oleh para pejabat yang terlatih untuk mengisi peran-peran tersebut secara lebih detail, Max Weber mencirikan kelembagaan sebagai (Thaha, 2009):

- Kewenangan yang berjenjang sesuai dengan tindakan organisasi;
- Spesialisasi tugas, kewajiban dan tanggungjawab;
- Posisi didesain sebagai jabatan;
- Penggantian dalam jabatan secara terencana;
- Jabatan bersifat impersonal;
- Suatu sistem aturan dan prosedur yang standar untuk menegakkan disiplin dan pengendaliannya;
- Kualifikasi yang rinci mengenai individu
- yang akan memegang jabatan;
- Perlindungan terhadap individu dari pemecatan.

Uraian senada juga diutarakan Nugroho (Thaha, 2009) dimana kelembagaan memiliki ciri diantaranya: 1) Para anggotanya (staf) secara pribadi bebas, dan hanya melakukan tugas-tugas impersonal dari jabatan-jabatannya; 2) Terdapat hierarki jabatan yang jelas; 3) Fungsi-fungsi jabatan diperinci dengan jelas; 4) Para pejabat diangkat berdasarkan kontrak; 5) Penyeleksian atas dasar kualifikasi profesional yang secara ideal diperkuat dengan diploma yang diperoleh melalui ujian; 6) Anggotanya digaji dengan uang dan biasanya mempunyai hak-hak pensiun; 7) Pekerjaan pejabat adalah pekerjaannya yang satu-satunya; 8) Terdapat suatu struktur karier dan kenaikan pangkat adalah yang mungkin baik melalui senioritas ataupun prestasi dan sesuai dengan penilaian para atasan; 9) Pejabat tidak boleh mengambil kedudukannya sebagai miliknya pribadi begitu



pula sumber-sumber yang menyertai kedudukan itu, dan; 10) Pejabat tunduk kepada pengendalian yang dipersatukan dan kepada sistem disipliner.

Kaitannya dengan penataan kelembagaan/birokrasi, Fukuyama (LAN, 2013) menjabarkan dua prinsip dalam mendesain kelembagaan pemerintah yang ideal. Pertama, pemerintah harus memiliki kapasitas yang tinggi pada satu sisi dan pemerintah perlu memberikan diskresi yang besar kepada masyarakat dan swasta pada sisi lain. Kapasitas pemerintah sendiri dapat diukur dalam berbagai variabel, misalnya ukuran prosedural birokrasi pemerintah, ukuran-ukuran kapasitas (misalnya dalam menarik pajak, mengelola sumberdaya dan SDM di birokrasi) dan ukuran-ukuran hasil (output). Menurut Fukuyama, yang selama ini terjadi adalah banyak kapasitas pemerintah sangat rendah pada satu sisi dan pemerintah terlalu banyak membuat regulasi pada sisi yang lain sehingga membuat peran dan fungsi pemerintah berjalan tidak efektif. Yang kedua menurut Fukuyama (LAN, 2013) adalah pemerintah perlu mempertimbangkan kekuatan kelembagaan pada satu sisi dan jangkauan fungsi pemerintah pada sisi lain.

Sebagai contoh, pemerintah perlu membatasi jangkauannya apabila masyarakat dan kalangan swasta dapat mengambil peran dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, contoh lain pemerintah perlu memperkuat kelembagaannya dalam bentuk misalnya koordinasi antar sektor dan desentralisasi kewenangan agar kapasitas pemerintah (governability) dapat selalu ditingkatkan.

## **2.2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan aspek pokok organisasi yang sering dianalisis dan dibahas oleh banyak pihak. Secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dalam perspektif ini struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

Selain aspek struktur, proses yang terjadi di dalam organisasi juga merupakan aspek yang sangat penting dan sering menjadi perhatian di dalam analisis organisasi. Proses organisasi merupakan gambaran berlangsungnya seluruh aktivitas organisasi untuk menciptakan dan memelihara rantai nilai (*value chain*) dalam rangka mencapai tujuan utama secara dinamis. Dengan demikian, di dalam proses organisasi seluruh aktivitas dan interaksi elemen-elemen organisasi harus memiliki keselarasan (*alignment*) satu sama lain. Di samping itu agar kedudukan, peran, dan fungsi masing-masing elemen sesuai dengan yang diharapkan maka aspek tata kelola yang baik (*good governance*)

dan kesesuaian/kepatuhan (*compliance*) terhadap aturan yang disepakati harus diperhatikan.

Sebagai suatu rangkaian penciptaan nilai (*value chain*), proses organisasi harus efektif dan efisien. Dalam konteks ini prosedur/mekanisme dan metode kerja yang tepat memiliki peranan penting. Selain itu, berbagai hal negatif yang berisiko mengganggu efektivitas proses kerja harus dapat diidentifikasi dan dikendalikan agar proses organisasi dapat senantiasa menciptakan rantai nilai yang optimal. Dalam konteks tersebut, teknologi informasi (*information technology*) mempunyai peran penting dalam mempertahankan efektivitas dan efisiensi proses organisasi secara optimal.

Tanpa mengecilkan peranan beberapa elemen organisasi lainnya, struktur dan proses organisasi dapat dipandang sebagai dua aspek pokok organisasi yang perlu mendapat perhatian utama dan menjadi prioritas di dalam pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi instansi pemerintah.

Secara substansial dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara telah diamanatkan agar melakukan evaluasi paling kurang 3 (tiga) tahun sekali. Untuk itu, agar evaluasi organisasi dapat dilaksanakan secara optimal, telah disusun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67 Tahun 2011 sebagai pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan evaluasi terhadap kelembagaan instansi pemerintah.

### **2.3. Dimensi Struktur Organisasi (Permenpan No. 20 Tahun 2018)**

Dalam dimensi struktur organisasi terdapat 3 (tiga) sub dimensi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi.

1. Subdimensi Kompleksitas. Kompleksitas adalah banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja (*division of labor*). Pada umumnya organisasi pemerintah memiliki kompleksitas yang tinggi karena beragamnya tugas dan fungsi yang dijalankan. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas- tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik. Diferensiasi atau pemisahan tugas-tugas merujuk pada tiga hal, yaitu:
  - a. Diferensiasi Horizontal. Diferensiasi horizontal merupakan pemisahan tugas-tugas dalam struktur horizontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, keahlian dan sebagainya.

- b. Diferensiasi Vertikal. Diferensiasi vertikal merujuk pada tingkat hierarki organisasi. Semakin tinggi tingkat hierarki di dalam struktur organisasi, maka kompleksitasnya akan semakin tinggi dan potensi distorsi komunikasi dari manajemen tingkat tinggi hingga unit organisasi paling rendah akan semakin besar. Satu hal yang perlu diperhatikan dari diferensiasi ini adalah rentang kendali, yaitu seberapa banyak unit organisasi yang dapat dibentuk secara efektif oleh unit organisasi yang di atasnya. Semakin kompleks pekerjaan semakin kecil rentang kendali yang diperlukan dalam pengawasan. Dalam praktik penataan organisasi pemerintah, perlu memperhatikan dimensi diferensiasi vertikal ini.
  - c. Diferensiasi Spasial. Diferensiasi spasial merujuk pada tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis. Semakin jauh dan semakin banyak tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis, maka akan semakin tinggi kompleksitas organisasi tersebut. Diferensiasi Spasial merupakan pertimbangan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam penataan kelembagaan instansi pemerintah.
2. Sub dimensi Formalisasi. Formalisasi merupakan suatu kondisi dimana aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan. Formalisasi yang tinggi akan meningkatkan kompleksitas. Formalisasi merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi karena dengan standarisasi akan dicapai produk yang konsisten dan seragam serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi. Selain itu, formalisasi akan mempermudah koordinasi antar bagian/unit organisasi dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. Formalisasi di dalam restrukturisasi organisasi merupakan suatu proses penyeragaman melalui aturan-aturan, prosedur, instruksi dan komunikasi yang telah dibakukan.
  3. Subdimensi Sentralisasi. Sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (authority) dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi. Sentralisasi dapat diartikan sebagai tingkatan pengonsentrasian kekuasaan secara formal. Sentralisasi dapat menurunkan tingkat kompleksitas dan menyederhanakan struktur organisasi. Semakin sederhana struktur organisasi akan semakin gesit gerak dan perkembangannya. Sedangkan bagi organisasi yang strukturnya besar, sentralisasi dapat mengakibatkan organisasi tersebut bergerak lamban. Di sisi lain, bertolak belakang dari sentralisasi adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kepada unit organisasi tingkat

bawah yang berada dekat dengan masyarakat. Desentralisasi menciptakan banyak spesialisasi atau kekhususan.

#### **2.4. Dimensi Proses Organisasi (Permenpan No. 20 Tahun 2018)**

Dalam dimensi proses organisasi terdapat 5 (lima) subdimensi, yaitu keselarasan (*alignment*), tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*), perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Konsep kelima dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

1. Sub dimensi Keselarasan (Alignment). Keselarasan (*alignment*) antara strategi organisasi dengan visi, tujuan, dan misi organisasi. Strategi organisasi pada dasarnya merupakan pedoman di dalam mengimplementasikan proses organisasi. Di dalam strategi organisasi dirumuskan berbagai sasaran strategis organisasi dan proses organisasi dilaksanakan dan dikembangkan untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan tujuan pokok organisasi. Selain dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis organisasi, di dalam implementasinya proses organisasi juga harus memiliki keselarasan dengan struktur organisasi.
2. Sub dimensi Tata kelola (Governance) dan Kepatuhan (Compliance). Tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*) yang dimaksudkan untuk memastikan apakah seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah menem- pati kedudukan dan menjalankan peran sesuai dengan struktur yang disepakati dan berlaku di organisasi. Dalam perspektif ini seluruh pengambilan dan pelaksanaan keputusan organisasi telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelo- la (*governance*) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi (kemandirian), dan kewajaran (*fairness*).
3. Sub dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses. Dimensi proses harus menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Dalam perspektif ini proses organisasi umumnya berlaku efektif hanya dalam kurun waktu tertentu. Akibat perubahan lingkungan, proses organisasi dapat menjadi tidak relevan dan membutuhkan pembaharuan. Dalam kaitan ini, setiap organisasi dituntut untuk melakukan evaluasi dan inovasi secara berkelanjutan terhadap proses yang diterapkan. Melalui evaluasi dan inovasi metode kerja diharapkan proses organisasi dapat tetap relevan dan optimal untuk menciptakan rangkaian nilai (*value chain*) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

4. Sub dimensi Manajemen Risiko. Manajemen risiko adalah upaya untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas risiko dan diikuti oleh penerapan sumber daya yang terkoordinasi serta ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan probabilitas atau dampak kejadian yang tidak menguntungkan. Tujuan manajemen risiko adalah untuk memastikan ketidakpastian agar tidak menghalangi pencapaian tujuan organisasi.
5. Sub dimensi Teknologi Informasi. Kemajuan teknologi membawa peluang besar serta tantangan bagi semua bentuk organisasi tidak terkecuali organisasi pemerintah. Dalam skenario ekonomi global yang kompetitif saat ini, organisasi yang gagal maju secara teknologi berpotensi mengalami risiko tertinggal dibandingkan dengan organisasi lain dalam hal persaingan dan produktivitas. Oleh karena itu, saat ini seluruh organisasi pemerintah telah berupaya untuk mengadopsi teknologi di dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya teknologi informasi. Di dalam penggunaan teknologi informasi bagi organisasi pemerintah, agar implementasinya dapat berjalan dengan baik memerlukan adanya suatu perencanaan yang strategis mulai dari kebijakan pengaturan, integrasi, dan inter-operabilitas.

## BAB 3. METODE KAJIAN

### 3.1 Jenis Kajian

Kajian dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner. Instrumen kajian disusun sesuai pedoman pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 20 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Kelembagaan. Metode kualitatif dilakukan dengan menggunakan Focus Group Discussion (FGD) dengan peserta seluruh OPD yang menjadi objek kajian

### 3.2. Waktu

Waktu pelaksanaan mulai bulan Juni sampai dengan Nopember 2023.

### 3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam kajian ini adalah 27 OPD yang ada di Kabupaten Banjar. Sampel untuk OPD berupa 3 (tiga) tingkatan organisasi, yakni tingkatan tertinggi organisasi atau *organization wide level* dan dua tingkatan di bawah tingkatan tertinggi organisasi atau *suborganization wide level*. Daftar OPD Kabupaten Banjar yang menjadi objek evaluasi kelembagaan beserta jumlah responden masing-masing OPD adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Daftar OPD dan Jumlah Responden**

No	Nama OPD	Jumlah Responden
1	Sekretariat Daerah	8
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	7
3	Inspektorat Daerah	8
4	Dinas Pendidikan	20
5	Dinas Kesehatan	11
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	18
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	18
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	17
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	22
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12
13	Dinas Perhubungan	15



No	Nama OPD	Jumlah Responden
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	14
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	17
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	17
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11
19	Dinas Pertanian	24
20	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9
21	Satuan Polisi Pamong Praja	12
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	12
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	24
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10
27	RSUD Ratu Zaleha	9
	<b>TOTAL</b>	<b>378</b>

### 3.4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan berdasarkan instrumen kuesioner dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### a) Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara menilai isi kuesioner dengan pembobotan sesuai ketentuan Permenpan No. 20 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan. Selain itu, pengolahan data dilakukan dengan melakukan analisis terhadap jawaban dari pertanyaan terbuka sebagai pembanding dari hasil jawaban terhadap kuesioner yang dilakukan oleh Tim Verifikasi.

Dalam instrumen tersebut terdapat 66 (enam puluh enam) pertanyaan. Dimana dari 66 pertanyaan tersebut terbagi atas beberapa bagian yakni:

- 1) 36 Pertanyaan untuk mengukur dimensi struktur organisasi, terdiri dari:
  - Kompleksitas struktur, terdiri dari 18 pertanyaan.
  - Formalisasi struktur, terdiri dari 7 pertanyaan.
  - Sentralisasi struktur, terdiri dari 11 pertanyaan.
- 2) 30 Pertanyaan untuk mengukur dimensi proses organisasi, terdiri dari:
  - Keselarasan, terdiri dari 8 pertanyaan.
  - Tata kelola dan kepatuhan, terdiri dari 7 pertanyaan.
  - Perbaikan dan peningkatan proses, terdiri dari 4 pertanyaan.
  - Teknologi informasi, terdiri dari 5 pertanyaan.
  - Manajemen risiko, terdiri dari 6 pertanyaan.

**b) Cara Perhitungan**

Dalam daftar pertanyaan tersebut dipilih 4 (empat) opsi jawaban berdasarkan skala Likert dengan nilai (skor) dari 1 sampai 4. Penyusunan opsi jawaban menjadi empat pilihan dimaksudkan untuk menghindari jawaban yang mempunyai kecenderungan atau tendensi untuk menjawab di tengah atau netral.

Dengan demikian maka pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Skala Pemberian Skor**

Jawaban	Skor
STS : Sangat Tidak setuju	= 1
TS : Tidak Setuju	= 2
S : Setuju	= 3
SS : Sangat Setuju	= 4

Untuk menghitung nilai dari jawaban yang diperoleh maka ditetapkan besaran bobot untuk masing-masing dimensi yaitu:

- 1) Dimensi Struktur Organisasi, mempunyai bobot 50% (lima puluh persen), dengan rincian bobot masing-masing subdimensi sebagai berikut:
  - Dimensi Kompleksitas adalah 50% (lima puluh persen) dari 50% bobot Dimensi Struktur atau 25% (dua puluh lima persen) dari bobot Total keseluruhan skor.
  - Dimensi Formalisasi adalah 25% (dua puluh lima persen) dari 50% bobot Dimensi Struktur atau 12,5% (dua belas koma lima persen) dari bobot Total keseluruhan skor.
  - Dimensi Sentralisasi adalah 25% (dua puluh lima persen) dari 50% bobot Dimensi Struktur atau 12,5% (dua belas koma lima persen) dari bobot Total keseluruhan skor.
- 2) Dimensi Proses, mempunyai bobot 50% (lima puluh persen), dengan rincian bobot masing-masing subdimensi sebagai berikut:
  - Dimensi Keselarasan adalah 20% (dua puluh persen) dari 50% bobot Dimensi Proses atau 10% (sepuluh persen) dari bobot Total keseluruhan skor.
  - Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan adalah 20% (dua puluh persen) dari 50% bobot Dimensi Proses atau 10% (sepuluh persen) dari bobot Total keseluruhan skor.
  - Dimensi peningkatan dan Perbaikan Proses adalah 20% (dua puluh persen) dari 50% bobot Dimensi Proses atau 10% (sepuluh persen)

dari bobot Total keseluruhan skor.

- Dimensi Teknologi Informasi adalah 20% (dua puluh persen) dari 50% bobot Dimensi Proses atau 10% (sepuluh persen) dari bobot Total keseluruhan skor.
- Dimensi Manajemen risiko adalah 20% (dua puluh persen) dari 50% bobot dimensi Proses atau 10% (sepuluh persen) dari bobot Total keseluruhan skor.

Struktur bobot Penilaian disajikan sebagaimana tampak pada Tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3. Struktur Bobot Penilaian**

Dimensi	Bobot dari Nilai Dimensi	Bobot dari Nilai Total Keseluruhan
Struktur Organisasi (50%)	Kompleksitas Struktur (50%)	Kompleksitas Struktur (25%)
	Formalisasi Struktur (25%)	Formalisasi Struktur (12,5%)
	Sentralisasi Struktur (25%)	Sentralisasi Struktur (12,5%)
Proses (50%)	Keselerasan ( <i>Alignment</i> ) (20%)	Keselerasan ( <i>Alignment</i> ) (10%)
	Tata Kelola ( <i>Governance</i> ) dan Kepatuhan ( <i>Compliance</i> ) (20%)	Tata Kelola ( <i>Governance</i> ) dan Kepatuhan ( <i>Compliance</i> ) (10%)
	Perbaikan dan Peningkatan Proses (20%)	Perbaikan dan Peningkatan Proses (10%)
	Teknologi Informasi (20%)	Teknologi Informasi (10%)
	Manajemen risiko (20%)	Manajemen risiko (10%)
	Total	100%

Dengan adanya pembagian tersebut di atas maka penghitungan nilainya adalah dengan cara sebagai berikut:

- Pertanyaan mengenai subdimensi kompleksitas struktur nomor 1 sampai dengan 18 dengan bobot 25%, maka konversinya adalah sesuai Tabel 3

**Tabel 4. Nilai Subdimensi Kompleksitas**

PERNYATAAN	STS	TS	S	SS	Bobot
Jawaban Nomor 1 s.d 18	1	2	3	4	25% dibagi 18 = 1,389
Nilai Masing-Masing Pernyataan	1,389	1,042	0,694	0,347	
Jumlah Nilai Setiap Pernyataan	...	...	...	...	.....

\* khusus pertanyaan 7, 9, 13, 15, 16, 17, dan 18 urutan nilai pernyataan terbalik.

\* khusus pertanyaan 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 hanya dijawab bagi K/L/D yang memiliki instansi vertikal atau kantor regional atau UPT.

- Pertanyaan mengenai subdimensi formalisasi struktur nomor 1 sampai dengan 7 dengan bobot 12,5% maka konversinya adalah sesuai Tabel 4.

**Tabel 5. Nilai Subdimensi Formalisasi Struktur**

PERNYATAAN	STS	TS	S	SS	BOBOT
Jawaban Nomor 1 s.d. 7	1	2	3	4	12,5% dibagi 7 = 1,786
Nilai Masing-Masing Pernyataan	0,446	0,893	1,339	1,786	
Jumlah Nilai Setiap Pernyataan	....	....	....	....	.....

\*khusus pertanyaan 1 dan 3 urutan nilai terbalik

- c. Pertanyaan mengenai subdimensi sentralisasi struktur nomor 1 sampai dengan 11 dengan bobot 12,5% maka konversinya sesuai Tabel 5.

**Tabel 6. Nilai Subdimensi Sentralisasi Struktur**

PERNYATAAN	STS	TS	S	SS	BOBOT
Jawaban Nomor 1 s.d. 11	1	2	3	4	12,5% dibagi 11=
Nilai Masing-Masing Pernyataan	0,284	0,568	0,852	1,136	
Jumlah Nilai Setiap Pernyataan					

\*khusus pertanyaan 1, 3, dan 4 urutan nilai terbalik

- d. Pertanyaan mengenai subdimensi keselarasan (*alignment*) nomor 1 sampai dengan 8 dengan bobot 10% maka konversinya adalah sesuai Tabel 6.

**Tabel 7. Nilai Subdimensi Keselarasan**

PERNYATAAN	STS	TS	S	SS	BOBOT
Jawaban Nomor 1 s.d. 8	1	2	3	4	10% dibagi 8= 1,250
Nilai Masing-Masing Pernyataan	0,313	0,625	0,938	1,250	
Jumlah Nilai Setiap Pernyataan					

- e. Pertanyaan mengenai Tata Kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*) nomor 1 sampai dengan 7 dengan bobot 10% maka konversinya sesuai Tabel 7.

**Tabel 8. Nilai Subdimensi Tata Kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*)**

PERNYATAAN	STS	TS	S	SS	BOBOT
Jawaban Nomor 1 s.d. 7	1	2	3	4	10% dibagi 7=
Nilai Masing-Masing Pernyataan	0,357	0,714	1,071	1,429	
Jumlah Nilai Setiap Pernyataan					

- f. Pertanyaan mengenai subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses nomor 1 sampai dengan 4 dengan bobot 10% maka konversinya sesuai Tabel 8.

**Tabel 9. Nilai Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses**

PERNYATAAN	STS	TS	S	SS	BOBOT
Jawaban Nomor 1 s.d. 4	1	2	3	4	10% dibagi 4= 2,500
Nilai Masing-Masing Pernyataan	0,625	1,25	1,875	2,500	
Jumlah Nilai Setiap Pernyataan					

\* Khusus pertanyaan 2, dan 4 urutan pernyataan nilai terbalik

- g. Pertanyaan mengenai subdimensi Teknologi Informasi nomor 1 sampai dengan 5 dengan bobot 10% maka konversinya adalah sesuai Tabel 9.

**Tabel 10. Nilai Subdimensi Teknologi Informasi**

PERNYATAAN	STS	TS	S	SS	BOBOT
Jawaban Nomor 1 s.d. 5	1	2	3	4	10% dibagi 5= 2
Nilai Masing-Masing Pernyataan	0,5	1	1,5	2	
Jumlah Nilai Setiap Pernyataan					

\* Khusus pertanyaan 4 urutan pernyataan nilai terbalik

- h. Pertanyaan mengenai subdimensi manajemen risiko nomor 1 sampai dengan 6 dengan bobot 10% maka konversinya adalah sesuai Tabel 10.

**Tabel 11. Nilai Subdimensi Manajemen Risiko**

PERNYATAAN	STS	TS	S	SS	BOBOT
Jawaban Nomor 1 s.d. 6	1	2	3	4	10% dibagi 6= 1,667
Nilai Masing-Masing Pernyataan	0,417	0,833	1,250	1,667	
Jumlah Nilai Setiap Pernyataan					

\* Khusus pertanyaan 4 dan 5 urutan pernyataan nilai terbalik

- c) **Perhitungan Nilai Akhir, (Total), Peringkat Organisasi, dan Interpretasi**

**Tabel 12. Perhitungan Nilai Akhir (Total), Peringkat Organisasi, dan Interpretasi**

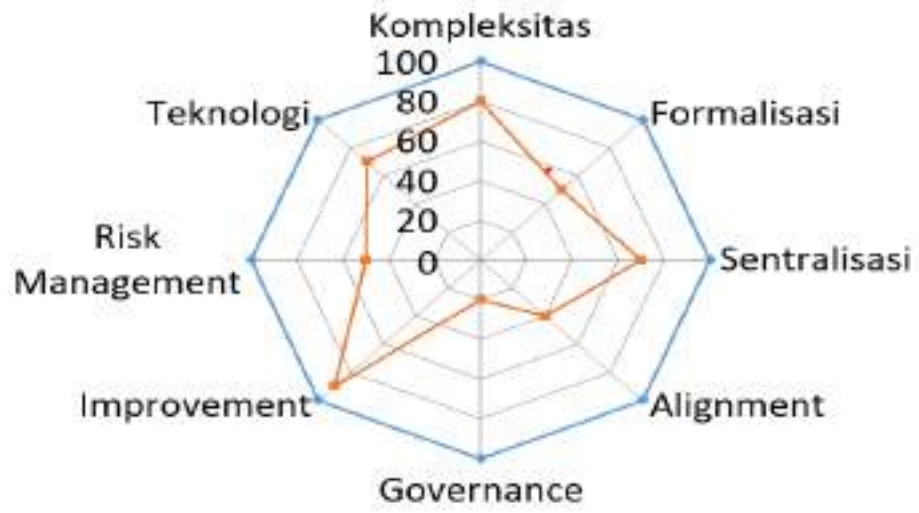
PERINGKAT	KETERANGAN
Peringkat Komposit 5 (P-5) Skor 81-100	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Peringkat Komposit 4 (P-4) Skor 61-80	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.
Peringkat Komposit 3 (P-3) Skor 41-60	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai cukup mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan cukup mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi memiliki berbagai kelemahan yang dapat menyebabkan peringkatnya menurun apabila organisasi tidak segera melakukan tindakan korektif secara sistematis.
Peringkat Komposit 2 (P-2) Skor 21-40	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong kurang baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai kurang mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan kurang mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Di samping itu, struktur dan proses organisasi dinilai memiliki beberapa faktor kelemahan serius, baik faktor kelemahan yang bersifat parsial dan berdiri sendiri maupun yang bersifat terkait satu sama lain dan pengaruh negatifnya bersifat simultan. Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi memperburuk peringkat organisasi sampai ke kondisi terburuk.
Peringkat Komposit 1 (P-1) Skor 0-20	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong tidak baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai tidak efektif dan tidak mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi serta tidak mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Di samping itu, struktur dan proses organisasi dinilai memiliki banyak faktor kelemahan yang sangat serius, baik faktor kelemahan yang bersifat parsial dan berdiri sendiri maupun faktor kelemahan yang bersifat terkait satu sama lain dan pengaruh negatifnya bersifat simultan. Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang bersifat total (perombakan total struktur organisasi dan proses organisasi) berpotensi membahayakan kelangsungan organisasi.

**d) Penyajian Dalam Bentuk Grafik Radar Masing-masing Subdimensi**

Untuk dapat menganalisis secara lebih mendalam hasil perhitungan kuesioner dapat disajikan dalam bentuk grafik radar untuk setiap subdimensi yang digunakan dalam evaluasi. Hasil grafik radar memberikan informasi yang lebih analitis tentang kondisi organisasi dari sisi masing-masing dimensi dan subdimensi yang digunakan dalam evaluasi. Ilustrasi grafik radar ditampilkan sesuai Gambar 1.





**Gambar 1. Ilustrasi Grafik Radar Masing-masing Subdimensi**

## BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil Analisis Kuantitatif

Hasil analisis kuantitatif disajikan dalam bentuk skor dimensi struktur, dimensi proses, nilai komposit dan rekapitulasi kendala berdasarkan sub dimensi yang bersumberkan dari hasil kuesioner dan dihitung sesuai pedoman pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 20 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Kelembagaan. Hasil kajian disajikan pada tabel 14 – 16 berikut ini.

#### a) Skor Dimensi Struktur

**Tabel 13. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Skor Dimensi Struktur 27 OPD Kabupaten Banjar.**

No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		Kompleksitas (25%)	Formalisasi (12.5%)	Sentralisasi (12.5%)
1	Sekretariat Daerah	127.78	68.29	68.29
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	102.07	57.58	57.37
3	Inspektorat Daerah	103.60	61.72	62.13
4	Dinas Pendidikan	120.21	62.49	59.84
5	Dinas Kesehatan	110.92	59.37	61.63
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	107.89	60.24	62.62
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	109.24	57.81	58.65
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	105.37	60.10	62.10
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	105.37	55.80	61.63
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	106.13	61.98	59.64
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	103.18	59.37	62.80
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99.04	66.93	65.94
13	Dinas Perhubungan	118.92	63.83	58.08
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	98.60	59.37	61.77
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	79.91	54.96	61.04
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	102.68	62.24	59.97
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	108.08	57.53	59.17
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	104.73	59.37	61.81
19	Dinas Pertanian	98.33	54.55	59.64
20	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	101.26	57.98	58.76
21	Satuan Polisi Pamong Praja	105.31	60.15	60.63
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	104.10	56.50	57.32

No	Nama OPD	Dimensi Struktur		
		Kompleksitas (25%)	Formalisasi (12.5%)	Sentralisasi (12.5%)
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	99.64	54.68	60.30
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	99.14	59.76	59.56
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90.30	56.49	58.57
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	92.84	55.62	53.48
27	RSUD Ratu Zaleha	96.67	59.37	60.08

**b) Skor Dimensi Proses**

**Tabel 14. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Skor Dimensi Proses 27 OPD Kabupaten Banjar.**

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		Keselarasasan (10%)	Tata Kelola & Kepatuhan (10%)	Perbaikan & Peningkatan Proses (10%)	Teknologi Informasi (10%)	Manajemen Risiko (10%)
1	Sekretariat Daerah	59.41	59.98	48.75	55.41	54.00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	52.21	49.98	43.13	36.25	46.50
3	Inspektorat Daerah	55.80	55.61	47.58	49.58	46.81
4	Dinas Pendidikan	52.64	49.86	39.38	43.74	42.00
5	Dinas Kesehatan	58.44	58.42	47.27	54.84	51.64
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	189.54	52.07	44.72	49.10	48.22
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	187.48	53.59	46.18	48.28	43.75
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	54.97	54.39	47.10	53.53	49.62
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	52.22	52.12	44.38	49.37	40.56
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	53.07	52.48	40.83	50.80	50.17
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	53.81	54.08	47.53	49.85	47.09
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	62.17	58.54	48.13	43.51	56.88

No	Nama OPD	Dimensi Proses				
		Keselarasan (10%)	Tata Kelola & Kepatuhan (10%)	Perbaikan & Peningkatan Proses (10%)	Teknologi Informasi (10%)`	Manajemen Risiko (10%)
13	Dinas Perhubungan	57.05	53.74	47.81	50.00	44.75
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	53.30	53.20	41.56	46.04	48.25
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	53.03	49.40	42.98	47.69	44.06
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	57.08	54.15	45.57	48.37	50.75
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	53.17	52.19	45.29	47.18	46.74
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	55.51	53.85	46.14	50.64	51.23
19	Dinas Pertanian	50.70	48.73	45.57	49.58	49.29
20	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	56.41	52.20	47.64	52.18	52.50
21	Satuan Polisi Pamong Praja	55.08	52.07	42.29	51.28	46.38
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53.98	52.48	41.56	47.15	46.08
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	51.24	48.73	40.83	47.64	43.46
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	53.25	53.63	45.03	49.34	48.42
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50.33	49.22	40.05	47.56	42.00
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.46	50.74	37.19	39.08	41.30
27	RSUD Ratu Zaleha	52.03	50.81	41.81	50.55	49.78

c) Nilai Komposit

**Tabel 15. Nilai Komposit dan Kriteria Evaluasi Kelembagaan 27 OPD Kabupaten Banjar.**

No	Nama OPD	Total	Nilai Komposit	Kriteria
1	Sekretariat Daerah	482.10	69.30	Efektif
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	445.09	62.69	Efektif
3	Inspektorat Daerah	481.84	66.79	Efektif
4	Dinas Pendidikan	470.15	68.11	Efektif
5	Dinas Kesehatan	502.52	69.91	Efektif
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	613.32	80.42	Sangat Efektif
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	604.43	79.66	Efektif
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	487.17	67.58	Efektif
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	420.88	60.83	Efektif
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	475.09	66.47	Efektif
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	477.71	66.30	Efektif
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	501.12	68.29	Efektif
13	Dinas Perhubungan	494.18	70.30	Efektif
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	462.10	64.03	Efektif
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	433.07	58.19	Cukup Efektif
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	480.81	66.54	Efektif
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	469.35	66.06	Efektif
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	483.26	67.06	Efektif
19	Dinas Pertanian	456.40	63.24	Efektif
20	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	478.92	66.00	Efektif
21	Satuan Polisi Pamong Praja	473.19	66.14	Efektif
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	473.19	64.38	Efektif
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	446.53	62.47	Efektif
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	468.13	64.67	Efektif
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	434.51	59.87	Cukup Efektif
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	419.71	58.62	Cukup Efektif
27	RSUD Ratu Zaleha	461.11	63.60	Efektif

d) Rekapitulasi Kendala Berdasarkan Sub Dimensi

Tabel 16. Hasil Rekapitulasi Kendala Berdasarkan Sub Dimensi 27 OPD Kabupaten Banjar.

No	Dimensi/Sub Dimensi/Permasalahan	Jumlah OPD
<b>1</b>	<b>Sub Dimensi Kompleksitas</b>	
	- Desain organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	23
	- Terdapat indikasi bahwa desain organisasi yang ada bersifat kompleks.	9
	- Tingkatan unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan tugas dan fungsinya dari tingkatan unit organisasi paling atas sampai tingkatan unit organisasi paling bawah.	23
	- Nomenklatur unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsinya.	10
	- Penataan perangkat daerah telah ditetapkan sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.	10
	- Jumlah jabatan pada setiap tingkatan belum sesuai dengan kebutuhan.	20
	- Jenjang jabatan yang ada belum sesuai dengan kebutuhan.	21
	- Jumlah instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang dibentuk menunjukkan indikasi tidak mencukupi kebutuhan minimum yang diperlukan	5
<b>2</b>	<b>Sub Dimensi Formalisasi</b>	
	- Tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja	18
	- Mekanisme hubungan antar unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.	13
	- Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah perlu dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.	10
	- Seluruh proses kerja belum dituangkan secara sistematis di dalam peraturan tentang standar operasional prosedur.	4
	- Standarisasi pelayanan publik belum diformalkan.	3
	- Rencana strategis belum dituangkan secara jelas di dalam keputusan resmi organisasi.	4
	- Seluruh proses kerja belum dituangkan secara sistematis di dalam peraturan tentang standar operasional prosedur.	3
<b>3</b>	<b>Sub Dimensi Sentralisasi</b>	
	- Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.	20
	- Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral belum dituangkan dalam Keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.	14
<b>4</b>	<b>Sub Dimensi Keselarasan</b>	
	- Keterkaitan proses kerja antar unit kerja yang terkait di dalam organisasi belum dipetakan/didokumentasikan dengan baik.	10

No	Dimensi/Sub Dimensi/Permasalahan	Jumlah OPD
	- Koordinasi antar unit kerja tidak selalu dilakukan dengan baik di dalam setiap pelaksanaan tugas yang melibatkan unit kerja lain di dalam organisasi.	9
	- Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang atau sektoral yang terkait belum terlaksana dengan baik.	8
<b>5</b>	<b>Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan</b>	
	- Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi dari tingkatan manajemen tertinggi sampai tingkatan menengah ke bawah belum sesuai dengan peraturan perundangan.	8
	- Terdapat indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi, baik pada tingkatan manajemen tertinggi sampai dengan manajemen menengah ke bawah.	14
	- Adanya indikasi proses kerja yang belum memiliki sistem dan mekanisme pertanggungjawaban (termasuk pelaporan) yang jelas (tanggung jawab)	3
	- Setiap tahapan pekerjaan yang terdapat di dalam proses kerja pada tingkatan manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah belum memiliki kesesuaian dan kejelasan fungsi, struktur, dan penanggung jawab pekerjaan (akuntabilitas).	2
<b>6</b>	<b>Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses</b>	
	- Standar operasional prosedur tidak diperbarui secara periodik	10
	- Organisasi tidak selalu melakukan pengembangan terhadap sistem proses kerja.	8
	- Terdapat indikasi bahwa organisasi lebih berorientasi pada hal-hal yang bersifat rutinitas dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat strategis.	1
<b>7</b>	<b>Sub Dimensi Manajemen Resiko</b>	
	- Organisasi belum memiliki kebijakan manajemen risiko yang memadai.	13
	- Risiko-risiko utama organisasi belum diidentifikasi dengan baik.	9
	- Risiko-risiko utama organisasi yang telah diidentifikasi belum diukur (peluang terjadinya maupun dampaknya) dengan metode yang memadai.	9
	- Organisasi belum melaksanakan kebijakan manajemen risiko.	7
	- Organisasi belum memiliki sistem monitoring risiko yang memadai.	15
<b>8</b>	<b>Sub Dimensi Teknologi Informasi</b>	
	- Organisasi belum memiliki rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi.	14
	- Organisasi belum memiliki kebijakan IT (e-government) yang memadai.	16
	- Seluruh informasi publik terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi belum dipublikasikan secara periodik di dalam website organisasi.	3



e) Hasil Analisis dan Rekomendasi Masing-Masing OPD

1) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar

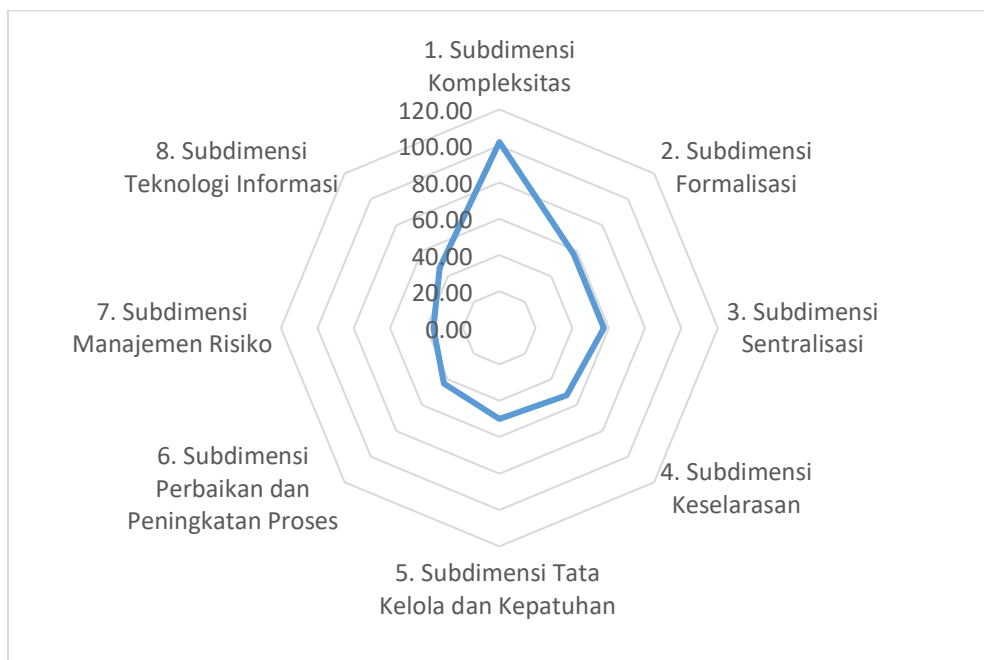


**Gambar 2. Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar**

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub dimensi kompleksitas yang terkait dengan desain, tingkatan dan nomenklatur organisasi
  - Sub dimensi sentralisasi yang terkait dengan wewenang pengambilan keputusan dan penanganan permasalahan lintas bidang.
  - Sub dimensi Manajemen Risiko mengindikasikan bahwa organisasi belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan manajemen risiko.
  - Sub dimensi Teknologi Informasi mengindikasikan bahwa seluruh informasi publik belum dipublikasikan secara periodik di dalam website organisasi.
- Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat memperbaiki kelemahan minor yang ada yaitu :
  - Desain organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Tingkatan unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan tugas dan fungsinya dari tingkatan unit organisasi paling atas sampai tingkatan unit organisasi paling bawah
- Nomenklatur unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsinya.
- Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi..
- Organisasi agar sepenuhnya melaksanakan kebijakan manajemen risiko.
- Seluruh informasi publik terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi agar dipublikasikan secara periodik di dalam website organisasi.

## 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

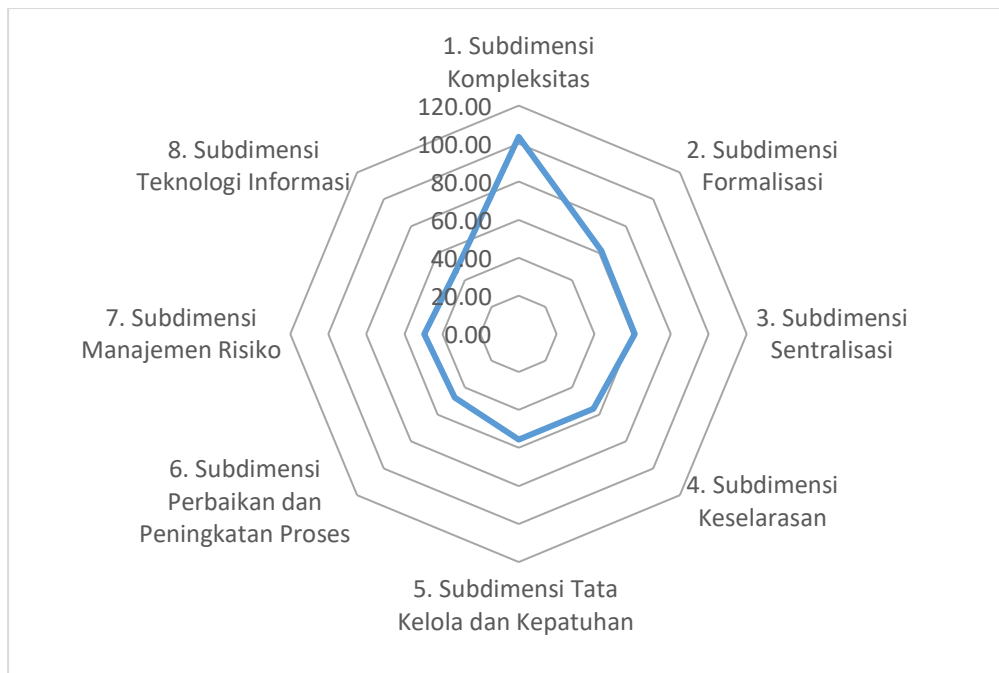


**Gambar 3. Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banjar**

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub Dimensi Kompleksitas mengindikasikan bahwa desain organisasi yang ada bersifat kompleks, adanya masalah di tingkatan unit organisasi, nomenklatur dan jenjang jabatan

- Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan tugas, fungsi unit organisasi dan mekanisme hubungan antar unit organisasi
- Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan wewenang pengambilan keputusan
- Sub Dimensi Manajemen Resiko mengindikasikan bahwa organisasi belum memiliki sistem monitoring risiko yang memadai.
- Sub dimensi Teknologi Informasi mengindikasikan bahwa Organisasi belum memiliki kebijakan IT (e-government) yang memadai.
- Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat memperbaiki kelemahan minor yang ada yaitu :
  - Desain organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Tingkatan unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan tugas dan fungsinya dari tingkatan unit organisasi paling atas sampai tingkatan unit organisasi paling bawah
  - Instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  - Nomenklatur unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsinya.
  - Menyesuaikan jenjang jabatan dengan kebutuhan
  - Mekanisme hubungan antar unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.
  - Organisasi agar mendisain sistim manajemen resiko yang memadai untuk kepentingan organisasi.
  - Organisasi harus segera memiliki kebijakan IT (e-government) yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

### 3) Inspektorat Daerah

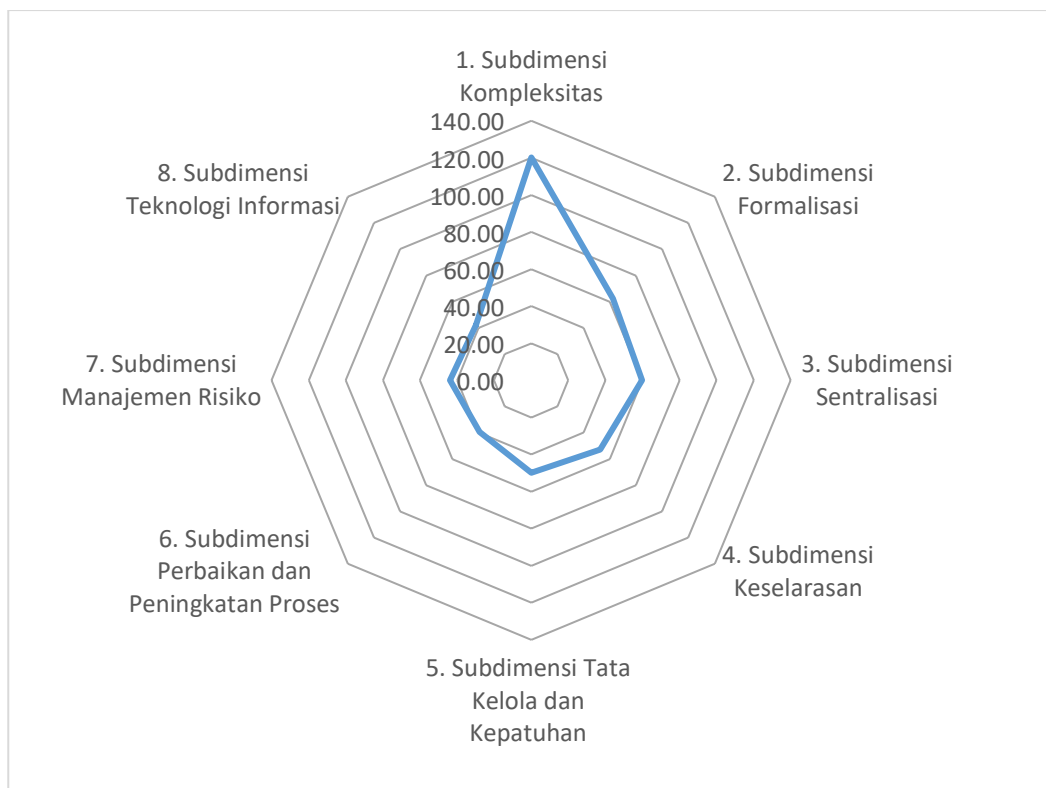


**Gambar 4. Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Daerah Kabupaten Banjarnegara**

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub Dimensi Kompleksitas mengindikasikan bahwa desain organisasi dan tingkatan organisasi perlu ada penyesuaian, Penataan perangkat daerah belum ditetapkan sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan jabatan fungsional yang ada belum memenuhi kebutuhan
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan wewenang pengambilan keputusan dan permasalahan lintas bidang
  - Sub Dimensi Teknologi Informasi mengindikasikan bahwa Organisasi belum memiliki rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi dan kebijakan IT (e-government) yang memadai.
- Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat memperbaiki kelemahan minor yang ada yaitu :
  - Desain organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Tingkatan unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan tugas dan fungsinya dari tingkatan unit organisasi paling atas sampai tingkatan unit organisasi paling bawah
- Penataan perangkat daerah perlu disesuaikan dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
- Menyesuaikan jabatan fungsional dengan kebutuhan
- Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
- Penyelesaian Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral agar dituangkan dalam suatu Keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.
- Organisasi harus segera memiliki kebijakan IT (e-government) yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

#### 4) Dinas Pendidikan



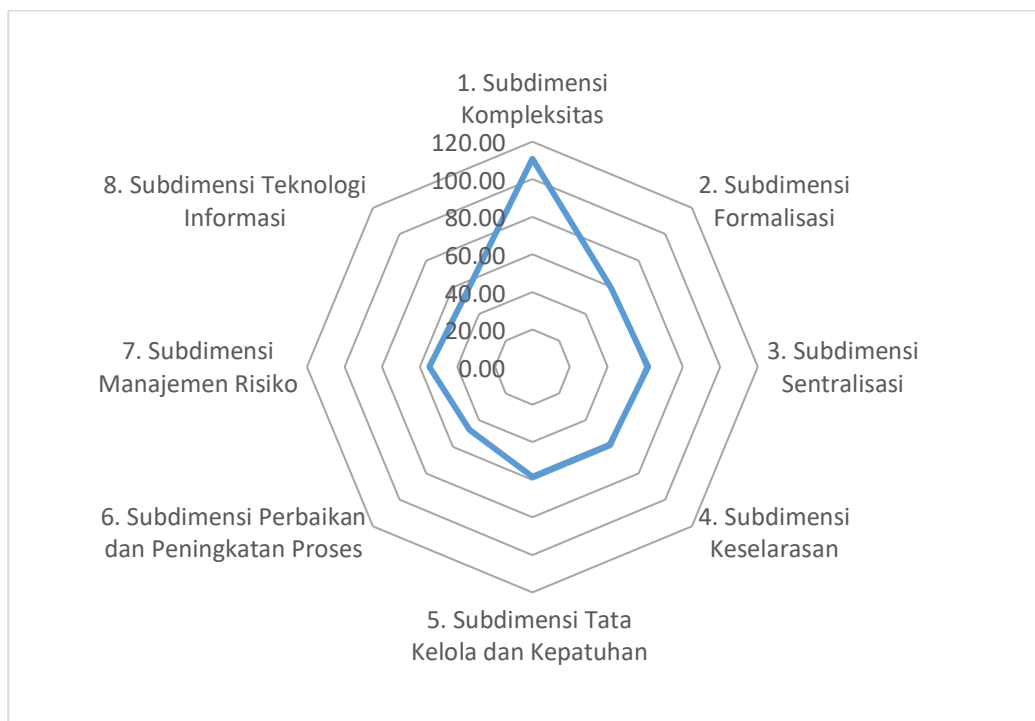
**Gambar 5. Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara**

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika

perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :

- Sub Dimensi Kompleksitas mengindikasikan bahwa Penataan perangkat daerah belum ditetapkan sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan jenjang jabatan fungsional yang ada belum memenuhi kebutuhan
- Sub dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses terkait dengan Perbaikan Standar operasional prosedur
- Sub Dimensi Teknologi Informasi terkait kebijakan IT (e-government) yang memadai.
- Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat memperbaiki kelemahan minor yang ada yaitu :
  - Penataan perangkat daerah harus ditetapkan sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
  - Jenjang jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan
  - Perbaikan Standar operasional prosedur harus dilakukan secara periodik
  - Organisasi harus memiliki kebijakan IT (e-government) yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

## 5) Dinas Kesehatan

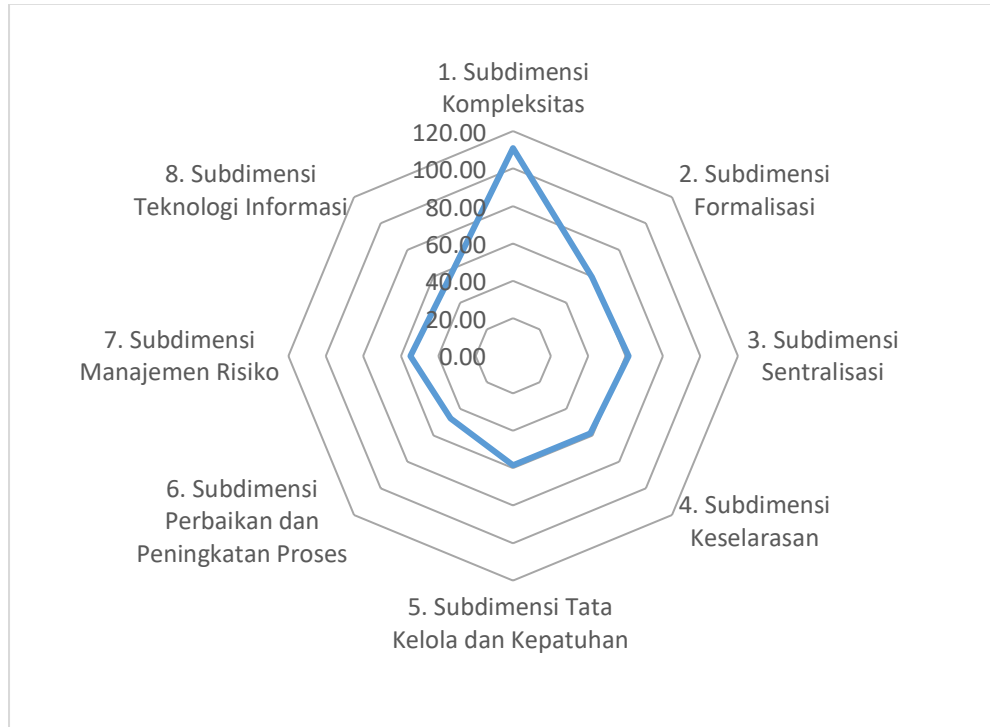


**Gambar 6. Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara**

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub Dimensi kompleksitas terkait dengan penyederhanaan disain organisasi dan tingkat unit organisasi, dan kesesuaian Jenjang jabatan dan jabatan fungsional yang ada dengan kebutuhan.
  - Sub Dimensi Formalisasi terkait Tugas dan fungsi unit organisasi dan Mekanisme hubungan antar unit organisasi.
  - Sub Dimensi Keselarasan terkait dengan Keterkaitan proses kerja antar unit kerja di dalam organisasi
  - Sub Dimensi Tata Kelola Dan Kepatuhan, terkait dengan penyesuaian SOTK dan adanya indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi, baik pada tingkatan manajemen tertinggi sampai dengan manajemen menengah ke bawah.
  - Sub Dimensi Teknologi Informasi terkait dengan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi, kebijakan IT (e-government) yang memadai dan publikasi seluruh informasi publik terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi
  
- Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat memperbaiki kelemahan minor yang ada yaitu :
  - Desain organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan
  - Tugas dan fungsi unit organisasi serta mekanisme hubungan antar unit organisasi perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.
  - Penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi, proses dan tahapan kerja dari tingkatan manajemen tertinggi sampai tingkatan menengah ke bawah dengan peraturan perundangan.
  - Meniadakan intervensi yang ada di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi, baik pada tingkatan manajemen tertinggi sampai dengan manajemen menengah ke bawah.
  - Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi dan kebijakan IT (e-government) yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

- o Seluruh informasi publik terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi agar dipublikasikan secara periodik di dalam website organisasi.

**6) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan**

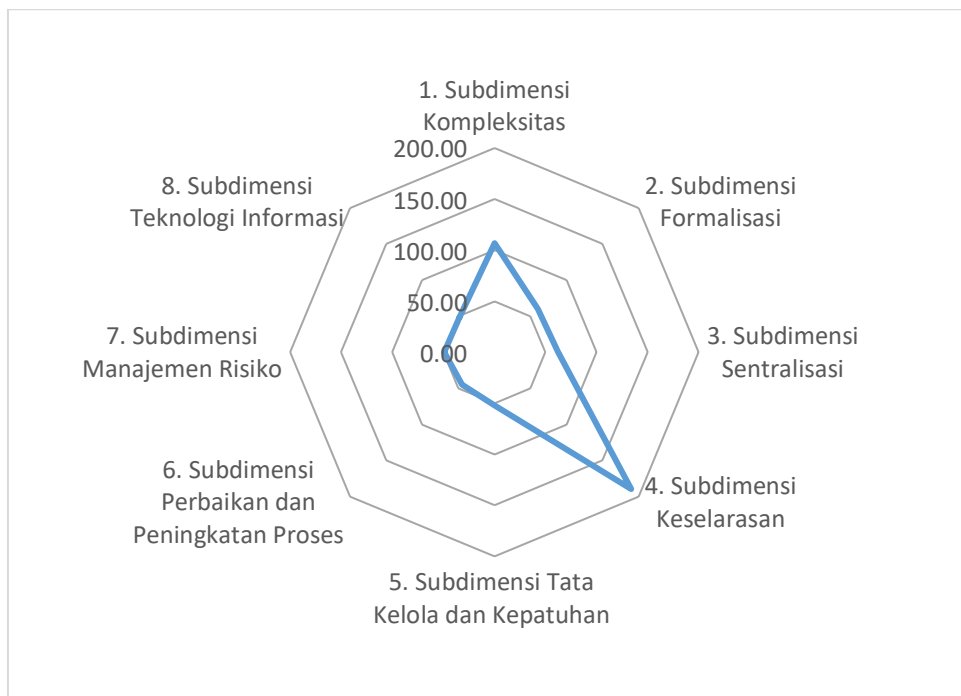


**Gambar 7. Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar**

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P5 (Sangat Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.
- Rekomendasi yang dapat diberikan untuk OPD ini adalah sebagai berikut:
  - o Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi dan kebijakan IT (e-government) yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
  - o Seluruh informasi publik terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi agar dipublikasikan secara periodik di dalam website organisasi.



7) **Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**

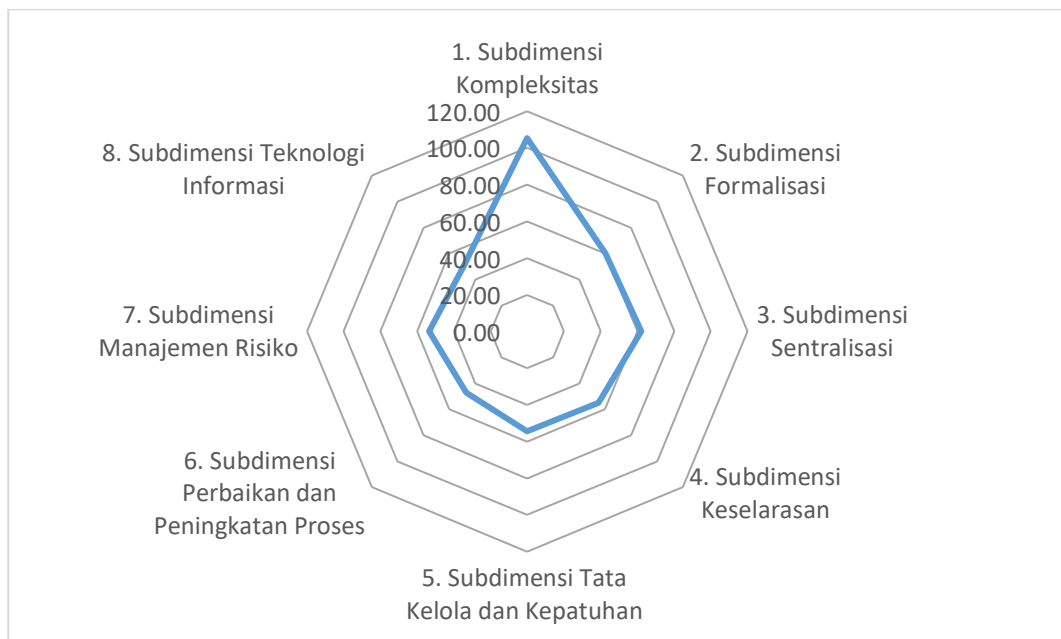


**Gambar 8. Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar**

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian Desain organisasi dan tingkatan unit organisasi, Penataan perangkat daerah yang sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan, penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
  - Sub Dimensi Formalisasi terkait dengan Mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan setiap unit kerja, Proses kerja yang dituangkan dalam SOP dan formalisasi Standarisasi pelayanan publik.
  - Sub Dimensi Perbaikan Dan Peningkatan Proses yang terkait dengan pengembangan terhadap sistem proses kerja, dan orientasi organisasi yang lebih berorientasi pada hal-hal yang bersifat rutinitas dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat strategis.

- Sub Dimensi Manajemen Risiko yang terkait dengan kebijakan manajemen risiko di dalam organisasi,
  - Sub Dimensi Teknologi Informasi yang terkait dengan kebijakan IT dan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi.
- Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat memperbaiki kelemahan minor yang ada yaitu :
    - Desain organisasi dan tingkatan unit organisasi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - Perlu adanya penetapan tentang Penataan perangkat daerah yang sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan
    - Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
    - Mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan setiap unit kerja, dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah perlu dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
    - Seluruh proses kerja agar dituangkan secara sistematis di dalam peraturan tentang standar operasional prosedur.
    - Perlu adanya formalisasi Standarisasi pelayanan publik.
    - Perlu adanya pengembangan terhadap sistem proses kerja,
    - Organisasi agar lebih berorientasi pada hal-hal yang bersifat strategis dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat rutininitas
    - Perlu adanya kebijakan tentang manajemen risiko dan sistim monitoringnya risiko yang memadai di dalam organisasi
    - Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi dan kebijakan IT (e-government) yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

8) **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**



**Gambar 9. Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar**

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian Desain organisasi dan tingkatan unit organisasi, adanya indikasi bahwa desain organisasi yang ada saat ini kompleks Penataan perangkat daerah yang sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan, penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan dan permasalahan lintas bidang.
  - Sub Dimensi Keselarasan yang terkait dengan Koordinasi antar unit kerja, Keterkaitan proses kerja lintas bidang dan Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang.

- Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait dengan adanya indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi.
- Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait dengan kebijakan manajemen risiko
- Sub Dimensi Teknologi Informasi terkait dengan kebijakan IT dan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi
- Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat memperbaiki kelemahan minor yang ada yaitu :
  - Desain organisasi dan tingkatan unit organisasi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Perlu adanya penetapan tentang penataan perangkat daerah yang sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan
  - Perlu dilakukan penyederhanaan disain organisasi
  - Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
  - Mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan setiap unit kerja, dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah perlu dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
  - Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
  - Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral agar dituangkan dalam suatu Keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.
  - Menghilangkan intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
  - Perlu adanya kebijakan tentang manajemen risiko dan sistem monitoringnya risiko yang memadai di dalam organisasi
  - Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi dan kebijakan IT (e-government) yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

## 9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

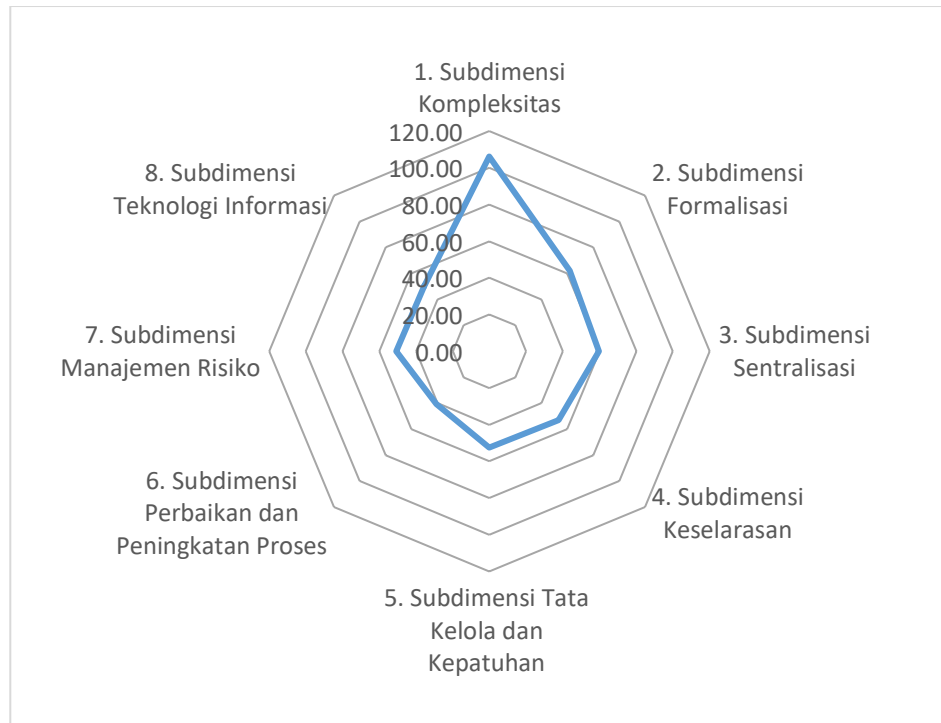


**Gambar 10. Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar**

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub dimensi kompleksitas terkait dengan penyesuaian Desain organisasi dan tingkatan unit organisasi, nomenklatur unit organisasi dan Penataan perangkat daerah yang sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan, penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan perumusan tugas & fungsi organisasi, mekanisme pelaksanaan tugas & fungsi, mekanisme hubungan antar unit organisasi, SOP dan formalisasi standar pelayanan publik
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan
  - Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait dengan penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi .

- Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses, yang terkait dengan pembaharuan Standar operasional prosedur
- Sub dimensi Manajemen Risiko terkait dengan kebijakan manajemen risiko dan sistim monitoring risiko
- Sub Dimensi Tekonologi Informasi terkait dengan kebijakan IT dan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi
- Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat memperbaiki kelemahan minor yang ada yaitu :
  - Desain organisasi, tingkatan unit organisasi dan nomenklatur unit organisasi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Perlu adanya penetapan tentang Penataan perangkat daerah yang sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan
  - Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
  - Perlu ada penetapan tugas & fungsi organsasi, mekanisme pelaksanaan tugas & fungsi, mekanisme hubungan antar unit organisasi, SOP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan public agar diformalkan
  - Mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan setiap unit kerja, dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah perlu dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
  - Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
  - Penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi, proses dan tahapan kerja dari tingkatan manajemen tertinggi sampai tingkatan menengah ke bawah dengan peraturan perundangan.
  - Perlu adanya pembaharuan Standar operasional prosedur yang dilakukan secara periodik
  - Perlu adanya kebijakan tentang manajemen risiko dan sistim monitoring risiko yang memadai di dalam organisasi
  - Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

## 10) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



**Gambar 11. Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar**

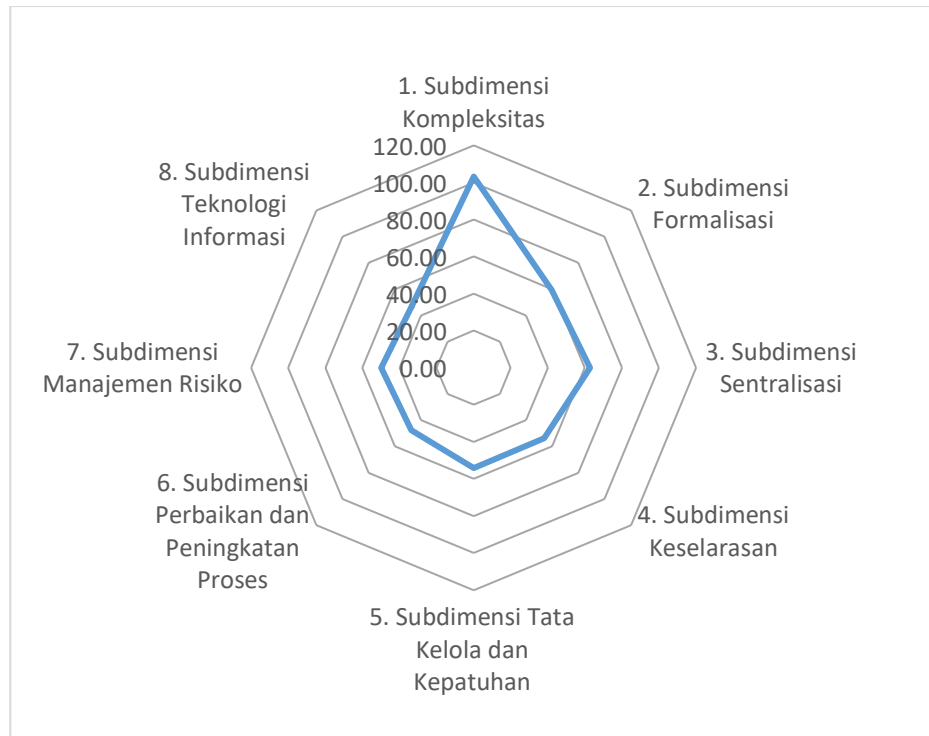
- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub dimensi kompleksitas terkait dengan tingkatan unit organisasi dan penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan perumusan tugas & fungsi organisasi dan mekanisme hubungan antar unit organisasi
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan antar lintas bidang
  - Sub Dimensi keselarasan yang terkait dengan keterkaitan proses kerja dengan jabatan-jabatan di dalam organisasi dan Koordinasi kerja antar unit, lintas bidang atau sektoral
  - Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait dengan pertanggung jawaban setiap proses kerja dan adanya indikasi

intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi.

- Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses, yang terkait dengan pengembangan terhadap sistem proses kerja
- Sub dimensi Manajemen Risiko terkait dengan kebijakan manajemen risiko.
- Sub Dimensi Teknologi Informasi terkait dengan kebijakan IT
- Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat memperbaiki kelemahan minor yang ada yaitu :
  - Tingkatan unit organisasi dan jenjang jabatan perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
  - Perlu ada penetapan tugas & fungsi organisasi, mekanisme pelaksanaan tugas & fungsi, mekanisme hubungan antar unit organisasi, SOP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan public agar diformalkan
  - Mekanisme kewenangan setiap unit kerja, dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah perlu dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
  - Penyelesaian permasalahan antar lintas bidang yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
  - Perlu adanya sistem dan mekanisme pertanggungjawaban setiap proses kerja (termasuk pelaporan) yang jelas.
  - Menghilangkan intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
  - Organisasi perlu melakukan pengembangan terhadap sistem proses kerja secara periodik
  - Perlu adanya kebijakan tentang manajemen risiko dan sistem monitoring risiko yang memadai di dalam organisasi
  - Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.



## 11) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



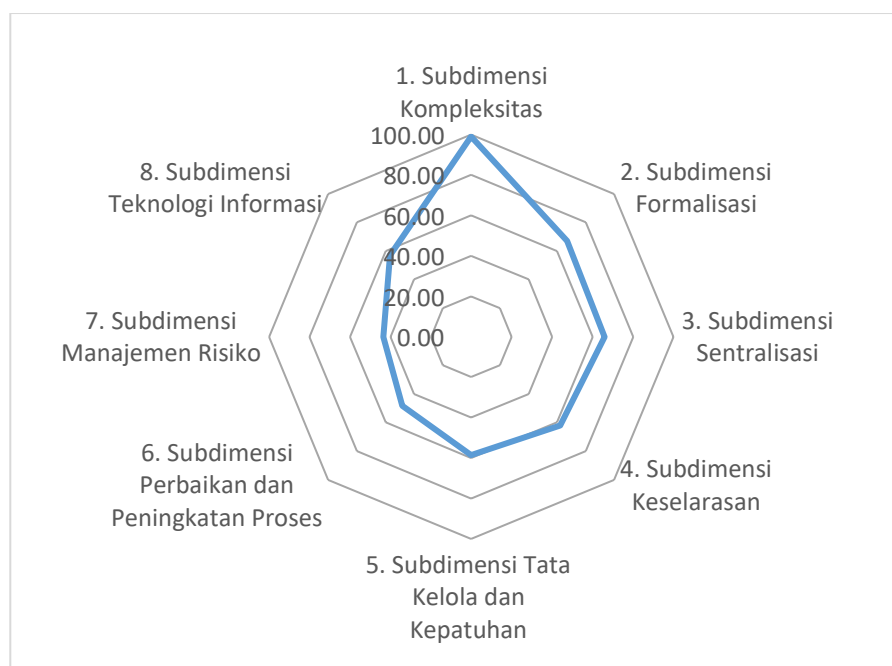
**Gambar 12. Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar**

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub dimensi kompleksitas terkait dengan penyesuaian desain organisasi, tingkatan unit organisasi, jenjang jabatan dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan perumusan tugas & fungsi organisasi dan mekanisme hubungan antar unit organisasi
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan
  - Sub Dimensi keselarasan yang terkait dengan Koordinasi kerja antar unit kerja organisasi
  - Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait dengan adanya indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi.
  - Sub dimensi Manajemen Risiko terkait dengan proses identifikasi

risiko-risiko utama organisasi dan sistem monitoring pelaksanaan manajemen risiko.

- Sub Dimensi Teknologi Informasi terkait dengan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi dan kebijakan IT
- Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat memperbaiki kelemahan minor yang ada yaitu :
  - Disain organisasi dan Tingkatan unit organisasi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
  - Perlu ada penetapan tugas & fungsi organisasi, dan mekanisme hubungan antar unit organisasi
  - Mekanisme kewenangan setiap unit kerja, dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah perlu dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
  - Koordinasi antar unit kerja agar dilakukan dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi
  - Menghilangkan intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
  - Organisasi perlu melakukan pengembangan terhadap sistem proses kerja secara periodik
  - Perlu Tindakan dalam mengidentifikasi risiko-risiko utama organisasi
  - Perlu adanya kebijakan tentang manajemen risiko dan sistem monitoring risiko yang memadai di dalam organisasi
  - Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

## 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

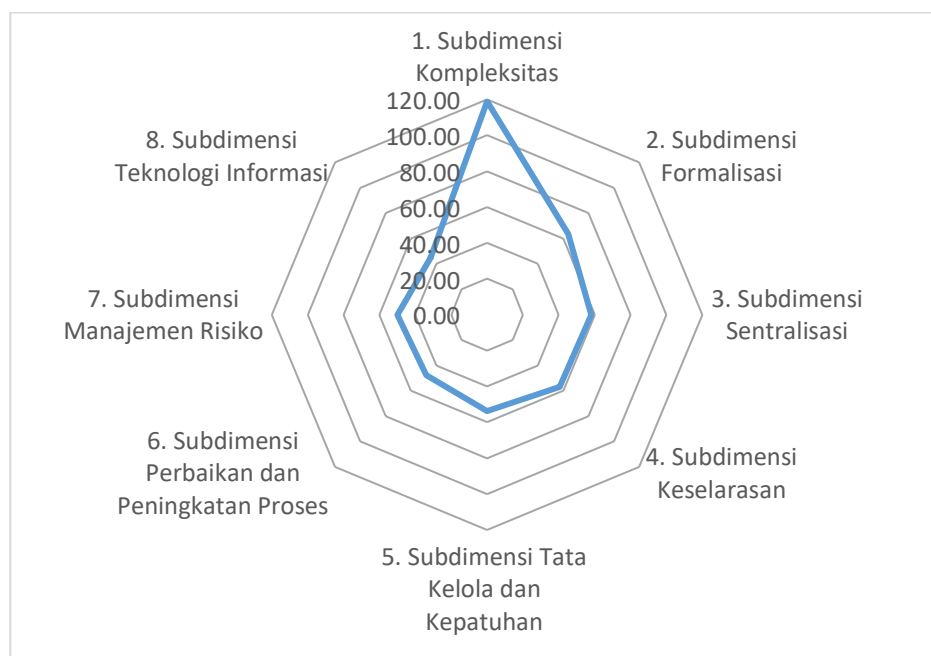


**Gambar 13. Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara**

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub dimensi kompleksitas terkait dengan penyesuaian desain organisasi, tingkatan unit organisasi, dan penataan perangkat daerah yang sesuai dengan substansi pewadahan.
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan perumusan tugas & fungsi organisasi dan mekanisme hubungan antar unit organisasi
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan dan mekanisme penyelesaian permasalahan bersifat lintas bidang atau sektoral
  - Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait dengan adanya indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi.
- Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat memperbaiki kelemahan minor yang ada yaitu :

- Disain organisasi dan Tingkatan unit organisasi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perlu adanya penetapan tentang Penataan perangkat daerah yang sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan
- Perlu ada penetapan tugas & fungsi organisasi, dan mekanisme hubungan antar unit organisasi
- Mekanisme kewenangan setiap unit kerja, dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah perlu dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
- Penyelesaian Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral agar dituangkan dalam suatu Keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.
- Menghilangkan intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi

### 13) Dinas Perhubungan



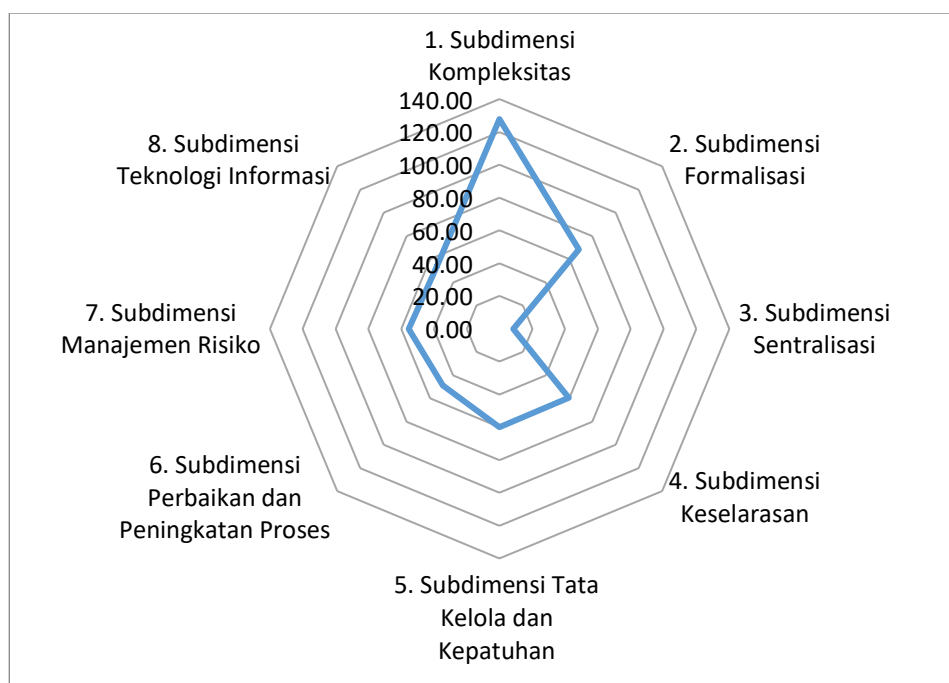
**Gambar 14. Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar**

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu

beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :

- Sub dimensi kompleksitas terkait dengan penyesuaian disain organisasi, tingkatan unit organisasi, jenjang jabatan dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan, serta Penataan perangkat daerah yang sesuai dengan substansi pewadahan.
- Sub Dimensi Formailisasi yang terkait dengan perumusan tugas & fungsi organsasi dan mekanisme hubungan antar unit organisasi
- Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan
- Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses, yang terkait dengan pembaharuan Standar operasional prosedur
- Sub Dimensi Teknologi Informasi terkait dengan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi dan kebijakan IT
- Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat memperbaiki kelemahan minor yang ada yaitu :
  - Disain organisasi dan Tingkatan unit organisasi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Perlu adanya penetapan tentang Penataan perangkat daerah yang sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan
  - Perlu ada penetapan tugas & fungsi organsasi, dan mekanisme hubungan antar unit organisasi
  - Mekanisme kewenangan setiap unit kerja, dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah perlu dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
  - Perlu adanya pembaharuan Standar operasional prosedur yang dilakukan secara periodik
  - Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

#### 14) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

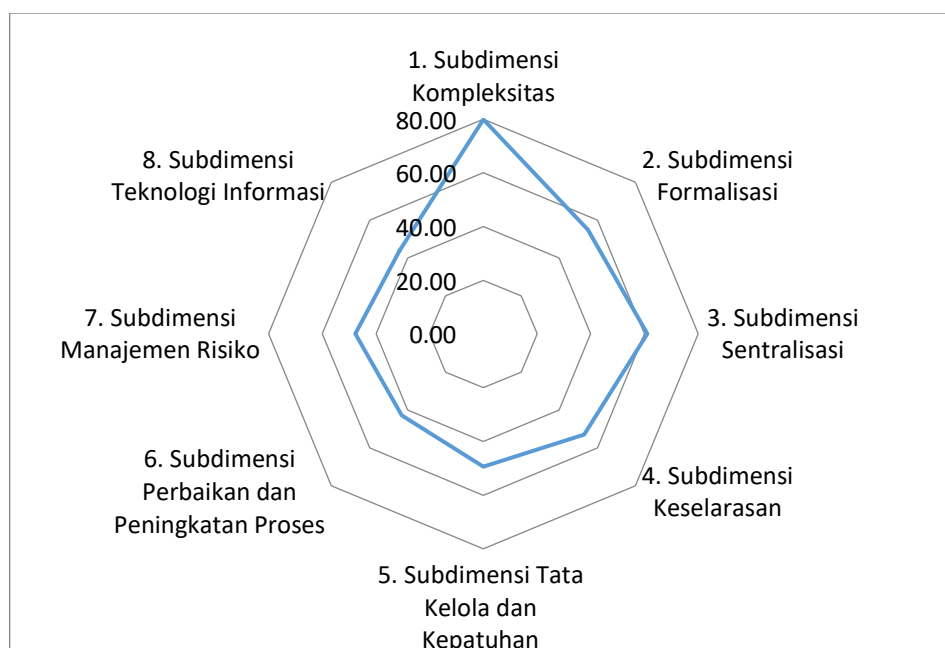


**Gambar 15. Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian desain organisasi, tingkatan unit organisasi, jenjang jabatan dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan perumusan tugas & fungsi organisasi dan mekanisme hubungan antar unit organisasi
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan
  - Sub Dimensi Keselarasan yang terkait dengan dokumentasi keterkaitan proses kerja antar unit kerja yang terkait di dalam organisasi
  - Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait dengan adanya indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi.

- Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses, yang terkait dengan pembaharuan Standar operasional prosedur
- Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait dengan kebijakan manajemen risiko yang memadai, pengukuran risiko-risiko utama organisasi dan sistim monitoring manajemen risiko
- Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat memperbaiki kelemahan minor yang ada yaitu :
  - Disain organisasi dan Tingkatan unit organisasi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
  - Perlu ada penetapan tugas & fungsi organisasi, dan mekanisme hubungan antar unit organisasi
  - Mekanisme kewenangan setiap unit kerja, dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah perlu dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
  - Mekanisme hubungan antar unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.
  - Menghilangkan intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
  - Organisasi perlu melakukan pembaharuan terhadap SOP secara periodik
  - Perlu tindakan dalam mengidentifikasi risiko-risiko utama organisasi
  - Perlu adanya kebijakan tentang manajemen risiko dan sistim monitoring risiko yang memadai di dalam organisasi

## 15) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan



**Gambar 16. Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan**

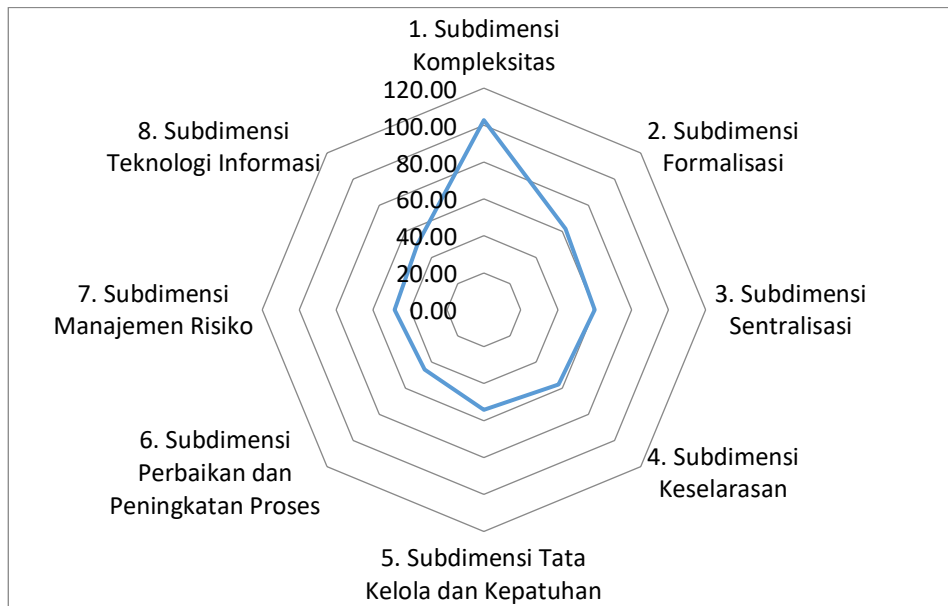
- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P3 (Cukup Efektif). Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai cukup mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan cukup mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi memiliki berbagai kelemahan yang dapat menyebabkan peringkatnya menurun apabila organisasi tidak segera melakukan tindakan korektif secara sistematis. Perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan adalah dalam hal :
  - Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian disain organisasi, tingkatan unit organisasi, nomenklatur unit organisasi, jenjang jabatan, dan jumlah jabatan
  - Sub Dimensi Formailisasi yang terkait dengan Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja, Mekanisme hubungan antar unit organisasi dan kebijakan-kebijakan organisasi
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan, Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral



- Sub Dimensi Keselarasan yangn terkait dengan Koordinasi antar unit kerja, Keterkaitan proses kerja antar unit kerja yang terkait di dalam organisas dan Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang atau sektoral
- Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait dengan SOTK, proses dan tahapan kerja, dan adanya indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
- Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait dengan kebijakan manajemen risiko yang memadai, identifikasi dan pengukuran risiko-risiko utama organisasi serta sistim monitoring manajemen risiko di dalam organisasi
- Sub Dimensi Teknologi Informasi terkiait dengan dengan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi dan kebijakan IT
- Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat memperbaiki organisasi adalah sebagai berikut :
  - Desain organisasi, tingkatan unit organisasi dan nomenklatur unit organisasi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
  - Perlu ada penetapan tentang mekanisme pelaksanaan tugas & fungsi, mekanisme hubungan antar unit organisasi, SOP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  - Mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan setiap unit kerja, dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah perlu dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
  - Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
  - Penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi, proses dan tahapan kerja dari tingkatan manajemen tertinggi sampai tingkatan menengah ke bawah dengan peraturan perundangan.

- Perlu adanya kebijakan tentang manajemen risiko, identifikasi dan pengukuran risiko-risiko utama organisasi serta sistem monitoring risiko yang memadai di dalam organisasi
- Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi dan kebijakan IT yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

#### 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

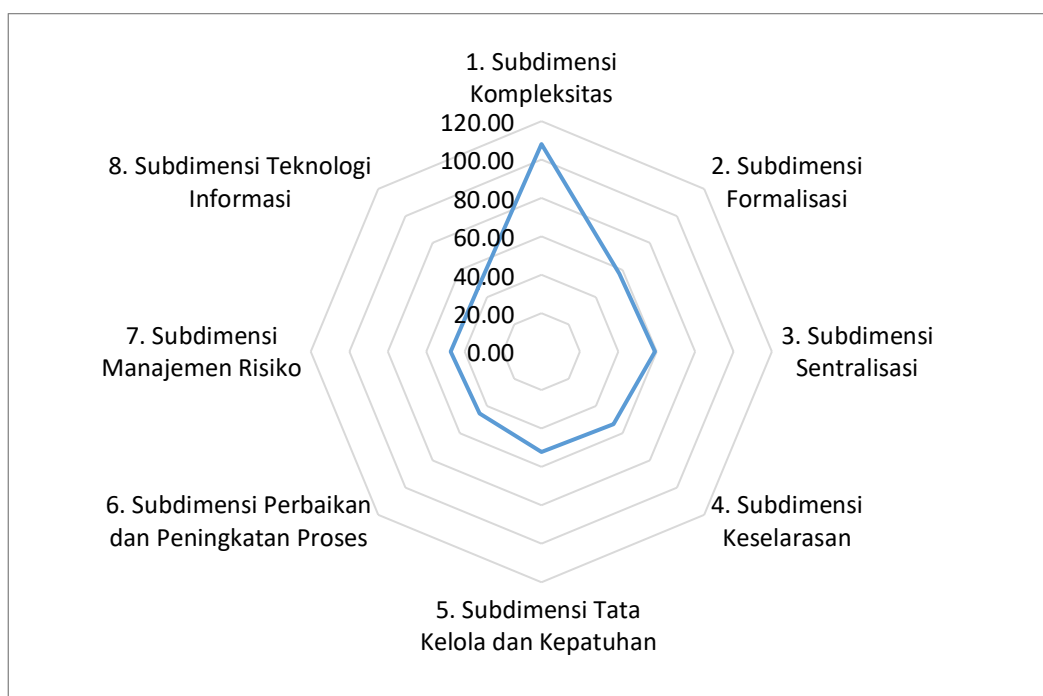


**Gambar 17. Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar**

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian desain organisasi, tingkatan unit organisasi, nomenklatur unit organisasi, jenjang jabatan, dan jumlah jabatan
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja, mekanisme hubungan antar unit organisasi dan kebijakan-kebijakan organisasi
  - Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait dengan adanya indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi

- Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko di dalam organisasi
- Sub Dimensi Teknologi Informasi terkait dengan dengan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi
- Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat memperbaiki kelemahan minor yang ada yaitu :
  - Desain organisasi, tingkatan unit organisasi dan nomenklatur unit organisasi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
  - Perlu ada penetapan tentang mekanisme pelaksanaan tugas & fungsi, mekanisme hubungan antar unit organisasi, SOP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  - Mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan setiap unit kerja, dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah perlu dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
  - Menghilangkan intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
  - Organisasi perlu melaksanakan kebijakan manajemen risiko
  - Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi

**17) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**

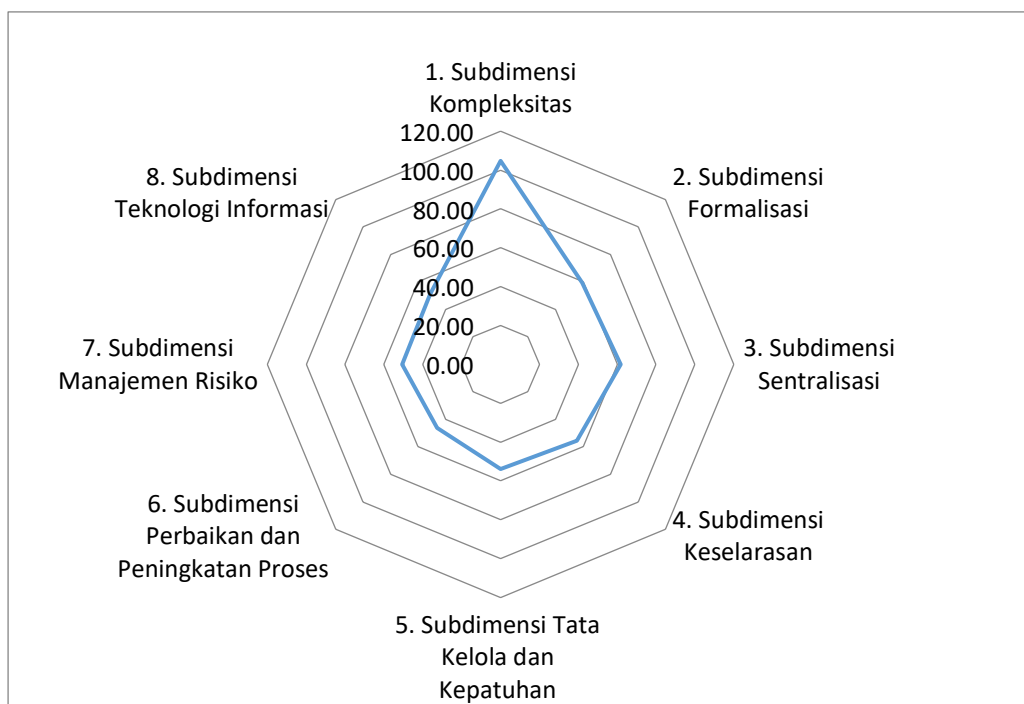


**Gambar 18. Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Banjar**

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian desain organisasi, tingkatan unit organisasi, nomenklatur unit organisasi, jenjang jabatan, dan jumlah jabatan
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi, formalisasi standar pelayanan publik
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan, Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral
  - Sub Dimensi Keselarasan yang terkait dengan Koordinasi antar unit kerja, Keterkaitan proses kerja antar unit kerja yang terkait di dalam organisasi dan Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang atau sektoral
  - Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait dengan SOTK, proses dan tahapan kerja, dan adanya indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
  - Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses yang terkait dengan pengembangan terhadap sistem proses kerja
  - Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait dengan kebijakan manajemen risiko yang memadai, identifikasi dan pengukuran risiko-risiko utama organisasi serta sistem monitoring manajemen risiko di dalam organisasi
  - Sub Dimensi Teknologi Informasi terkait dengan dengan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi dan kebijakan IT
- Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat memperbaiki kelemahan minor yang ada yaitu :
  - Desain organisasi, tingkatan unit organisasi dan nomenklatur unit organisasi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
  - Perlu ada penetapan tentang mekanisme pelaksanaan tugas & fungsi
  - Standar Pelayanan publik perlu diformalkan
  - Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.

- o Mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan setiap unit kerja, dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah perlu dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
- o Penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi, proses dan tahapan kerja dari tingkatan manajemen tertinggi sampai tingkatan menengah ke bawah dengan peraturan perundangan.
- o Menghilangkan intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
- o Organisasi perlu melaksanakan kebijakan manajemen risiko,
- o Melakukan identifikasi dan mengukur risiko-risiko utama organisasi
- o Menetapkan sistem monitoring manajemen risiko di dalam organisasi
- o Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi dan kebijakan IT yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

#### 18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

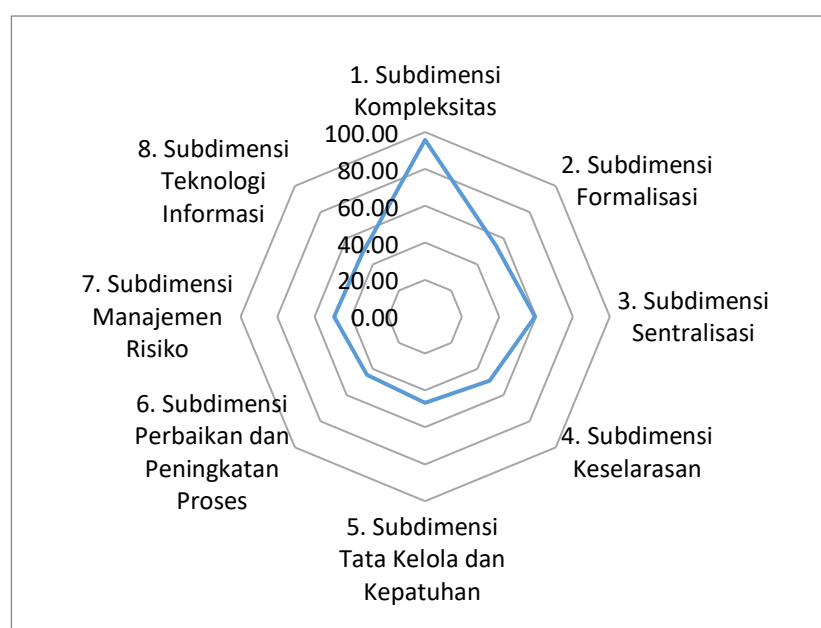


**Gambar 19. Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar**

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :

- Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian disain organisasi, tingkatan unit organisasi, nomenklatur unit organisasi, jenjang jabatan, dan jumlah jabatan
- Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait adanya indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
- Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses yang terkait dengan pengembangan terhadap sistem proses kerja
- Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko di dalam organisasi dan belum adanya sistim monitoring manajemen risiko
- Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat memperbaiki kelemahan minor yang ada yaitu :
  - Desain organisasi, tingkatan unit organisasi dan nomenklatur unit organisasi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Menghilangkan intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
  - Organisasi agar selalu melakukan pengembangan terhadap sistem proses kerja.
  - Organisasi perlu melaksanakan kebijakan manajemen risiko
  - Menerapkan sistim monitoring manajemen risiko di dalam organisasi

### 19) Dinas Pertanian



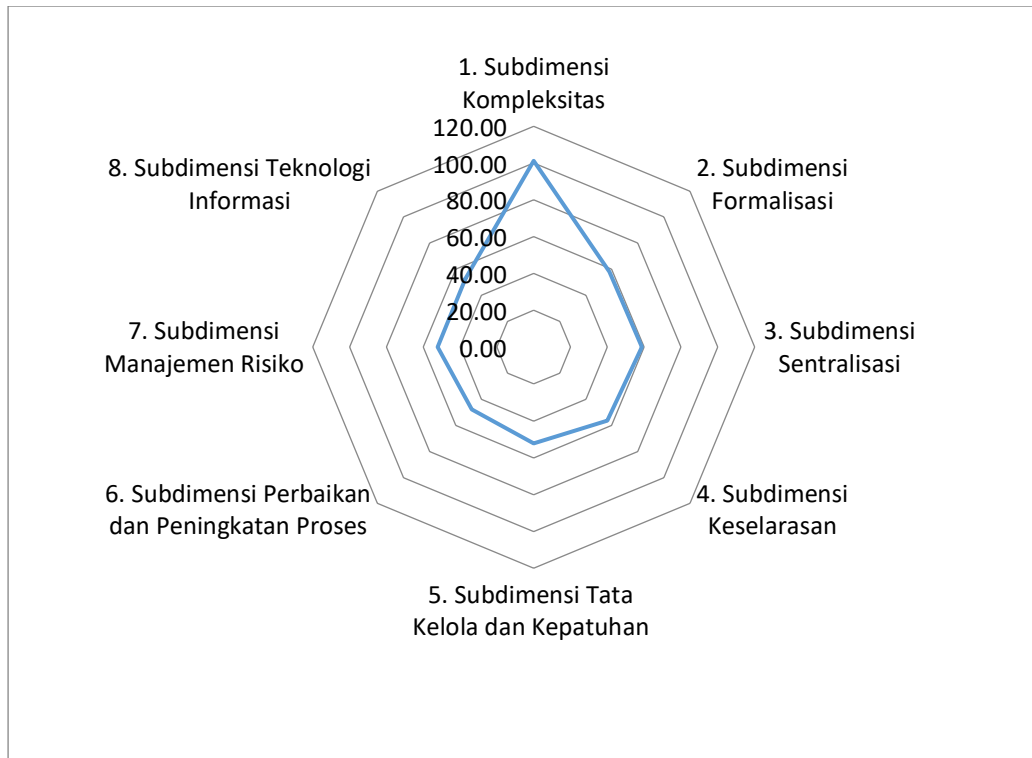
**Gambar 20. Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar**

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian desain organisasi, tingkatan organisasi, Instansi vertikal/kantor regional/UPT, adanya indikasi bahwa desain organisasi yang ada saat ini kompleks, jenjang jabatan, dan jumlah jabatan
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan Tugas dan fungsi unit organisasi, Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi, Rencana strategis dan kebijakan-kebijakan organisasi
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan dan Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral
  - Sub Dimensi Keselarasan yang terkait dengan Koordinasi antar unit kerja dan koordinasi organisasi lintas bidang atau sektoral yang tidak terlaksana dengan baik
  - Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait dengan penyesuaian SOTK, dan adanya indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
  - Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses yang terkait dengan pembaharuan SOP
  - Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko di dalam organisasi dan sistem monitoring manajemen risiko
  - Sub Dimensi Teknologi Informasi terkait dengan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi dan kebijakan IT (eGovernment) yang memadai
- Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat memperbaiki kelemahan minor yang ada yaitu :
  - Desain organisasi, tingkatan unit organisasi dan Instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Jumlah instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang dibentuk menunjukkan indikasi tidak mencukupi kebutuhan minimum yang diperlukan sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Perlu dilakukan penyederhanaan disain organisasi
- Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
- Tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja
- Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
- Rencana strategis dan kebijakan organisasi agar dituangkan secara jelas di dalam keputusan resmi organisasi
- Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
- Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral agar dituangkan dalam Keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.
- Penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi, proses dan tahapan kerja dari tingkatan manajemen tertinggi sampai tingkatan menengah ke bawah dengan peraturan perundangan.
- Menghilangkan intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
- Organisasi perlu melaksanakan kebijakan manajemen risiko,
- Menerapkan sistim monitoring manajemen risiko di dalam organisasi
- Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi dan kebijakan IT (eGovernment) yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.



## 20) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

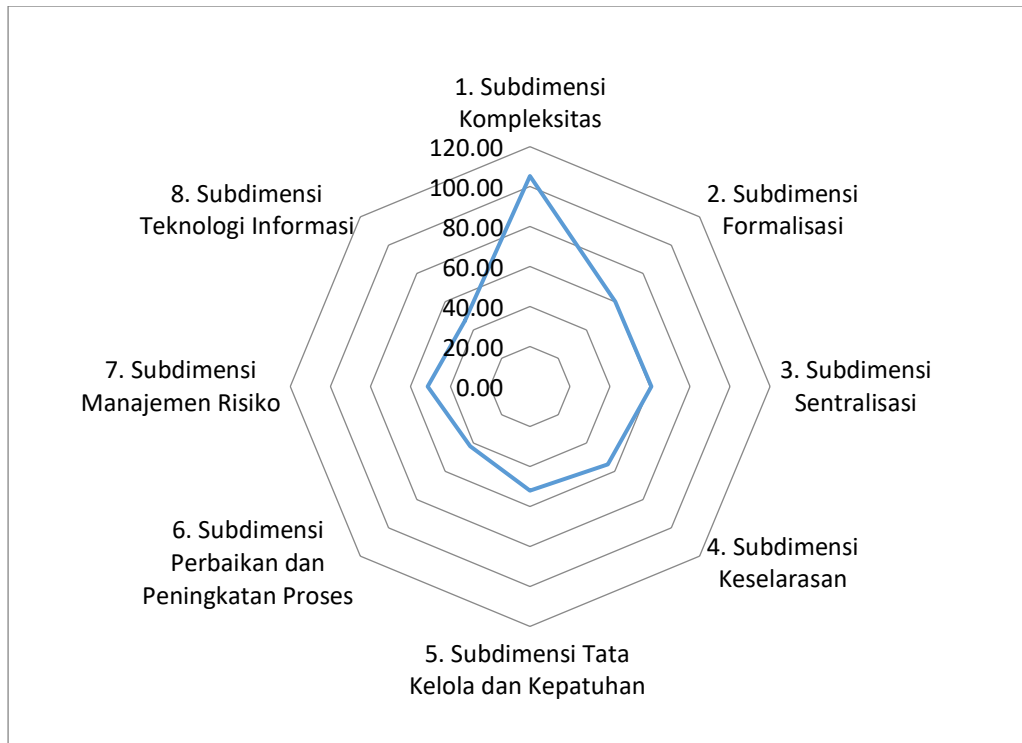


**Gambar 21. Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjarnegara**

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian desain organisasi, tingkatan organisasi, Instansi vertikal/kantor regional/UPT, adanya indikasi bahwa desain organisasi yang ada saat ini kompleks, jenjang jabatan, dan jumlah jabatan
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan Tugas dan fungsi unit organisasi, Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi, Rencana strategis dan kebijakan-kebijakan organisasi
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan dan Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral
  - Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait adanya indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
  - Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait sistem monitoring manajemen risiko

- Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat memperbaiki kelemahan minor yang ada yaitu :
  - Desain organisasi, tingkatan unit organisasi dan Instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Jumlah instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang dibentuk menunjukkan indikasi tidak mencukupi kebutuhan minimum yang diperlukan sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - Perlu dilakukan penyederhanaan disain organisasi
  - Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
  - Tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja
  - Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
  - Rencana strategis dan kebijakan organisasi agar dituangkan secara jelas di dalam keputusan resmi organisasi
  - Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
  - Menghilangkan intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
  - Menerapkan sistim monitoring manajemen risiko di dalam organisasi

## 21) Satuan Polisi Pamong Praja



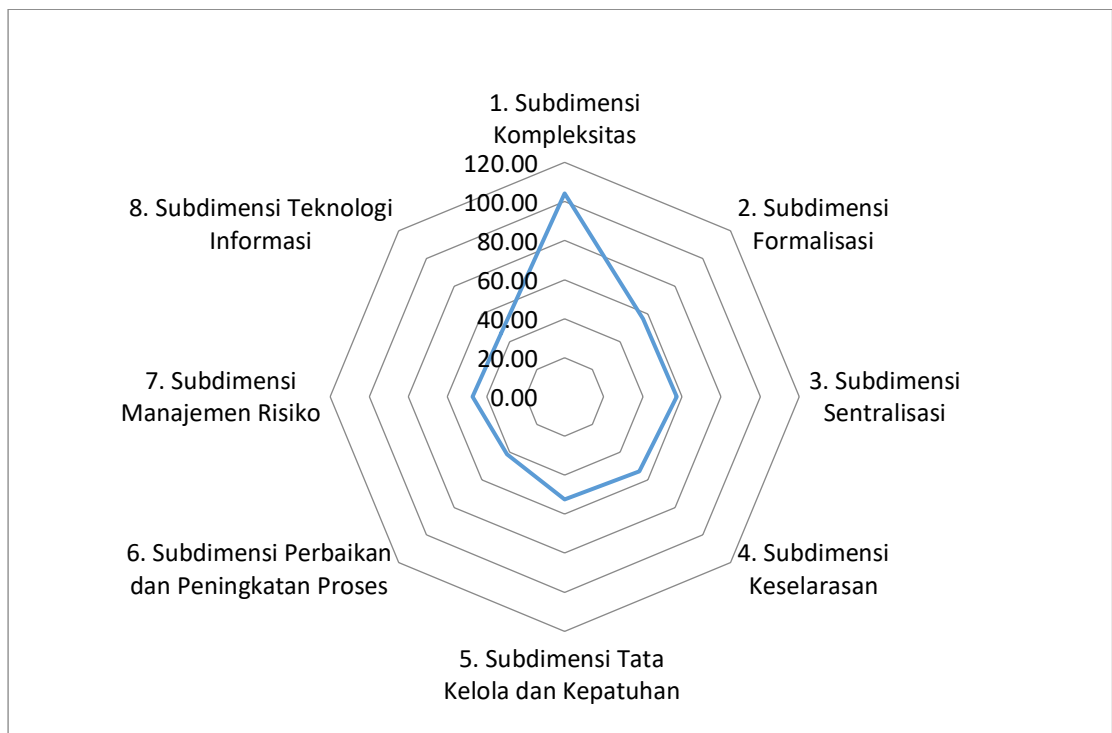
**Gambar 22. Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar**

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian desain organisasi, tingkatan organisasi, Instansi vertikal/kantor regional/UPT, adanya indikasi bahwa desain organisasi yang ada saat ini kompleks, jenjang jabatan, dan jumlah jabatan
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan Tugas dan fungsi unit organisasi, Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi, dan Proses Kerja
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan dan Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral
  - Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait adanya penyesuaian SOTK, dan adanya indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
  - Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses yang terkait dengan pembaharuan SOP

- Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait dengan kebijakan manajemen risiko yang memadai, identifikasi dan pengukuran risiko-risiko utama organisasi serta sistem monitoring manajemen risiko di dalam organisasi
- Sub Dimensi Teknologi Informasi terkait dengan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi dan kebijakan IT (eGovernment) yang memadai
- Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat memperbaiki kelemahan minor yang ada yaitu :
  - Desain organisasi, tingkatan unit organisasi dan Instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Jumlah instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang dibentuk menunjukkan indikasi tidak mencukupi kebutuhan minimum yang diperlukan sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - Perlu dilakukan penyederhanaan desain organisasi
  - Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
  - Tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja
  - Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
  - Rencana strategis dan kebijakan organisasi agar dituangkan secara jelas di dalam keputusan resmi organisasi
  - Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
  - Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral agar dituangkan dalam Keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.
  - Penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi, proses dan tahapan kerja dari tingkatan manajemen tertinggi sampai tingkatan menengah ke bawah dengan peraturan perundangan.
  - Menghilangkan intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
  - Organisasi perlu melaksanakan kebijakan manajemen risiko

- Melakukan identifikasi dan mengukur risiko-risiko utama organisasi
- Menerapkan sistem monitoring manajemen risiko di dalam organisasi
- Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi dan kebijakan IT (eGovernment) yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

## 22) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

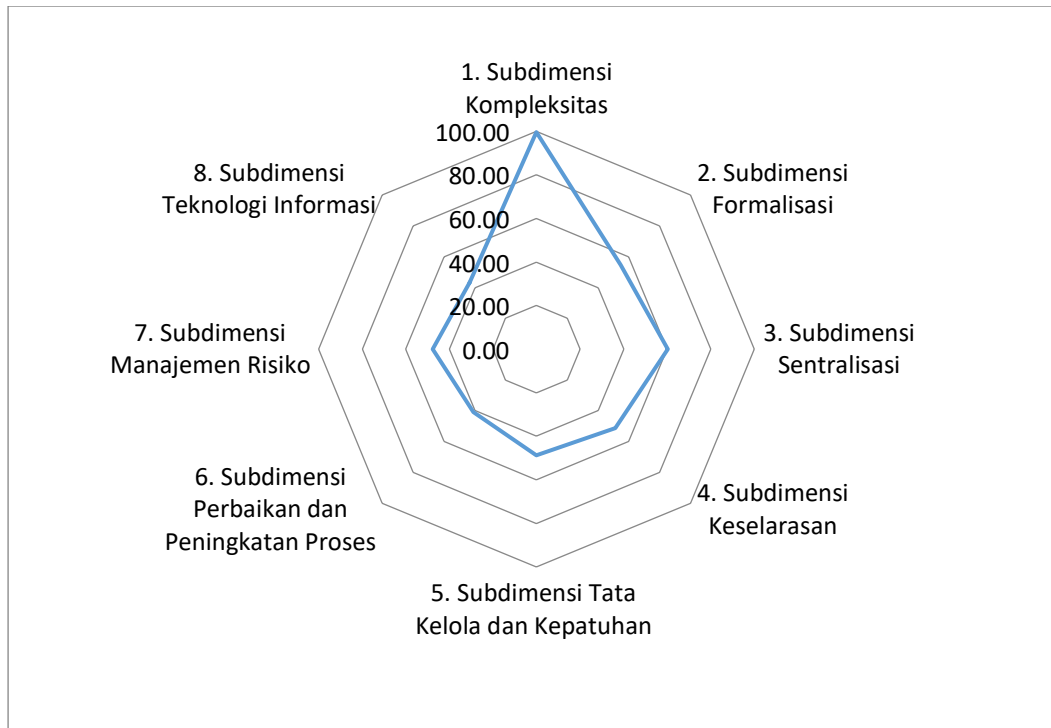


**Gambar 23. Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar**

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian desain organisasi, tingkatan organisasi, jenjang jabatan, dan jumlah jabatan
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan Tugas dan fungsi unit organisasi, Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi, dan Proses Kerja
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan dan Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral
  - Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses yang terkait dengan pembaharuan SOP dan pengembangan proses kerja

- Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait dengan kebijakan manajemen risiko yang memadai, identifikasi dan pengukuran risiko-risiko utama organisasi, pelaksanaan manajemen resiko serta sistim monitoring manajemen risiko di dalam organisasi
- Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat memperbaiki kelemahan minor yang ada yaitu :
  - Desain organisasi, tingkatan unit organisasi perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
  - Tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja
  - Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
  - Seluruh proses kerja agar dituangkan secara sistematis di dalam peraturan tentang standar operasional prosedur.
  - Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
  - Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral agar dituangkan dalam Keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.
  - Standar operasional prosedur agar selalu diperbarui secara periodik dan Organisasi selalu melakukan pengembangan terhadap sistem proses kerja
  - Organisasi membuat dan melaksanakan kebijakan manajemen risiko
  - Melakukan identifikasi dan mengukur risiko-risiko utama organisasi
  - Menerapkan sistim monitoring manajemen risiko di dalam organisasi

### 23) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan



**Gambar 24. Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar**

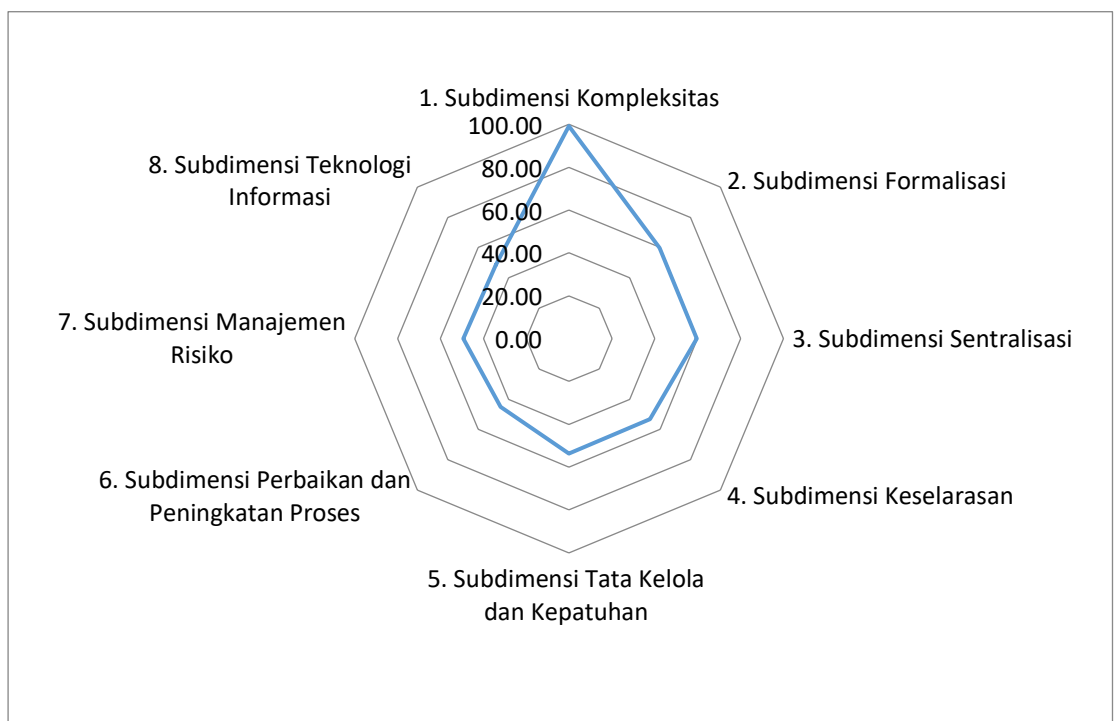
- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian desain organisasi, tingkatan organisasi, nomenklatur organisasi, adanya indikasi desain organisasi bersifat kompleks, jenjang jabatan, dan jumlah jabatan yang belum sesuai kebutuhan
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan Tugas dan fungsi unit organisasi, Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi, Rencana Strategis dan Proses Kerja
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan dan Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral
  - Sub Dimensi Keselarasan yang terkait dengan Koordinasi antar unit kerja, Keterkaitan proses kerja lintas bidang atau sektoral dan Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang atau sektoral

- Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan yang terkait dengan kesesuaian tahapan pekerjaan yang terdapat di dalam proses kerja pada tingkatan manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah dan kejelasan fungsi, struktur, dan penanggung jawab pekerjaan (akuntabilitas).
- Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses yang terkait dengan pembaharuan SOP dan pengembangan proses kerja
- Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait dengan kebijakan manajemen risiko yang memadai, identifikasi dan pengukuran risiko-risiko utama organisasi, serta sistem monitoring manajemen risiko di dalam organisasi
- Sub Dimensi Teknologi Informasi terkait dengan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi dan kebijakan IT (eGovernment) yang memadai
- Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat memperbaiki kelemahan minor yang ada yaitu :
  - Desain organisasi, tingkatan unit organisasi dan Instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Perlu dilakukan penyederhanaan disain organisasi
  - Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
  - Tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja
  - Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
  - Rencana strategis dan kebijakan organisasi agar dituangkan secara jelas di dalam keputusan resmi organisasi
  - Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
  - Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral agar dituangkan dalam Keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.
  - Koordinasi antar unit kerja, Keterkaitan proses kerja lintas bidang atau sektoral dan Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang atau sektoral agar dapat diatur dan dilaksanakan dengan baik.



- o Menyesuaikan dan memperjelas tahapan pekerjaan yang terdapat di dalam proses kerja padaa tingkatan manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah dan kejelasan fungsi, struktur, dan penanggung jawab pekerjaan (akuntabilitas).
- o Organisasi perlu melakukan pembaharuan terhadap SOP mengembangkan proses kerja secara periodik
- o Menerapkan sistim monitoring manajemen risiko di dalam organisasi, melakukan identifikasi dan pengukuran risiko-risiko utama organisasi, serta menjalankan sistim monitoring manajemen risiko di dalam organisasi
- o Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi dan kebijakan IT (eGovernment) yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

#### 24) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah



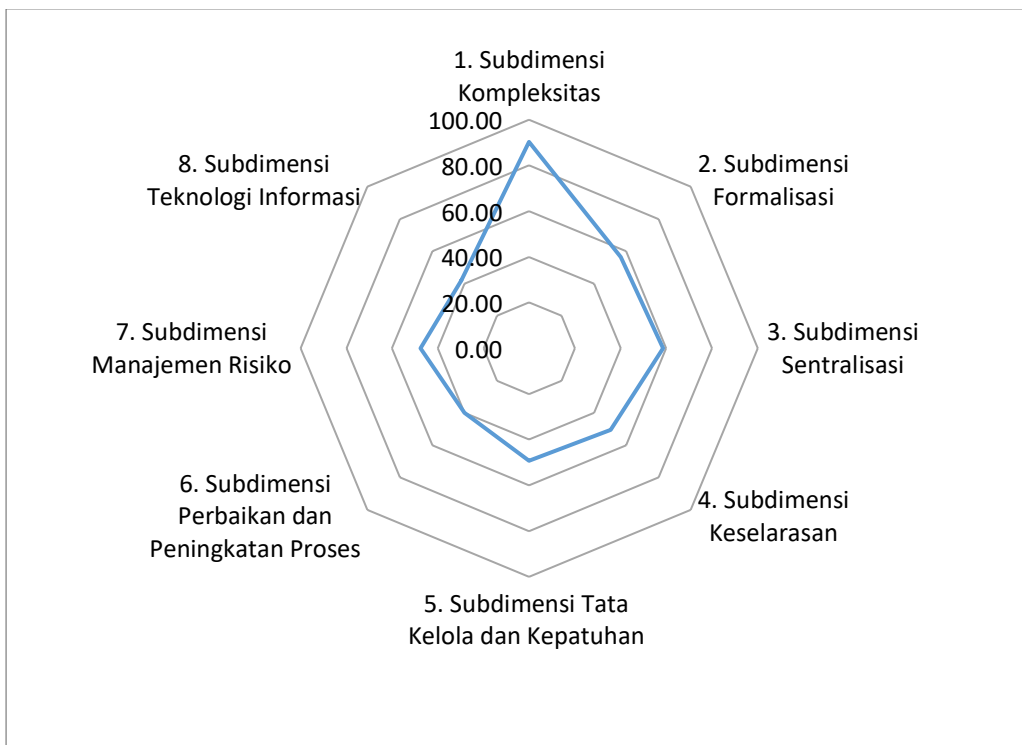
**Gambar 25. Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar**

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :

- Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian disain organisasi, tingkatan organisasi, nomenklatur organisasi, dan adanya indikasi desain organisasi bersifat kompleks
- Sub Dimensi Formailisasi yang terkait dengan Tugas dan fungsi unit organisasi, Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi, dan Mekanisme hubungan antar unit organisasi
- Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan dan Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral
- Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses yang terkait dengan pembaharuan SOP dan pengembangan proses kerja
- Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait dengan kebijakan manajemen risiko yang memadai, identifikasi dan pengukuran risiko-risiko utama organisasi, serta sistim monitoring manajemen risiko di dalam organisasi
- Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat memperbaiki kelemahan minor yang ada yaitu :
  - Desain organisasi, tingkatan unit organisasi dan Nomenklatur organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Perlu dilakukan penyederhanaan disain organisasi
  - Tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja
  - Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
  - Mekanisme hubungan antar unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.
  - Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
  - Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral agar dituangkan dalam Keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.
  - Organisasi perlu melakukan pembaharuan terhadap SOP mengembangkan proses kerja secara periodik

- Menerapkan sistim monitoring manajemen risiko di dalam organisasi, melakukan identifikasi dan pengukuran risiko-risiko utama organisasi, serta menjalankan sistim monitoring manajemen risiko di dalam organisasi

## 25) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



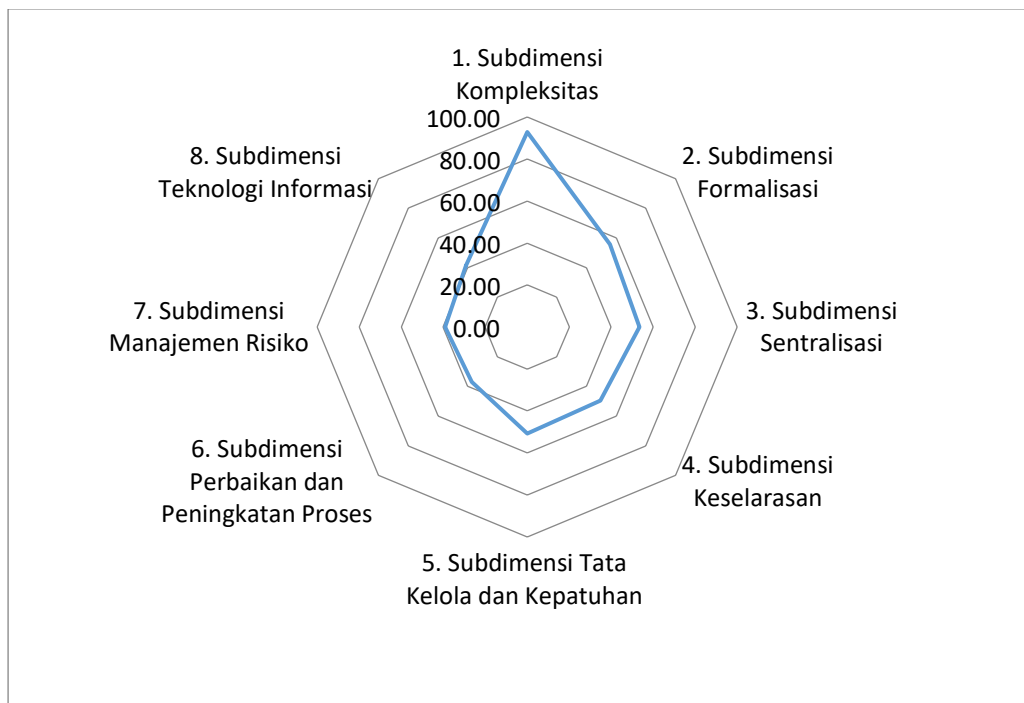
**Gambar 26. Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar**

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P3 (Cukup Efektif). Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai cukup mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan cukup mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi memiliki berbagai kelemahan yang dapat menyebabkan peringkatnya menurun apabila organisasi tidak segera melakukan tindakan korektif secara sistematis. Perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan adalah dalam hal :
  - Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian disain organisasi, tingkatan unit organisasi, nomenklatur unit organisasi, jenjang jabatan, dan jumlah jabatan
  - Sub Dimensi Formailisasi yang terkait dengan Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja, Mekanisme hubungan antar unit organisasi dan kebijakan-kebijakan organisasi dan proses kerja

- Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan, Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral
- Sub Dimensi Keselarasan yangn terkait dengan Koordinasi antar unit kerja, Keterkaitan proses kerja antar unit kerja yang terkait di dalam organisas dan Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang atau sektoral
- Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait dengan SOTK, proses kerja yang terkait dengan kebutuhan informasi publik dan tidak bersifat rahasia
- Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses yang terkait dengan pengembangan proses kerja
- Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait dengan kebijakan manajemen risiko yang memadai, identifikasi dan pengukuran risiko-risiko utama organisasi serta sistim monitoring manajemen risiko di dalam organisasi
- Sub Dimensi Teknologi Informasi terkiait dengan dengan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi dan kebijakan IT (eGovernment) Yang Memadai
- Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat memperbaiki organisasi adalah sebagai berikut :
  - Desain organisasi, tingkatan unit organisasi dan Instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
  - Tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja
  - Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
  - Mekanisme hubungan antar unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.
  - Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
  - Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral agar dituangkan dalam Keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.

- Koordinasi antar unit kerja, Keterkaitan proses kerja lintas bidang atau sektoral dan Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang atau sektoral agar dapat diatur dan dilaksanakan dengan baik.
- Penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi, proses dan tahapan kerja dari tingkatan manajemen tertinggi sampai tingkatan menengah ke bawah dengan peraturan perundangan.
- Organisasi perlu mengembangkan proses kerja secara periodik
- Membuat kebijakan terkait manajemen risiko, Menerapkan sistim monitoring manajemen risiko di dalam organisasi, melakukan identifikasi dan pengukuran risiko-risiko utama organisasi.
- Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi dan kebijakan IT (eGovernment) yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

## 26) Badan Penanggulangan Bencana Daerah



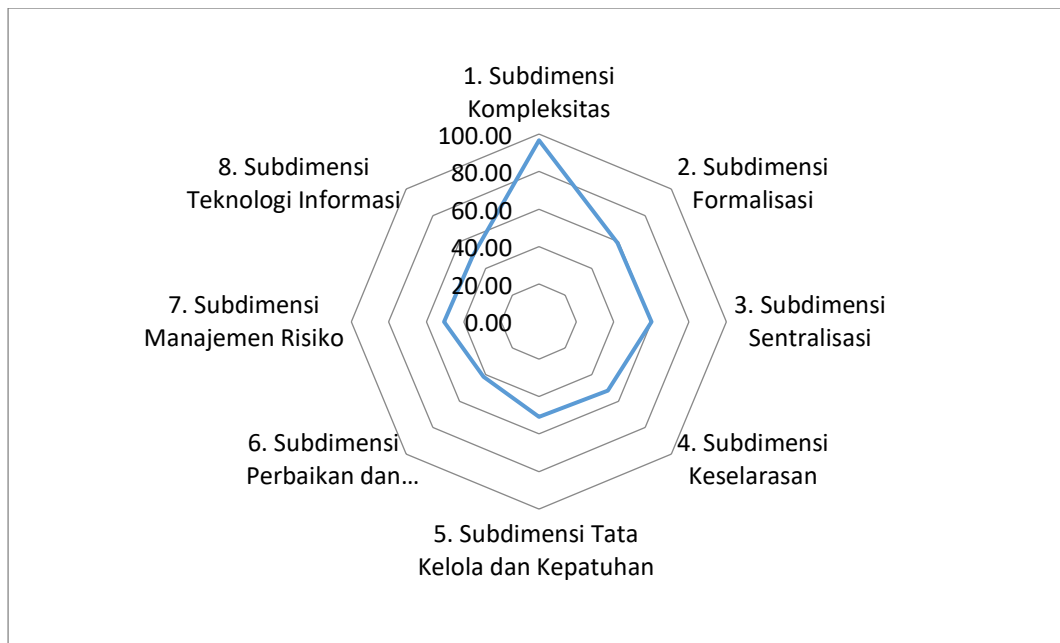
**Gambar 27. Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara**

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P3 (Cukup Efektif). Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai cukup mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan cukup mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi memiliki berbagai kelemahan yang dapat menyebabkan

peringkatnya menurun apabila organisasi tidak segera melakukan tindakan korektif secara sistematis. Perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan adalah dalam hal :

- Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan Penataan perangkat daerah telah ditetapkan sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan
- Sub Dimensi Formailisasi yang terkait dengan Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja
- Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan
- Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait dengan Pelaksanaan manajemen resiko di dalam organisasi, kebijakan manajemen risiko yang memadai, identifikasi dan pengukuran risiko-risiko utama organisasi serta sistim monitoring manajemen risiko di dalam organisasi
- Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat memperbaiki organisasi adalah sebagai berikut :
  - Perlu ada Penataan perangkat daerah telah ditetapkan sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
  - Tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja
  - Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
  - Mekanisme hubungan antar unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.
  - Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
  - Membuat kebijakan terkait manajemen risiko, Menerapkan sistim monitoring manajemen risiko di dalam organisasi, melakukan identifikasi dan pengukuran risiko-risiko utama organisasi.

## 27) RSUD Ratu Zaleha



**Gambar 28. Grafik Radar Evaluasi Kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar**

- OPD ini masuk ke dalam kategori komposit P4 (Efektif). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor seperti :
  - Sub Dimensi Kompleksitas terkait dengan penyesuaian desain organisasi, tingkatan organisasi, Instansi vertikal/kantor regional/UPT, adanya indikasi bahwa desain organisasi yang ada saat ini kompleks, jenjang jabatan, dan jumlah jabatan
  - Sub Dimensi Formalisasi yang terkait dengan Tugas dan fungsi unit organisasi, Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi, Rencana strategis dan kebijakan-kebijakan organisasi
  - Sub Dimensi Sentralisasi yang terkait dengan kewenangan pengambilan keputusan dan Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral
  - Sub Dimensi Keselarasan yang terkait dengan Koordinasi antar unit kerja dan koordinasi organisasi lintas bidang atau sektoral yang tidak terlaksana dengan baik
  - Sub Dimensi Tata Kelola dan Kepatuhan, yang terkait adanya penyesuaian SOTK, dan adanya indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi

- Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses yang terkait dengan pembaharuan SOP
- Sub Dimensi Manajemen Risiko terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko di dalam organisasi dan sistim monitoring manajemen risiko
- Sub Dimensi Teknologi Informasi terkait dengan rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi dan kebijakan IT (eGovernment) yang memadai
- Rekomendasi yang dapat diberikan untuk dapat memperbaiki kelemahan minor yang ada yaitu :
  - Desain organisasi, tingkatan unit organisasi dan Instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Jumlah instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang dibentuk menunjukkan indikasi tidak mencukupi kebutuhan minimum yang diperlukan sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - Perlu ada penyesuaian jenjang dan jumlah jabatan yang sesuai kebutuhan.
  - Tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja
  - Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.
  - Rencana strategis dan kebijakan organisasi agar dituangkan secara jelas di dalam keputusan resmi organisasi
  - Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi.
  - Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral agar dituangkan dalam Keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.
  - Penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi, proses dan tahapan kerja dari tingkatan manajemen tertinggi sampai tingkatan menengah ke bawah dengan peraturan perundangan.
  - Menghilangkan intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi
  - Organisasi perlu melaksanakan kebijakan manajemen risiko,



- Menerapkan sistem monitoring manajemen risiko di dalam organisasi
- Organisasi harus merancang arsitektur penerapan teknologi informasi dan kebijakan IT (eGovernment) yang jelas, memadai dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

#### **4.2. Hasil Analisis Kualitatif**

- Adanya kendala berupa struktur organisasi yang tidak linier dengan struktur yang ada di provinsi dan di pusat sehingga terjadi banyak kendala operasional, pembagian tugas antar bidang menjadi tidak seimbang dan terdapat satu bidang yang mengampu banyak sub-bidang.
- Kajian ini telah menunjukkan kebutuhan akan analisis lebih mendalam yang mengidentifikasi bidang pertanahan dengan dua kementerian sebagai potensi sumber kendala.
- Kajian lanjutan yang lebih rinci diperlukan untuk menganalisa beban kerja untuk setiap bidang, mengevaluasi struktur organisasi, keseimbangan tugas antar bidang dan evaluasi untuk peningkatan SDM dan manajerial.
- Hasil kajian telah memberikan gambaran kondisi kompleksitas di seluruh OPD yang menjadi sampel dan hasil kajian kepada OPD yang dianggap efektif, menunjukkan bahwa tetap perlu dilakukan langkah perbaikan pada struktur organisasi dan pembagian tugas.
- Skor kompleksitas yang tinggi setelah penggabungan, menunjukkan perlu evaluasi tersendiri untuk memahami operasional tiap Dinas.

## BAB 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kuantitatif dan kualitatif maka hasil kajian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran nilai komposit :
  - 1 OPD masuk kategori komposit P-5 (Sangat Efektif)
  - 23 OPD masuk kategori komposit P-4 (Efektif)
  - 3 OPD masuk kategori komposit P-3 (Cukup Efektif)
2. Kendala/permasalahan yang ada di sub dimensi kompleksitas berupa :
  - Kesesuaian disain organisasi yaitu sebanyak 23 OPD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - Kesesuaian tingkatan unit organisasi yang ada saat ini dengan tugas dan fungsinya dari tingkatan unit organisasi paling atas sampai tingkatan unit organisasi paling bawah sebanyak 20 OPD.
3. Kendala /permasalahan yang ada di sub dimensi sentralisasi berupa :
  - Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi sebanyak 20 OPD.
  - Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral belum dituangkan dalam Keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk sebanyak 14 OPD.
4. Kendala/permasalahan yang ada di sub dimensi keselarasan berupa :
  - Keterkaitan proses kerja antar unit kerja yang terkait di dalam organisasi belum dipetakan/didokumentasikan dengan baik sebanyak 10 OPD
  - Koordinasi antar unit kerja tidak selalu dilakukan dengan baik di dalam setiap pelaksanaan tugas yang melibatkan unit kerja lain di dalam organisasi sebanyak 9 OPD.
  - Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang atau sektoral yang terkait belum terlaksana dengan baik sebanyak 8 OPD.
5. Kendala/permasalahan yang ada di sub dimensi Tata Kelola Dan Kepatuhan berupa:
  - Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi dari tingkatan manajemen tertinggi sampai tingkatan menengah ke bawah belum sesuai dengan peraturan perundangan sebanyak 8 OPD.

- Terdapat indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi, baik pada tingkatan manajemen tertinggi sampai dengan manajemen menengah ke bawah sebanyak 14 OPD.
  - Adanya indikasi proses kerja yang belum memiliki sistem dan mekanisme pertanggungjawaban (termasuk pelaporan) yang jelas (tanggung jawab) sebanyak 3 OPD.
  - Setiap tahapan pekerjaan yang terdapat di dalam proses kerja pada tingkatan manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah belum memiliki kesesuaian dan kejelasan fungsi, struktur, dan penanggung jawab pekerjaan (akuntabilitas) sebanyak 2 OPD.
6. Kendala/permasalahan yang ada di sub dimensi Perbaikan Dan Peningkatan Proses berupa:
- Standar operasional prosedur tidak diperbarui secara periodik sebanyak 10 OPD.
  - Organisasi tidak selalu melakukan pengembangan terhadap sistem proses kerja sebanyak 8 OPD.
  - Terdapat indikasi bahwa organisasi lebih berorientasi pada hal-hal yang bersifat rutinitas dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat strategis sebanyak 1 OPD.
7. Kendala/permasalahan yang ada di sub dimensi Manajemen Resiko berupa :
- Organisasi belum memiliki kebijakan manajemen risiko yang memadai sebanyak 13 OPD.
  - Risiko-risiko utama organisasi belum diidentifikasi dengan baik sebanyak 9 OPD.
  - Risiko-risiko utama organisasi yang telah diidentifikasi belum diukur (peluang terjadinya maupun dampaknya) dengan metode yang memadai sebanyak 9 OPD.
  - Organisasi belum melaksanakan kebijakan manajemen risiko sebanyak 7 OPD.
  - Organisasi belum memiliki sistem monitoring risiko yang memadai sebanyak 15 OPD.
8. Kendala/permasalahan yang ada di sub dimensi Teknologi Informasi berupa :
- Organisasi belum memiliki rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi sebanyak 14 OPD.
  - Organisasi belum memiliki kebijakan IT (e-government) yang memadai sebanyak 16 OPD

- Seluruh informasi publik terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi belum dipublikasikan secara periodik di dalam website organisasi sebanyak 3 OPD.
9. Diperlukan kajian lebih lanjut dengan fokus kajian pada beban kerja, restrukturisasi organisasi, dan evaluasi SDM serta manajerial pada semua OPD untuk meningkatkan efektivitas operasional.

## Daftar Pustaka

- Budihardjo, A. 2011. *Organisasi: Menuju Pencapaian Kinerja Optimum*. Jakarta: Prasetiya Mulya.
- Dwiyanto, A. 2015. *Reformasi Birokrasi Kontekstual*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mintzberg, H. 1980. Structure in 5's: A Synthesis of the Research on Organization Design. *Management Science*, 26(3), 322-341.
- Mintzberg, H. 1993. *Structure in Fives: Designing Effective Organizations*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Osborne, D. 1993. Reinventing Government. *Public Productivity and Management Review*, 16 (4), 349-356.
- Osborne, D., & Plastrik, P. 1997. *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government*. Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Permenpan No. 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Perbup Kab. Banjar No. 56 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Martapura
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. 2016. *Perilaku Organisasi. Edisi 16*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutiyo, S. and Maharjan, KeshavLall (2012) Decentralized System and Budget Allocation for Rural Development in Indonesia A Case study of Purbalingga District, Central Java Province. *Journal of Rural Economics special issue* 2012. hal. 403-409.

**Lampiran 1. Susunan Organisasi Tim Peneliti/Pelaksana dan Pembagian Tugas**

No	Nama / NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/mg)	Uraian Tugas
1	Dr. Nurul Listiyani, SH, MH	Universitas Islam Kalimantan - MAB Banjarmasin	Hukum	10 jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasi proses pengambilan data, pengumpulan data, analisis data, penyusunan interpretasi data, dan penyusunan laporan penelitian.</li> <li>- Mengkoordinasi persiapan instrument penelitian, perlengkapan penelitian, dan instrument penunjang.</li> <li>- Mengkoordinasi penyusunan laporan akhir penelitian, publikasi hasil penelitian dalam seminar nasional/ prosiding.</li> <li>- Bertanggung jawab terhadap hasil pelaporan penelitian mulai dari laporan harian, laporan kemajuan, laporan akhir dan penggunaan anggaran penelitian</li> </ul>
3	Dr. Achmad Jaelani, SPt, Msi	Universitas Islam Kalimantan - MAB Banjarmasin	Peternakan	8 jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu ketua dalam proses pengambilan data, pengumpulan data, analisis data, penyusunan interpretasi data, dan penyusunan laporan penelitian.</li> <li>- Membantu ketua dalam persiapan instrument penelitian dan perlengkapan penelitian.</li> <li>- Membantu ketua dalam penyusunan laporan akhir penelitian</li> <li>- Turut bertanggung jawab terhadap hasil pelaporan penelitian mulai dari laporan harian, laporan kemajuan, laporan akhir dan penggunaan anggaran penelitian</li> </ul>
2	Irfan, S.T, M.T	Universitas Islam Kalimantan - MAB Banjarmasin	Teknik Elektro	8 jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu ketua dalam proses pengambilan data, pengumpulan data, analisis data, penyusunan interpretasi data, dan penyusunan laporan penelitian.</li> <li>- Membantu ketua dalam persiapan instrument penelitian dan perlengkapan penelitian.</li> <li>- Membantu ketua dalam penyusunan laporan akhir penelitian</li> <li>- Turut bertanggung jawab terhadap hasil pelaporan penelitian mulai dari laporan harian, laporan kemajuan, laporan akhir dan penggunaan anggaran penelitian</li> </ul>

No	Nama / NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/mg)	Uraian Tugas
4	Rizka Zulfikar, STp, MM	Universitas Islam Kalimantan - MAB Banjarmasin	Manajemen	8 jam/minggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu ketua dalam proses pengambilan data, pengumpulan data, analisis data, penyusunan interpretasi data, dan penyusunan laporan penelitian.</li> <li>- Membantu ketua dalam persiapan instrument penelitian dan , perlengkapan penelitian</li> <li>- Membantu ketua dalam penyusunan laporan akhir</li> <li>- Turut bertanggung jawab terhadap hasil pelaporan penelitian mulai dari laporan harian, laporan kemajuan, laporan akhir dan penggunaan anggaran penelitian</li> </ul>

## Lampiran 2. Identitas Tim Pelaksana Kajian

### 1. Ketua Pelaksana

- a. Nama dan Gelar Akademik : Dr. Nurul Listyaningsih, SH, MH. C.Me
- b. Pangkat/ Golongan/NIP : Pembina /IVa
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Bidang Keahlian : Hukum
- e. Fakultas/Program Studi/Pusat : Hukum/Ilmu Hukum

### 2. Anggota Pelaksana 1 :

- a. Nama dan Gelar Akademik : Dr. Achmad Jaelani, S.Pt, MP
- b. Pangkat/ Golongan/NIP : Pembina Madya/IVC
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Bidang Keahlian : Peternakan
- e. Fakultas/Program Studi/Pusat : Pertanian/ Peternakan

### 3. Anggota Pelaksana 2 :

- a. Nama dan Gelar Akademik : Irfan, S.T, M.T
- b. Pangkat/ Golongan/NIP : Penata Madya/IIId
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Bidang Keahlian : Teknik Elektro
- e. Fakultas/Program Studi/Pusat : Teknik/Teknik Elektro

### 4. Anggota Pelaksana 3 :

- a. Nama dan Gelar Akademik : Rizka Zulfikar, S.Tp, MM
- b. Pangkat/ Golongan/NIP : Penata /IIIc
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Bidang Keahlian : Manajemen
- e. Fakultas/Program Studi/Pusat : Ekonomi/Manajemen



### Lampiran 3. Penawaran Kerjasama dan Kerangka Acuan Kerja



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan. A. Yani No. 2 Telp. (0511) 4721504, Fax. (0511) 4721453 Martapura  
Website : [www.bappedalitbang.banjarkab.go.id](http://www.bappedalitbang.banjarkab.go.id), Email : [bappedalitbang@banjarkab.go.id](mailto:bappedalitbang@banjarkab.go.id)

Martapura, 29 Mei 2023

Nomor : 000.9/452/PPI/Bappedalitbang/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penawaran Kerjasama Swakelola

Kepada Yth.  
Kepala Lembaga Penelitian  
dan Pengabdian Kepada  
Masyarakat Universitas Islam  
Kalimantan Muhammed  
Arsyad Al Banjari

di -

Banjarmasin

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar pada Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi, yang dilaksanakan menggunakan Metode Swakelola Tipe III, dengan ini kami menawarkan kepada Bapak/Ibu untuk melaksanakan pekerjaan berupa Kajian/penelitian terkait **Evaluasi Kelembagaan**.

Bersama surat ini, kami sampaikan juga Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai bahan kajian awal. Untuk tindak lanjut pelaksanaan kegiatan ini, diminta segera memasukkan Usulan Proposal, Teknis dan Blaya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Bappedalitbang  
Kabupaten Banjar

Dra. Hj. SITI HAMIDAH, M. Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631224 198503 2 006



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang terverifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Document is best displayed when viewed electronically and printed by the Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



### KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan Pemerintahan	: 5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan	: 5.05	Penelitian dan Pengembangan
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Program	: 5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kegiatan	: 5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Waktu Pelaksanaan	: Juni s.d November	
Jumlah Anggaran	: Rp. 100.000.000,- ( <i>Seratus Juta Juta Rupiah</i> )	
Kode Rekening	: 5.1.02.02.09 / Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	
Tahun	: 2023	
Pelaksana	: Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

## **EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BANJAR**

### **A. LATAR BELAKANG**

#### **- GAMBARAN UMUM**

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan harapan semua pihak. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Merujuk peraturan tersebut, bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan mengevaluasi struktur, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja.

Kehadiran organisasi perangkat daerah secara umum dipandang belum mampu memberikan dukungan maksimal terkait dengan pelaksanaan program otonomi daerah. Secara normatif pembentukan organisasi perangkat daerah telah mengakomodasi ketentuan yang berlaku, namun dalam kenyataannya, organisasi yang ada justru memberikan beban keuangan bagi daerah. Anggaran lebih banyak dipakai untuk biaya operasional pegawai daripada pelaksanaan pembiayaan urusan itu sendiri atau biaya pembangunan. Pada bagian lain, kehadiran regulasi teknis yang mengharuskan dibentuknya organisasi perangkat daerah sebagai wadah pelaksanaan urusan tertentu menambah beban daerah. Akibatnya organisasi yang dibentuk meskipun tidak banyak memberi kontribusi bagi kepentingan masyarakat tetap dipertahankan dan menghabiskan dana publik.

Semangat penataan organisasi perangkat daerah selama ini lebih sering berimplikasi, secara langsung maupun tidak langsung, terhadap penambahan jabatan struktural. Semakin besar organisasi maka semakin besar struktur yang ada sehingga semakin besar peluang seorang pegawai menduduki jabatan. Kehadiran organisasi yang dibentuk seolah hanya ingin mengakomodasi kepentingan pegawai negeri atau birokrat di daerah.

Kabupaten Banjar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Ibukota Kabupaten Banjar terletak di Martapura. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah ±4.668,50 Km<sup>2</sup>, merupakan wilayah terluas ke-3 di Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu. Kabupaten Banjar memiliki jumlah penduduk sebanyak 506.839 jiwa. Kabupaten Banjar termasuk dalam calon Wilayah Metropolitan Banjar Bakula.

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023 dengan Pagu Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

**E. KELUARAN**

Keluaran kegiatan tersebut adalah Dokumen kajian/penelitian terkait Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Banjar.

**F. PENUTUP**

1. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijaksanaan pemerintah yang berlaku, maka segala sesuatu yang termaktub di dalam KAK ini akan diteliti dan diperbaiki sesuai ketentuan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam KAK ini akan ditetapkan lebih lanjut.
3. Demikian KAK ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen,



**H. YANUARSA, ST, MT**

NIP. 19720101 200003 1 014

Lampiran 4. Surat Kesediaan Kerjasama



**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

PERINGKAT AKREDITASI B (BAIK) SK BAN-PT NO. 203/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2020

Kampus Utama: Jl. Adhyaksa No. 2 Kayu Tangi Banjarmasin-70123, Telp/Faes (0511) 3304352, www.uniska-bjm.ac.id

Banjarmasin, 6 Juni 2023

Nomor : 312/UNISKA-LP2M/VI/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Kesediaan Kerjasama

Kepada  
Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat penawaran pelaksanaan pekerjaan (Evaluasi terhadap Efektifitas Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banjar), maka setelah meninjau Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjadi lampiran dalam surat penawaran serta sebagai bentuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari menyatakan bersedia menerima penawaran tersebut serta memenuhi hak dan kewajiban yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Ketua  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA) MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI  
Dr. Muhammad Jaelani, S.Pt., M.Si.  
NID. 79570107 199403 1 002





**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

PERINGKAT AKREDITASI B (BAIK) SK BAN-PT NO. 203/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2020

Kampus Utama: Jl. Adhyaksa No. 2 Kaya Tangi Banjarmasin-70123, Telp/Facs (0511) 3304352, www.uniska-bjm.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Ketua LPPM Universitas Islam Kalimantan  
Nomor : 355/UNISKA-LP2M/VI/2023  
Tanggal : 26 Juni 2023

020  
ac.id

**PERSONALIA TIM KAJIAN  
EVALUASI TERHADAP EFEKTIFITAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANJAR**

Ketua Pelaksana : Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. Achmad Jaelani, S.Pt., M.Si.  
Rizka Zulfikar, S.TP., M.M.  
Irfan, S.T., M.T.

Dr. Achmad Jaelani, S.Pt., M.Si.  
NIP. 19670107 199403 1 002

Tentang Pengesahan Statuta UNISKA MAB Tahun 2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Kajian Evaluasi terhadap Efektifitas Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banjar  
Kedua : Tim bertugas mengkaji evaluasi terhadap efektifitas organisasi perangkat daerah Kabupaten Banjar. Sejak dikelurarkannya Surat Keputusan ini.  
Ketiga : Segala biaya yang timbul dari surat keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banjar

## Lampiran 6. Surat Tugas Tim Kajian



**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

PERINGKAT AKREDITASI B (BAIK) SK BAN-PT NO. 203/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2020

Kampus Utama: Jl. Adhyaksa No. 2 Kayu Tangi Banjarmasin-70123, Telp/Facs (0511) 3304352, www.uniska-bjm.ac.id

### **SURAT TUGAS**

Nomor: 357/UNISKA-LP2M/VI/2023

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin memberikan tugas kepada:

Nama : Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H., C.Me.  
Dr. Achmad Jaelani, S.Pt., M.Si.  
Rizka Zulfikar, S.TP., M.M.  
Irfan, S.T., M.T.

Keperluan : Melaksanakan Penelitian: **"Evaluasi terhadap Efektifitas Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banjar"**

Waktu Kegiatan : 26 Juni – 22 November 2023

Tempat : Kabupaten Banjar

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di: Banjarmasin  
Pada Tanggal : 26 Juni 2023

  
Retina  
**Dr. Achmad Jaelani, S.Pt., M.Si.**  
NIP. 19670107 199403 1 002

## Lampiran 7. Kontrak Swakelola Penelitian Evaluasi Kelembagaan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Alamat : J. A. Yani No. 2 Telp. (0511) 771104 Fax. (0511) 725451 Martapura 70111 Kalimantan  
Website : [www.bappeda.banjarkab.go.id](http://www.bappeda.banjarkab.go.id) Email : [info@bappeda.banjarkab.go.id](mailto:info@bappeda.banjarkab.go.id)

### KONTRAK SWAKELOLA

UNTUK MELAKSANAKAN SWAKELOLA

**ANALISIS EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANJAR**

Nomor : 01/PPK/PPI-EvLem/Bappedalitbang/2023

Nomor : 354/UNISKA-LP2M/VI/2023

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut Kontrak) dibuat dan ditandatangani di Martapura pada hari **SENIN** tanggal **DUA PULUH ENAM** bulan **JUNI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH TIGA** antara **H. YANUARSA, S.T., M.T.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang berindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar yang berkedudukan di J. A. Yani Km. 40 Nomor 2 Martapura Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar Nomor 003 Tanggal 02 Januari 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut "PPK" dan **Dr. NURUL LISTIYANI, S.H., M.H.** yang berkedudukan di Jl. Perdagangan Komplek HKSNI Pemai No. 570 RT. 029 RW. 002 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Kartu Identitas Nomor **6371044412730002**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Nomor : **355/UNISKA-LP2M/VI/2023** selanjutnya disebut "PELAKSANA SWAKELOLA".

#### MENINGAT BAHWA

- PPK telah meminta PELAKSANA SWAKELOLA untuk menyediakan barang sebagaimana diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- PELAKSANA SWAKELOLA sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- PPK dan PELAKSANA SWAKELOLA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, mengikat pihak yang diwakili.



d. PPK dan PELAKSANA SWAKELOLA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak

- 1) Telah senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara penuh;
- 3) Telah membaca dan memahami secara penuh kelentuan Kontrak ini;
- 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan PELAKSANA SWAKELOLA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp.89.725.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a) Addendum Surat Perjanjian (Apabila Ada);
  - b) Pokok Perjanjian;
  - c) Proposal (Apabila Ada) atau;
  - d) Dokumen lain yang terkait;
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 diatas.
5. Hak dan kewajiban timbal balik PPK dan PELAKSANA SWAKELOLA dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
    - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PELAKSANA SWAKELOLA;
    - 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang ditetapkan kepada PELAKSANA SWAKELOLA;
  - b. PELAKSANA SWAKELOLA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
    - 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

- 4) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PPK;
  - 5) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 6) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi pelepasan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PELAKSANA SWAKELOLA;
6. Pembayaran dilakukan berdasarkan Sistem Termin yang diatur dengan kesepakatan, untuk Termin Pertama sebesar 40% dari Total Nilai Kontrak dan Termin Kedua sebesar 60% setelah pekerjaan sampai dengan tahap Laporan Akhir selesai/pekerjaan selesai 100%.
- a. Pembayaran dilakukan setelah Tim Pelaksana mengajukan tagihan permohonan Pembayaran disertai dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan.
  - b. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer.
7. Kontrak ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Untuk dan Atas Nama  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  
Penelitian dan Pengembangan Kab. Banjar  
Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Penelitian  
Pengembangan dan Inovasi,

**H. YANUARSA, S.T., M.T.**  
NIP. 19720101 200603 1 014

Untuk dan Atas Nama  
Pelaksana Swakelola  
Ketua Tim Pelaksana,

**Dr. NURUL LISTIYANI, S.H., M.H.**  
NIK. 061204607

Lampiran 8. Permintaan Data Serta Survey terkait Penelitian Evaluasi Kelembagaan



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan. A. Yani No. 2 Telp. (0511) 4721504, Fax. (0511) 4721453 Martapura  
Website : [www.bappedalitbang.banjarkab.go.id](http://www.bappedalitbang.banjarkab.go.id), Email : [bappedalitbang@banjarkab.go.id](mailto:bappedalitbang@banjarkab.go.id)

Martapura, 31 Juli 2023

Nomor : 000.9/637/PPI/Bappedalitbang/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Hal : Permintaan Data Serta Survey  
terkait Penelitian Evaluasi  
Kelembagaan

Kepada Yth.  
(Daftar SKPD Terlampir)  
di -  
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Banjar dengan judul "**Analisis Efektifitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banjar**", yang bekerjasama dengan Tim Peneliti dari Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, dimohon kepada SKPD/instansi terkait untuk dapat membantu Tim Peneliti dalam permintaan data dan survey Penelitian Evaluasi Kelembagaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun untuk Surat Tugas Tim Peneliti (*terlampir*).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Bappedalitbang  
Kabupaten Banjar

Dra. Hj. SITI HAMIDAH, M. Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631224 198503 2 006



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang bersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



## Lampiran 9. Kuesioner Evaluasi Kelembagaan

Pertanyaan untuk masing-masing dimensi/subdimensi akan memiliki 4 (empat) pilihan jawaban yang masing-masing memiliki skor untuk selanjutnya di analisis guna memberikan gambaran atau peringkat hasil evaluasi. Pilihan jawaban untuk pertanyaan sebagai berikut:

Jawaban	Skor
STS : Sangat Tidak	= 1
TS : Tidak Setuju	= 2
S : Setuju	= 3
SS : Sangat Setuju	= 4

### a. Dimensi Struktur

#### 1) Subdimensi Kompleksitas

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Desain organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
2.	Terdapat indikasi bahwa desain organisasi yang ada bersifat kompleks.				
3.	Terdapat indikasi bahwa desain organisasi yang ada bersifat sederhana.				
4.	Tingkatan unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan tugas dan fungsinya dari tingkatan unit organisasi paling atas sampai tingkatan unit organisasi paling bawah.				
5.	Terdapat indikasi adanya tingkatan unit organisasi yang ada tugas dan fungsinya bersifat umum.				
6.	Terdapat indikasi adanya tingkatan unit organisasi yang ada tugas dan fungsinya bersifat spesifik.				
7.	Penataan perangkat daerah telah ditetapkan sesuai dengan substansi pewadahan dan/atau perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.				
8.	Instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
9.	Instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang dibentuk dinilai secara sinergis mendukung tercapainya tujuan				
10.	Jumlah instansi vertikal atau Kantor regional atau UPT yang dibentuk menunjukkan indikasi melebihi				
11.	Jumlah instansi vertikal atau kantor regional atau UPT yang dibentuk menunjukkan indikasi tidak mencukupi				
12.	Jumlah Cabang Dinas/UPTD yang dibentuk menunjukkan indikasi melebihi				
13.	Cabang Dinas/UPTD yang dibentuk dinilai secara sinergis mendukung tercapainya tujuan pembentukan				
14.	Nomenklatur unit organisasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan tugas				
15.	Jenjang jabatan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan.				
16.	Jumlah jabatan pada setiap tingkatan sudah sesuai dengan kebutuhan.				
17.	Jabatan-jabatan fungsional sudah memenuhi kebutuhan.				
18.	Penempatan jabatan-jabatan fungsional mendukung efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi unit operasional.				

2) Subdimensi Formalisasi

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Tugas dan fungsi unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.				

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
2.	Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan setiap unit kerja dari manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah dituangkan secara jelas dalam prosedur formal yang berkekuatan hukum di dalam organisasi.				
3.	Mekanisme hubungan antar unit organisasi yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja.				
4.	Rencana strategis dituangkan secara jelas di dalam keputusan resmi organisasi.				
5.	Kebijakan-kebijakan organisasi selalu dituangkan secara jelas dan tegas di dalam keputusan resmi organisasi.				
6.	Seluruh proses kerja telah dituangkan secara sistematis di dalam peraturan tentang standar operasional prosedur.				
7.	Standarisasi pelayanan publik telah diformalkan.				

### 3) Subdimensi Sentralisasi

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini perlu dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi				
2.	Setiap tingkatan manajemen dapat mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.				
3.	Terdapat indikasi bahwa tingkatan manajemen yang lebih tinggi mengambil alih keputusan dari kewenangan manajemen yang lebih				
4.	Terdapat indikasi bahwa tingkatan manajemen yang lebih rendah dapat mengambil keputusan				

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
5.	Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral telah dituangkan dalam Keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk.				
6.	Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral harus diputuskan oleh manajemen tertinggi dari instansi				
7.	Pimpinan utama instansi hanya membuat keputusan-keputusan yang bersifat strategis dan kebijakan.				
8.	Pimpinan madya pada tingkat manajemen menengah mempunyai wewenang untuk membuat keputusan-keputusan taktis dan manajerial.				
9.	Pimpinan pratama pada unit operasional mempunyai wewenang untuk membuat keputusan-keputusan teknis operasional.				
10.	Pendelegasian kewenangan membuat keputusan-keputusan telah diberikan oleh pimpinan instansi kepada pimpinan unit organisasi tingkat menengah.				
11.	Pendelegasian wewenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat teknis dan operasional telah diberikan kepada pimpinan unit organisasi tingkat menengah ke pimpinan organisasi tingkat bawah.				

b. Dimensi Proses

1) Subdimensi Keselarasan

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Seluruh sasaran strategis organisasi, dari tingkatan manajemen tertinggi sampai menengah ke bawah mempunyai keterkaitan dengan visi dan misi organisasi				

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
2.	Setiap proses kerja yang telah dituangkan dalam Proses Bisnis standar operasional prosedur memiliki keterkaitan yang jelas dengan pencapaian sasaran strategis organisasi.				
3.	Setiap proses kerja yang telah dituangkan dalam Proses Bisnis dan standar operasional prosedur memiliki keterkaitan yang jelas dengan jabatan-jabatan yang ada di dalam struktur organisasi.				
4.	Proses kerja utama pada tingkat organisasi yang lebih rendah selalu mengacu pada proses kerja pada tingkatan manajemen yang lebih tinggi; dengan kata lain proses kerja utama pada organisasi yang lebih rendah merupakan penjabaran dari proses kerja tingkatan organisasi di atasnya (keterkaitan proses)				
5.	Keterkaitan proses kerja antar unit kerja yang terkait di dalam organisasi telah dipetakan/didokumentasikan dengan baik				
6.	Koordinasi antar unit kerja selalu dilakukan dengan baik di dalam setiap pelaksanaan tugas yang melibatkan unit kerja lain di dalam organisasi.				
7.	Keterkaitan proses kerja lintas bidang atau sektoral telah dipetakan secara jelas.				
8.	Koordinasi kerja antar organisasi lintas bidang atau sektoral yang terkait telah terlaksana dengan baik.				



2) Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organisasi dari tingkatan manajemen tertinggi sampai tingkatan menengah ke bawah telah sesuai dengan peraturan perundangan.				
2.	Seluruh kepentingan strategis pemangku kepentingan organisasi, mulai dari tingkat manajemen tertinggi sampai tingkat manajemen menengah ke bawah telah dipetakan dengan baik.				
3.	Setiap proses kerja yang terkait dengan kebutuhan informasi publik dan tidak bersifat rahasia telah dijalankan secara transparan (transparansi).				
4.	Setiap tahapan pekerjaan yang terdapat di dalam proses kerja padaa tingkatan manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah memiliki kesesuaian dan kejelasan fungsi, struktur, dan penanggung jawab pekerjaan (akuntabilitas).				
5.	Setiap proses kerja telah memiliki sistem dan mekanisme pertanggungjawaban (termasuk pelaporan) yang jelas (tanggung				
6.	Tidak terdapat indikasi intervensi yang signifikan di dalam setiap pelaksanaan proses kerja dalam organisasi, baik pada tingkatan manajemen tertinggi sampai dengan manajemen menengah ke bawah.				
7.	Aparat pelaksana proses kerja dapat melaksanakan tugas secara mandiri sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.				

3) Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Standar operasional prosedur selalu diperbarui secara periodik.				
2.	Standar operasional prosedur sebagian besar (lebih dari 50%) dinilai perlu segera diperbaharui karena sudah tidak relevan dan telah dibuat lebih dari 5 (lima) tahun.				
3.	Organisasi selalu melakukan pengembangan terhadap sistem proses kerja.				
4.	Terdapat indikasi bahwa organisasi lebih berorientasi pada hal-hal yang bersifat rutinitas dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat strategis.				

4) Subdimensi Manajemen Risiko

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Manajemen risiko organisasi telah diperkenalkan di dalam organisasi.				
2.	Organisasi telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang memadai.				
3.	Risiko-risiko utama organisasi telah diidentifikasi dengan baik.				
4.	Risiko-risiko utama organisasi yang telah diidentifikasi belum diukur (peluang terjadinya maupun dampaknya) dengan metode yang memadai.				
5.	Organisasi belum melaksanakan kebijakan manajemen risiko.				
6.	Organisasi telah memiliki sistem monitoring risiko yang memadai.				

5) Subdimensi Teknologi Informasi

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Organisasi telah memiliki rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi.				
2.	Organisasi telah memiliki kebijakan IT (e-government) yang memadai.				
3.	Sebagian besar proses kerja telah memanfaatkan teknologi informasi secara				
4.	Sebagian besar proses kerja masih dilaksanakan secara manual.				
5.	Seluruh informasi publik terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi telah dipublikasikan secara periodik di dalam website organisasi.				

## Lampiran 10. Dokumentasi Kegiatan

1. Pertemuan pendahuluan dengan Bappeda Litbang Kab. Banjar pada tanggal 20 Juni 2023



2. Kegiatan penyampaian proposal, perumusan tujuan, responden dan metode kajian yang dilaksanakan di aula Bappeda Litbang pada tanggal 17 Juli 2023.



3. Pelaksanaan Survey berupa penyebaran kuesioner dan pengumpulan hasil tanggapan, yang dilaksanakan ke 27 OPD di Kabupaten Banjar sebagai responden kajian mulai bulan Agustus hingga September 2023.



4. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) 1, berupa penyampaian hasil kajian pendahuluan, yang dilaksanakan di aula Bapeda Litbang pada tanggal 26 September 2023.



5. Kegiatan Penyampaian Laporan Antara, berupa penyampaian hasil kajian sementara, yang dilaksanakan di aula Bapeda Litbang pada tanggal 9 Oktober 2023.



6. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) 2, berupa penyampaian hasil kajian pendahuluan, yang dilaksanakan di aula Bapeda Litbang pada tanggal 6 Nopember 2023.



7. Penyampaian Laporan Hasil, berupa penyampaian hasil akhir kajian, yang dilaksanakan di aula Bapeda Litbang pada tanggal 14 Nopember 2023.



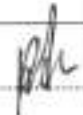
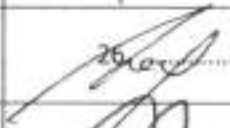


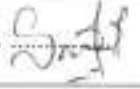
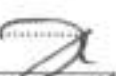

# DAFTAR HADIR



Hari : SELASA  
 Tanggal : 14 NOVEMBER 2023  
 Jam : 09.30 SA Selesai  
 Tempat : Aula Bauntung Lt. II Bappedalitbang  
 Agenda : Ekspose Akhir Penelitian  
 Evaluasi Pelembagaan

No.	Nama	Jabatan	Nama Instansi	Jenis Kelamin (L/P)	Tanda Tangan
1	Hj. Siti Hamidah				1.
2	Lily Agustina	Kabid PPI	Bappedalitbang		2.
3	ACHMAD JELANI	ANGGOTA	UNISKA		3.
4	Murul Lestiyani	Ketua peneliti	UNISKA	P	4.
5	IRHAN	ANGGOTA	UNISKA	L	5.
6	AZKA ZULFIKA	Anggota	UNISKA	L	6.
7	Abdillah	Kasubag	Disdik	L	7.
8	Jahriah	Sekretaris	Disdik	P	8.
9	Diah Ayu Y	Kab. Datin	Bappedalitbang	P	9.
10	Muhammad Rafi	lra II	ITSA	L	10.
11	Farkh R. Y	Kabd. PP	Diponegoro	P	11.
12	Norsyahritza	Kab Inovtek	Bappedalitbang	P	12.
13	AKMALUDDIN	Staf umum	DPKPRH		13.
14	Martinali	Kasubag umum	Dirinas P3R P2K6	P	14.
15	Riky Andia de Mesta	Staf Distan	Distan	P	15.
16	Sjariatil Anin	KIG Informasi Beg. hukum	Beg. hukum	P	16.
17	Gusti Dewi L	Staf Peracuan	DKUM PP	P	17.
18	M. Rizky Ripani	Staf	Bappedalitbang	L	18.



No.	Nama	Jabatan	Nama Instansi	Jenis Kelamin (L/P)	Tanda Tangan
19	Yoor Ichwan	STAF PPI	BAPPENALITAN	L	19. 
20	Rusdiana Lour	KSB. PEMERINTAHAN	BAPPEDA	L	20. 
21	Maulidyanti	Kesbid. eko	Bappeda	P	21. 
22	C Rizki	ASG PEP	Bappeda	L	22. 
23	Dharma Jusnetta	ANALIS PERENCANA	"	P	23. 
24	Raudatul Jannah	Kesbid. Bappeda	Bappeda	P	24. 
25	Nova	Kesbid. Umpeg DPRPLH	DPRPLH	P	25. 
26	A. H. P. d	Staf PPI	Bappedalitbang		26. 
27	Nurizani	Kesbid. keu	- L	P	27. 
28	Et. Rizley NS	ASB. Litbang	Bappedalitbang		28. 
29	Sulhanni	Staf IK	Bappedalitbang		29. 
30	Yulia Sari	Staf PPI	Bappedalitbang		30. 
31	Seanda Katama	Staf	Distan	L	31. 
32	Muzahid	Kesbid. PPO	Bappeda	L	32. 
33	Hj. Heruni M.	Kesbid. IK	- - -	P	33. 
34	Irma Vika	Kesbid. SDIT	- - -	P	34. 
35	Ad. Darmawan	ASG. PPO	- - -	L	35. 
36	Alan Anol	Analisis	Bappedalitbang	P	36. 
37	Lary i	Kesbid. keu	"	P	37. 
38	Emilda	Staf Umpeg	"		38. 
39	Ayu Andini	Staf keu			39. 
40	Maryana	Staf keu			40. 
41	Dhea Aldrea S	Staf keu			41. 



No.	Nama	Jabatan	Nama Instansi	Jenis Kelamin (L/P)	Tanda Tangan
42	Qat Zulfah	umpes	Bappedalabs	P	42. 
43	A. Humaini	Staf Kev	Bappeda Citay	L	43. 
44	Priky Mita H	Staf umpes	bappeda citay	P	44. 
45	Kaela .T.A	Staf opa	—	L	45. 
46	HAWATI	sekretaris	bappeda & Citay	L	46. 
47					47. ....
48					48. ....
49					49. ....
50					50. ....
51					51. ....
52					52. ....
53					53. ....
54					54. ....
55					55. ....
56					56. ....
57					57. ....
58					58. ....
59					59. ....
60					60. ....
61					61. ....
62					62. ....
63					63. ....
64					64. ....